

KAJIAN PENGEMBANGAN INVESTASI WILAYAH PERBATASAN



KAJIAN PENGEMBANGAN INVESTASI WILAYAH PERBATASAN

2011

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Perumusan Masalah	5
	1.3. Tujuan	5
	1.4. Output Penelitian	6
	1.5. Ruang Lingkup Penelitian	6
	1.6. Metode Pelaksanaan Kegiatan	7
	1.6.1. Desk Study	7
	1.6.2. Analisis Location Quotient (LQ)	7
	1.6.3. Analisis SWOT	9
	1.6.4. Analisis Kualitatif	10
BAB II	TINJAUAN UMUM KAWASAN PERBATASAN	13
	2. 1. Pengertian Kawasan Perbatasan	13
	2.2. Kebijakan Umum Kawasan Perbatasan	16
	2.2.1. Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Kawasan Perbatasan	19
	2.2.2. Isu Strategis Pembangunan Kawasan Perbatasan	27
	2.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Rencana Aksi)	32
	2.2.4. Agenda Program Prioritas Pengelolaan Kawasan Perbatasan	32
	2.2.5. Model Pembangunan Kawasan Perbatasan	34
	2.3. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	35
	2.4. Model Teoritis Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan	36
	2.4.1. Mendahulukan Pembangunan Infrastruktur	36
	2.4.2. Mendahulukan Investasi Sektor Swasta	39
	2.4.3. Mendahulukan Kebijakan Pembangunan	42
BAB III	KONDISI UMUM WILAYAH PERBATASAN INDONESIA	44
	3.1. Wilayah Perbatasan Darat	44
	3.1.1. Wilayah Perbatasan Darat di Kalimantan	45
	3.1.2. Wilayah Perbatasan di Papua	46
	3.1.3. Wilayah Perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT)	49
	3.2. Wilayah Perbatasan Laut Republik Indonesia	52

3.3. Wilayah Perbatasan yang Terkait dengan Lokus Koridor Ekonomi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)	56
3.3.1. Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam	56
3.3.2. Propinsi Sulawesi Utara	62
BAB IV	POTENSI PENGEMBANGAN INVESTASI WILAYAH PERBATASAN
4.1. Potensi Pengembangan Investasi di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Kasus: Kota Sabang)	72
4.1.1. Sektor Unggulan Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Kasus: Kota Sabang)	79
4.1.2. Komoditas Unggulan Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Kasus: Kota Sabang)	81
4.1.3. Peluang Pengembangan Investasi di Kota Sabang	82
4.1.4. Hambatan Pengembangan Investasi di Kota Sabang	90
4.1.5. Analisis SWOT Terkait Pengembangan Investasi di Kota Sabang	93
4.2. Potensi Pengembangan Investasi di Sulawesi Utara (Studi Kasus: Kabupaten Kepulauan Talaud)	98
4.2.1. Sektor Unggulan Di Sulawesi Utara (Studi Kasus: Kabupaten Kep. Talaud)	102
4.2.2. Komoditas Unggulan Kabupaten Kepulauan Talaud	108
4.2.3. Sektor Usaha Unggulan Kota Bitung	109
4.2.4. Peluang Pengembangan Investasi di Kabupaten Kepulauan Talaud	110
4.2.5. Hambatan Pengembangan Investasi di Kabupaten Kepulauan Talaud	111
4.2.6. Analisis SWOT Terkait Pengembangan Investasi di Kab. Kep. Talaud	112
4.3. Model Teoritis Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan	114
4.4. Kerjasama Internasional yang Dapat Mendukung Kawasan Perbatasan Sulawesi Utara	115
BAB V	PENUTUP
5.1. Kesimpulan	120
5.2. Rekomendasi Kebijakan	121

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Daftar 26 Pusat kegiatan Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan	15
Tabel 2.2.	Tahapan Pengembangan PKSN tahun 2010-2014	16
Tabel 3.1.	Tipologi Sektor Perekonomian	12
Tabel 3.2.	Proyeksi Pertumbuhan PDRB Industri Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara 2009-2029	68
Tabel 3.3.	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Sulawesi Utara	69
Tabel 4.1.	Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap Produk Domestik Bruto Kota Sabang	82
Tabel 4.2.	Komoditas Pertanian yang dihasilkan di Sabang	83
Tabel 4.3.	Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap Produk Domestik Bruto di Kabupaten Kepulauan Talaud	106
Tabel 4.4.	Laju Pertumbuhan Sulawesi Utara Menurut Sektor Ekonomi (%)	107
Tabel 4.5.	Perkembangan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi dan Palawija Prov. Sulut	105
Tabel 4.4.	Nilai Indeks LQ Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2009	110
Tabel 4.6.	Kontribusi Sektor terhadap Produk Domestik Bruto di Kota Bitung	112

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Sebaran Kawasan Perbatasan di Indonesia	14
Fungsi Penanaman modal	14
Gambar 2.2. Lokasi 10 Kawasan Perbatasan dan Sebaran 26 Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Perbatasan	16
Gambar 2.3. Hubungan Rencana Tata Ruang dengan RPJPN dan RPJMN	21
Gambar 2.3. Kenaikan Permintaan Penanaman modal	11
Gambar 2.4. Distribusi Ruang Penanaman modal dan Dampaknya pada Kesenjangan Regional	12
Gambar 3.2. Pola Pemanfaatan Ruang Pulau Sulawesi	66
Grafik 4.1. Pangsa Komoditi Utama Ekspor Sulut	103
Grafik 4.2. Negara Tujuan Ekspor 2010 dan 2011 dari Sulawesi Utara	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah perbatasan suatu negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

Secara geografis, wilayah kontinen Republik Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga diantaranya Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Kawasan perbatasan kontinen tersebut tersebar di tiga pulau, empat propinsi dan lima belas kabupaten/kota yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan yang berbeda-beda dengan total panjang garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km. Sedangkan wilayah maritim Indonesia berbatasan dengan 10 negara: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan PNG. Kawasan-kawasan perbatasan maritim umumnya berupa pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau, beberapa di antaranya adalah pulau-pulau kecil yang hingga kini masih perlu ditata dan dikelola lebih intensif.

Luasnya wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia tentunya membutuhkan dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan telah menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sebuah sistem manajemen perbatasan yang baik. Selama ini, tanggung jawab pengelolaan wilayah perbatasan hanya bersifat koordinatif antar lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian, tanpa ada sebuah lembaga pemerintah yang langsung bertanggung jawab melakukan manajemen perbatasan dari tingkat pusat hingga daerah. Selama beberapa puluh tahun kebelakang masalah perbatasan masih belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. Hal ini menyebabkan kurang adanya daya tarik bagi para pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonominya di daerah-daerah perbatasan Indonesia.

Luasnya kawasan perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan adanya sebuah kebijakan pengelolaan perbatasan yang efektif dan akuntabel khususnya dari aspek sosial ekonomi dan keamanan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sistem manajemen perbatasan Indonesia selama ini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Meningkatnya tindak kejahatan di perbatasan (*border crime*) seperti penyelundupan kayu, barang, dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, terorisme, serta penetrasi ideologi asing telah mengganggu kedaulatan serta stabilitas keamanan di perbatasan negara. Selama ini, kawasan perbatasan Indonesia hanya dianggap sebagai garis pertahanan terluar negara, oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam mengelola perbatasan hanya pada pendekatan keamanan (*security approach*). Itulah sebabnya aliran investasi kurang menyentuh secara menyeluruh pada daerah perbatasan. Padahal, di beberapa negara tetangga, misalnya Malaysia, telah

menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan secara berdampingan pada pengembangan wilayah perbatasannya. Dengan kondisi yang demikian sehingga pada level lokal permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada dikawasan perbatasan adalah: Keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahal nya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik (infrastruktur), rendahnya kualitas SDM pada umumnya, dan penyebaran penduduk yang tidak merata.

Kondisi wilayah perbatasan saat ini pada umumnya belum mendapat perhatian secara proporsional. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sarana prasarana yang tersedia di wilayah perbatasan. Hal ini banyak menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (*transnational crimes*). Kondisi umum perekonomian di wilayah perbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
3. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
4. Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (*blank spot*).

Wilayah perbatasan Indonesia mempunyai nilai strategis dalam pembangunan nasional. Berlimpahnya sumber daya alam dan budaya yang akan mendukung pengembangan wilayah tampaknya belum banyak dieksplorasi secara optimal. Padahal keunggulan ini akan membuka peluang bagi pengembangan wilayah sebagai tujuan kegiatan ekonomi seperti kegiatan industri dan perdagangan serta pariwisata. Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 juga telah menegaskan bahwa orientasi pengembangan wilayah perbatasan dari

inward looking menjadi *outward looking* sebagai pintu gerbang ekonomi dan perdagangan.

Kekayaan ekonomi dan keunggulan non ekonomi lainnya yang ada juga merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya, disamping mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan antar wilayah maupun antar Negara. Serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun nasional. Keberhasilan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan ini juga dapat ditentukan oleh dinamika seberapa kooperatif kolaborasi lintas wilayah dan derajat keterlibatan kelompok masyarakat, pemerintah daerah, BUMD, sektor swasta dan lembaga hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya melakukan identifikasi pengembangan investasi di kawasan perbatasan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian di wilayah perbatasan. Terkait dengan hal tersebut, maka BKPM melakukan kajian pengembangan investasi di wilayah perbatasan Indonesia pada Tahun Anggaran 2011. Kajian ini selain untuk memperoleh informasi mengenai peluang, potensi, serta permasalahan di wilayah perbatasan juga dilakukan untuk mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) terutama di koridor-koridor ekonomi. Hal ini terkait dengan kedudukan wilayah perbatasan yang diantaranya terkait dengan lokus-lokus koridor ekonomi dalam MP3EI. Lebih dari itu, wilayah perbatasan yang akan dijadikan studi kasus pada kajian ini juga akan difokuskan untuk mendukung program ASEAN *connectivity*, dimana Sulawesi Utara (Bitung) akan diproyeksikan pintu gerbang perdagangan internasional kawasan ASEAN di Indonesia bagian timur. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung dan memberi masukan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan investasi di wilayah perbatasan yang terkait dengan koridor ekonomi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi umum yang mempengaruhi pengembangan investasi di wilayah perbatasan Indonesia yang terkait dengan lokus koridor ekonomi dalam MP3EI (studi kasus: Kota Sabang dan Kab. Kep. Talaud)?
2. Bagaimanakah peluang dan potensi pengembangan investasi di wilayah perbatasan Indonesia yang terkait dengan lokus koridor ekonomi dalam MP3EI (studi kasus: Kota Sabang dan Kab. Kep. Talaud) ?
3. Bagaimana kebijakan yang berlaku di bidang penanaman modal baik di pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan wilayah perbatasan yang terkait dengan lokus koridor ekonomi dalam MP3EI?

1.3. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Menggambarkan kondisi umum yang mempengaruhi pengembangan investasi di wilayah perbatasan Indonesia (studi kasus: Kota Sabang dan Kab. Kep. Talaud).
2. Menganalisis peluang dan potensi pengembangan investasi di wilayah perbatasan Indonesia (studi kasus: Kota Sabang dan Kab. Kep. Talaud).
3. Merekomendasikan kebijakan di bidang penanaman modal baik bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan wilayah perbatasan yang terkait dengan lokus koridor ekonomi dalam MP3EI.

1.4. Output Penelitian

Output dari penelitian ini adalah tersedianya identifikasi pengembangan investasi di kawasan perbatasan termasuk usulan kebijakan dan prospek

pengembangannya sehingga dapat dipromosikan kepada calon investor dengan data dan informasi yang *up to date* dan komprehensif. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah dimanfaatkan data dan informasi sebagai acuan dalam mengembangkan dan memasarkan potensi investasi profil pengembangan investasi di wilayah perbatasan secara terfokus dan terarah (*targeted investor*).

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Kajian pengembangan investasi di wilayah perbatasan ini mengambil beberapa studi kasus pada wilayah perbatasan Indonesia. Wilayah kajian studi tersebut antara lain adalah wilayah perbatasan yang khususnya terkait erat dengan lokus koridor ekonomi dan program ASEAN *Connectivity*, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Sulawesi Utara, dengan lingkup kegiatan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting wilayah perbatasan;
2. Mengidentifikasi kebijakan yang saat ini berlaku di wilayah perbatasan baik kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
3. Mengidentifikasi peluang pasar *demand-supply* dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan investasi wilayah perbatasan dan proyeksi kebutuhan ke depan;
4. Membuat model insentif investasi di wilayah perbatasan dengan menggunakan beberapa alternatif skenario.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui pengumpulan data, bahan dan informasi yang diperlukan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, studi literatur, studi lapangan di dalam negeri dan kunjungan ke beberapa negara tertentu yang telah berhasil dalam mengembangkan wilayah perbatasannya.

Dalam rangka untuk melengkapi data, bahan dan informasi yang ada, dilakukan beberapa pertemuan dan diskusi yang fokus dan intensif dengan instansi-instansi teknis terkait baik di pusat maupun di daerah, disamping diskusi

dengan para pakar atau tenaga ahli yang kompeten dan asosiasi dunia usaha yang terkait.

1.6. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan utama pembuatan kajian ini merupakan kajian *desk study* secara mendalam. Di mana berbagai dokumen, data sekunder, serta potensi dan pengembangan investasi akan dikaji dan disarikan dalam bentuk draft laporan kajian.

1.6.1. Desk Study

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (Desk Study). Kajian *desk study* berfungsi sebagai materi awal yang menjadi pengantar untuk dapat menganalisis persoalan energi secara lebih tepat dan terarah.

Kajian *desk study* dilakukan secara mendalam dimana berbagai dokumen, data sekunder, serta fenomena–fenomena yang terkait dengan pengembangan investasi daerah di wilayah perbatasan akan dikaji dan disarikan dalam bentuk draft kajian. Hal itu adalah sebagai langkah pendahuluan untuk mendapatkan gambaran terlebih dahulu terhadap fenomena yang diamati.

1.6.2. Analisis Location Quotient (LQ)

Metode LQ untuk mengidentifikasi komoditas unggulan diakomodasi dari Miller & Wright (1991), Isserman (1997), dan Ron Hood (1998). Menurut Hood (1998), Location Quotient adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan.

Pada dasarnya model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah. Ekspor itu sendiri tidak terbatas pada bentuk barang-barang dan jasa, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak (Budiharsono, 2001).

Teori ekonomi basis mengklarifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Deliniasi wilayah dilakukan berdasarkan konsep-konsep perwilayahan yaitu konsep homogenitas dan konsep administrasi. Dijelaskan oleh Rusastra (2002) bahwa yang dimaksud kegiatan basis merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa ditujukan untuk ekspor ke luar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional. Konsep efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis sangat menentukan dalam pertumbuhan basis suatu wilayah.

Sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang atau jasa diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Konsep swasembada, mandiri, kesejahteraan dan kualitas hidup sangat menentukan dalam kegiatan non basis ini. Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai *leading sector* suatu kegiatan ekonomi. Dasar pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan

Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau *leading sector*. Hasil dari analisis ini akan memperlihatkan sektor yang berperan secara dominan sebagai sektor basis dan sektor yang tidak berperan secara dominan disebut sebagai sektor non basis. Pengelompokan sektor basis

dan non basis berdasarkan besaran LQ yang diperoleh dari hasil analisis adalah sebagai berikut:

- $LQ < 1$: Berarti sektor tersebut memiliki potensi yang kecil untuk menjadi sektor basis wilayah
- $LQ = 1$: Berarti sektor tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan lokalnya dan dapat berpotensi sebagai kegiatan basis ekonomi wilayah.
- $LQ > 1$: Berarti sektor tersebut merupakan sektor basis ekonomi wilayah. Alat ukur yang umum digunakan dalam menghitung LQ adalah kesempatan kerja (*employment*). Namun karena data tenaga kerja di wilayah penelitian sukar diperoleh, maka perhitungan nilai LQ dalam penelitian ini menggunakan data PDRB.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dapat diketahui potensi relatif dari masing-masing sektor di wilayah tertentu. Analisis ini membandingkan antara PDRB Kecamatan di wilayah perbatasan dengan PDRB Kabupaten sebagai wilayah acuan. Metode LQ ini cukup memiliki relevansi dengan kajian Analisis Potensi dan Pengembangan Investasi Di Wilayah Perbatasan Indonesia karena dapat mengetahui sektor-sektor perekonomian yang memiliki potensi di wilayah tersebut untuk lebih ditumbuhkembangkan melalui kegiatan-kegiatan investasi.

1.6.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah instrument perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan eksternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka.

Kerangka SWOT – sebuah matrix dua kali dua – sebaiknya dikerjakan dalam suatu kelompok yang terdiri dari anggota kunci tim atau organisasi. Pertama, penting untuk diketahui dengan jelas tentang apa tujuan perubahan kunci, dan terhadap tim atau organisasi apa analisis SWOT akan dilakukan.

Setelah pertanyaan-pertanyaan ini dijelaskan dan disepakati, mulailah dengan brainstorming gagasan, dan kemudian setelah itu dipertajam dan diperjelas dalam diskusi.

Perkiraan mengenai *kapasitas internal* dapat membantu mengidentifikasi dimana posisi sebuah proyek atau organisasi saat ini: sumberdaya yang dapat segera dimanfaatkan dan masalah yang belum juga dapat diselesaikan. Dengan melakukan hal ini kita dapat mengidentifikasi dimana/kapan sumberdaya baru, keterampilan atau mitra baru akan dibutuhkan. Bila berpikir tentang kekuatan, perlu memikirkan tentang contoh-contoh keberhasilan yang nyata dan apa penjelasannya.

1.6.4. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui model teoritis pengembangan wilayah perbatasan. Terdapat tiga pendekatan pengembangan wilayah perbatasan. (C.T.Wu, 2001 dalam Husnaldi, 2006). Pendekatan ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *pertama*, perencanaan dengan mendahulukan membangun infrastruktur (*infrastructure led*) sebagai investasi sebelum aktifitas ekonomi dimulai. *Kedua*, mendahulukan investasi sektor swasta (*investment led*), dan *ketiga*, mendahulukan program-program dan kebijakan (*policy led*) yang bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan kawasan perbatasan. Analisis penentuan model teoritis ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Untuk menghasilkan Model Teoritis pengembangan kawasan perbatasan dilakukan proses dengan membandingkan model teoritis dari beberapa kasus di negara yang telah berhasil maupun gagal dalam mengembangkan kawasan perbatasan. Analisis deskriptif dilakukan terhadap beberapa model empirik di negara lain berdasarkan potensi wilayahnya dengan beberapa asumsi, konsep dan konteks tertentu sehingga didapatkan model teoritis.

Tahapan selanjutnya, melihat *industrial cluster*. Ini merupakan suatu pendekatan yang dipandang sesuai bagi pembangunan ekonomi di tengah dinamika perkembangan dewasa ini. Klaster industri juga merupakan suatu cara yang baik untuk membangun modal sosial (khususnya hubungan yang mendorong aktivitas-aktivitas produktif) dalam suatu komunitas atau daerah. Klaster akan menghimpun perwakilan dari industri, pemerintah, dunia pendidikan dan organisasi lainnya untuk bekerjasama bagi perbaikan ekonomi. Dengan penguatan klaster-klaster industri, suatu daerah/negara semakin memiliki peluang mengembangkan potensi terbaiknya dan bersaing di arena global. Langkah yang diperlukan dalam analisis ini adalah menggali informasi tentang kegiatan bisnis di wilayah perbatasan yang saling terkait *forward-linkage*-nya termasuk seberapa besar support institusi atau kelembagaan.

Tabel 1.1.
Tipologi Pengembangan Kawasan Perbatasan

Tipe Wilayah Perbatasan	Hubungan Ekonomi	Kerangka Institusi/ Pemerintah	Tipe Perusahaan	Jaringan Infrastruktur Pemerintah	Migrasi	Perbedaan upah Buruh	Contoh Kasus
Wilayah <i>Border</i>	Kecil dan kontrol ketat	Kecil	perorangan/ perusahaan kecil	<i>Bottleneck</i> akibat ketatnya kontrol dan inefisien	Kontrol ketat (<i>frontier</i>)	Sangat Besar	Rusia-China-Korut (Tumen)
		terjadi hanya pada satu sisi	berkembang dengan spontan/ alamiah	(idem)	(idem)	Besar	Thailand-China-Burma-Laos
Wilayah <i>Cross-border</i>	Hubungan Terikat	Terjadi Mekanisme Konsultatif	Perusahaan besar dan kecil disetiap sisi - hubungan kontraktual- <i>Joint Ventures</i>	<i>Consultatif Planning</i> - kontrol perbatasan masih penting	Migrasi terkontrol (pedagang komuter); mahasiswa komuter	Besar Berkurang	Polandia-Jerman Hongkong-Shenzhen
Wilayah <i>Trans-border</i>	Simbiosis	Kerjasama Institusi	Jaringan Perusahaan; Transfer teknologi; Teknologi; <i>Sharing Network</i>	Perencanaan Jaringan Infrastruktur Bersama	Prosedur sederhana dan pergerakan relatif bebas	Kecil bahkan nol	Uni Eropa

Sumber : C.T.Wu dalam "Cross-border Development in Changing World," New Regional Development Paradigm Vol.2, 2001:29 dalam Husaini (2006)

BAB II

TINJAUAN UMUM KAWASAN PERBATASAN

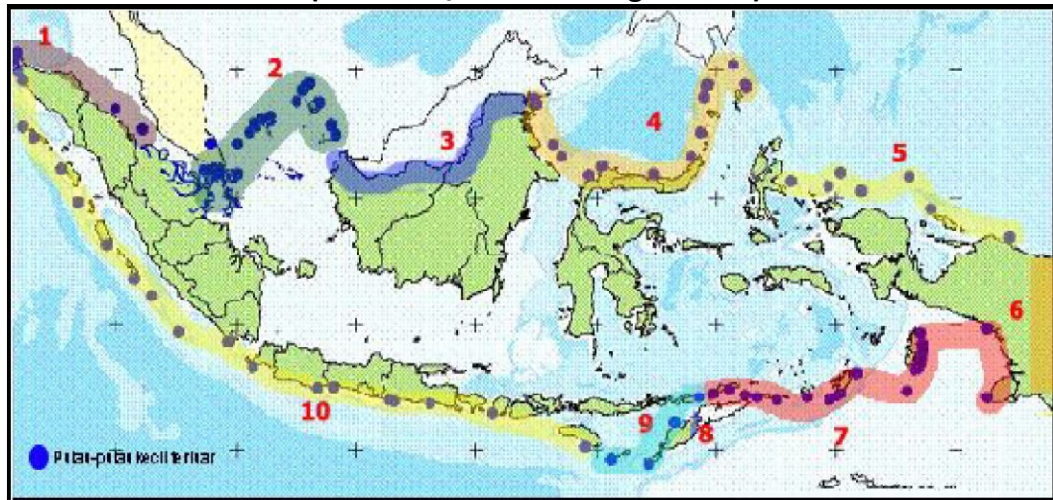
2.1 Pengertian Kawasan Perbatasan

Pengertian Kawasan Perbatasan dijelaskan secara formal dalam beberapa undang-undang Indonesia. Dalam undang-undang no 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, kawasan perbatasan didefinisikan sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Adapaun dalam undang-undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perbatasan didefinisikan sebagai wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan daratan dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Adapun ruang lingkup kawasan perbatasan secara lebih spesifik dijabarkan dalam undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan PP No. 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) dimana kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang meliputi 10 kawasan (3 kawasan perbatasan darat serta 7 kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar).

Dalam Bappenas (2008), dijelaskan mengenai sinkronisasi definisi kawasan perbatasan dalam undang-undang (UU) tata ruang dan wilayah negara dimana definisi yang ada dapat dipahami sebagai unit yang saling mengisi, dimana pengembangan dengan unit kabupaten/kota perbatasan diarahkan pada aspek ekonomi yang mencakup wilayah yang lebih luas dan *borderless*, termasuk PKSN sebagai pusat pertumbuhan (PP 26 /2008) sedangkan pengembangan dengan unit kecamatan perbatasan diarahkan pada penguatan sabuk pertahanan dan kesejahteraan masyarakat (UU 43/2008).

**Gambar 2.1 Sebaran Kawasan Perbatasan di Indonesia
(PP No. 26/2008 tentang RTRWN)**



Keterangan Gambar 2.1

1. Kawasan Perbatasan Laut dengan Thailand/India/Malaysia (NAD/Sumut), 2 Pulau Kecil Terluar.
2. Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia/Vietnam/Singapur (Riau dan Kepri), 20 Pulau Kecil Terluar.
3. Kawasan Perbatasan Darat dengan Malaysia (Kalbar dan Kaltim)
4. Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia dan Filipina (Kaltim, Sulteng dan Sulut), 18 Pulau Kecil Terluar.
5. Kawasan Perbatasan Laut dengan Palau (Maluku Utara, Papua Barat, Papua), 8 Pulau Kecil Terluar.
6. Kawasan Perbatasan Darat dengan Papua Nugini (Papua).
7. Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (Papua dan Maluku), 20 Pulau Kecil Terluar.
8. Kawasan Perbatasan Darat dengan Timor Leste (NTT)
9. Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (NTT), 5 Pulau Kecil Terluar.
10. Kawasan Perbatasan Laut berhadapan dengan Laut Lepas, 19 Pulau Kecil Terluar.

Sumber: BAPPENAS, 2011.

Negara kepulauan Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh negara). Di darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara, yaitu : (1) Malaysia; (2) Papua New Guinea ; dan (3) Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu: (1) India, (2) Malaysia, (3) Singapura, (4) Thailand, (5) Vietnam, (6) Filipina, (7) Republik Palau, (8) Australia, (9) Timor Leste dan (10) Papua Nugini. Perbatasan laut ditandai oleh keberadaan 92 pulau-

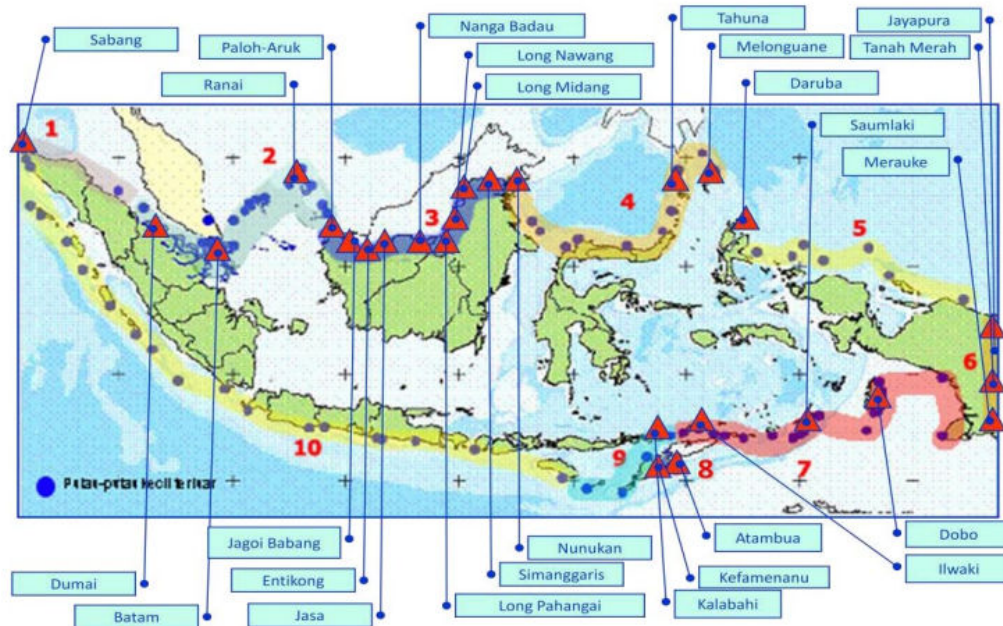
pulau terluar yang menjadi lokasi penempatan titik dasar yang menentukan penentuan garis batas laut wilayah.

Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai penjabaran Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menetapkan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Perbatasan (PKSN). PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara yang ditetapkan dengan beberapa kriteria, antara lain : (1) pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; (2) pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; (3) pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan (4) pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara.

Tabel 2.1 Daftar 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan

PKSN	Kab/Kota	PKSN	Kab/Kota
1.Jagoibabang	Bengkayang	14.Jayapura	Jayapura (Kota)
2.Nangabadau	Kapuas Hulu	15.Merauke	Merauke
3.Paloh-Aruk	Sambas	16.Batam	Batam
4.Entikong	Sanggau	17.Ranai	Natuna
5.Jasa	Sintang	18.Dobo	Kepulauan Aru
6.Long Pahangai	Kutai Barat	19.Saumlaki	Maluku Tenggara Barat
7.Long Nawan	Malinau	20.Ilwaki	
8.Nunukan	Nunukan	21.Daruba	Halmahera Utara
9.Simanggaris		22.Sabang	Sabang
10.Long Midang		23.Kalabahi	Alor
11.Atambua	Belu	24.Dumai	Dumai
12.Kefamenanu	Timor Tengah Utara	25.Tahuna	Kepulauan Sangihe
13.Tanah Merah	Boven Digoel	26.Melonguane	Kepulauan Talaud

Gambar 2.2 Lokasi 10 Kawasan Perbatasan dan Sebaran 26 Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Perbatasan



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2009-2014

Adapun pengembangan PKSN dilakukan secara bertahap terhadap 20 PKSN, sedangkan terhadap 6 PKSN lainnya sesuai dengan RTRWN akan dikembangkan pada periode selanjutnya. Adapun tahapan pengembangannya diatur dalam peraturan pemerintah no. 26 tahun 998 yang diolah oleh BAPPENAS yang dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tahapan Pengembangan PKSN tahun 2010-2014

2010	2011	2012	2013	2014
Paloh-Aruk	Melonguane	Kefamenanu	Atambua	Long Midang
Jagoiabang	Merauke	Simanggaris	Ranai	Daruba
Nangabadau	Sabang	Jayapura	Dumai	Tanah Merah
Entikong	Tahuna	Batam	Saumiaki	
Nunukan				

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2009-2014

2.2 Kebijakan Umum Kawasan Perbatasan

Berbagai peraturan perundangan nasional yang terkait dengan pengelolaan Perbatasan Negara, antara lain UU No. 17 tahun 2005 tentang RPJP Nasional, Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJM Nasional (2010-2014), UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Perundang-undangan tersebut mengupayakan percepatan pembangunan terhadap kawasan yang terdapat di sisi terluar dari wilayah negara atau Kawasan Perbatasan. Kawasan perbatasan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dari sudut pandang pertahanan dan keamanan karena memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, selain sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dikembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara. Adapun Pusat Kegiatan Strategis Nasional ditetapkan dengan kriteria:

- a. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
- b. Pusa perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
- c. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
- d. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Beberapa regulasi tambahan seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2010 tentang pengamanan perbatasan telah diberlakukan untuk mendukung pengamanan wilayah perbatasan Indonesia, sebagai contoh prajurit tentara nasional Indonesia dan pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara penuh dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilaya perbatasan diberikan tunjangan operasi pengamanan setiap bulan yang besarnya berkisar antara 50% - 150% dari gaji pokok mereka.

Selain itu sisi regulasi juga telah mencakup aspek peran serta masyarakat dalam kawasan perbatasan mengingat peran masyarakat sangat penting untuk menunjang keberlangsungan atau sustainabilitas pengembangan kawasan perbatasan. Dalam hal ini, menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 68 tahun 2010 tentang bentuk dan cara peran masyarakat dalam penataan ruang (pasal 8), bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa: a) masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b) kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Dalam hal ini bentuk kerja sama masyarakat dengan Pemerintah pusat atau pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk *public private participation*, privatisasi, *ruilslag* dan *turn key*. Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian; c) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal¹ dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f) kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam MP3EI setiap koridor ekonomi mempunyai tema pusat produksi dan pengolahan, seperti koridor Sulawesi mempunyai tema pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Koridor ini diharapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia, dan Amerika. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki potensi dalam bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan-kegiatan unggulannya. Meskipun demikian, secara umum terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di Koridor Ekonomi Sulawesi:

¹Yang dimaksud dengan “kearifan local” adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

- Rendahnya nilai PDRB per kapita di Sulawesi dibandingkan pulau lain di Indonesia;
- Kegiatan ekonomi utama pertanian, sebagai kontributor PDRB terbesar (30 persen), tumbuh dengan lambat padahal kegiatan ekonomi utama ini menyerap sekitar 50 persen tenaga kerja;
- Investasi di Sulawesi berasal dari dalam dan luar negeri relatif tertinggal dibandingkan daerah lain;
- Infrastruktur perekonomian dan sosial seperti jalan, listrik, air dan kesehatan kurang tersedian dan belum memadai.

Pembangunan koridor akan difokuskan di pertanian pangan, kakao, perikanan, nikel, serta minyak dan gas. Selain itu, kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi dapat dikembangkan yang potensial untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di koridor ini.

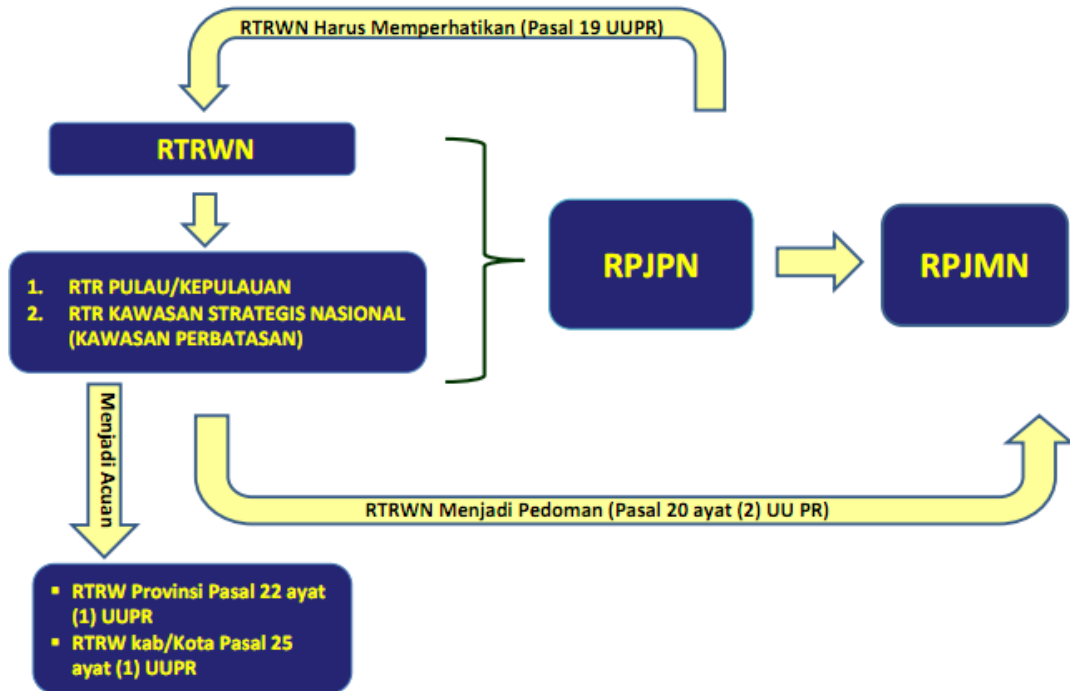
2.2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Kawasan Perbatasan

Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengikuti beberapa arahan pengembangan. Arahan pertama yaitu kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dipandang sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Kedua, ditetapkan 10 kawasan perbatasan negara, 9 diantaranya merupakan kawasan yang berhadapan dengan wilayah darat atau laut negara tetangga. Ketiga, ditetapkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antar negara. Keempat, Program utama dalam penataan ruang kawasan perbatasan hingga tahun 2019 adalah: (i) pengembangan/peningkatan kualitas kawasan perbatasan, aspek kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan pertahanan keamanan; (ii) percepatan pengembangan kota-kota utama perbatasan (PKSN).

Di sisi lain, dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2004-2025, kebijakan pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip. Pertama, pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan laut di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Kedua, pembangunan wilayah perbatasan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Ketiga, wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

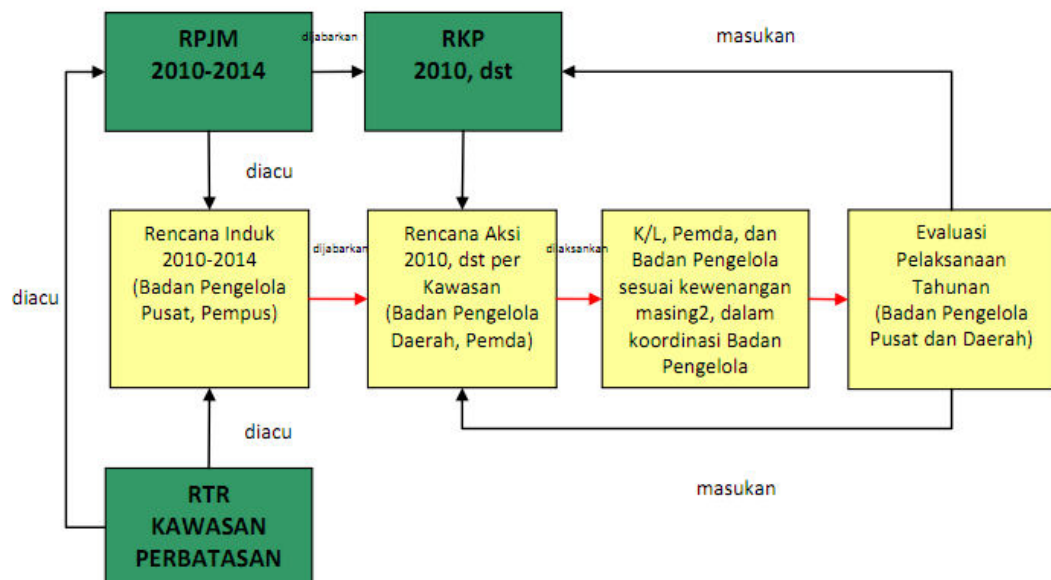
Dalam lima tahun kedepan, menurut rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014, pengembangan kawasan perbatasan merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah. Adapun program-program yang dilakukan yaitu menyelesaikan pemetaan wilayah perbatasan RI dengan negara-negara tetangga dan mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengutamakan kebijakan pembangunan yang berorientasi ke luar sehingga menjadi pintu gerbang dalam hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Gambar 2.2. Hubungan Rencana Tata Ruang dengan RPJPN dan RPJMN



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pengembangan Kawasan Perbatasan Tahun 2010-2014

Gambar 2.3 Manajemen Pengelolaan Kebijakan Kawasan Perbatasan



Sumber: Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas (2008)

Dalam pengelolaan perbatasan, pemerintah juga menyusun suatu rencana induk untuk memastikan prinsip-prinsip pengembangan wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Selain itu, kebijakan dan strategi ini nantinya juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah Perbatasan Negara dari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik dari sisi regulasi maupun kegiatan pembangunan. Dari sisi regulasi, pada tahun 2005 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) yang mengamanatkan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam aspek keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Pada tahun 2008 telah diterbitkan UU No 43 tentang Wilayah Negara, sebagai payung kebijakan bagi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara secara terpadu, yang salah satunya mengamanatkan pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah.

Dalam UU no 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, pengembangan batas wilayah dan kawasan perbatasan mengatur beberapa hal pokok antara lain:

- Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pengelolaan batas wilayah dan kawasan negara. Dalam hal ini Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam upaya pembangunan social dan ekonomi.
- Mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola di tingkat pusat dan daerah yang diberi tugas untuk mengelola batas wilayah dan kawasan

perbatasan dalam hal: (1) penetapan kebijakan dan program ; (2) penetapan rencana kebutuhan anggaran (3) pengkoordinasian pelaksanaan; dan (4) pelaksanaan evaluasi dan pengawasan dimana upaya untuk meningkatkan sinergitas pembangunan antar sektor dan antara pusat – daerah.

- Perumusan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan wilayah negara termasuk kawasan perbatasan. Dalam hal ini pelibatan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan dan penciptaan keamanan.

Dalam pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014, pengembangan kawasan perbatasan merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah. Adapun program-program yang dilakukan yaitu menyelesaikan pemetaan wilayah perbatasan RI dengan negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengutamakan kebijakan pembangunan yang berorientasi ke luar sehingga menjadi pintu gerbang dalam hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Bappenas (2011) menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking*, menjadi *outward looking* sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (*security approach*). Sedangkan program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009), bertujuan untuk: (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Disamping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, dengan program-program antara lain : Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir melalui kegiatan : (i) pengarusutamaan DAK untuk wilayah perbatasan, terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi, (ii) penerapan skema kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan untuk telekomunikasi serta listrik pedesaan; Pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan Negara; Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan, melalui kegiatan : (i) penetapan garis batas negara dan garis batas administratif, (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kapabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah Perbatasan Negara (CIQS); Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara administratif terletak di wilayah Perbatasan Negara.

Komitmen pemerintah melalui kedua produk hukum ini pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini

disebabkan karena beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumberdaya, koordinasi, dan faktor lainnya.

Di samping aspek regulasi, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengelolaan batas wilayah dan pengembangan kawasan perbatasan. Dari sisi penetapan dan penegasan batas, telah dilakukan Ratifikasi Perjanjian Batas Laut Kontinen (BLK) RI-Vietnam pada Mei 2007. Dengan Malaysia, telah dilakukan 14 kali perundingan untuk menyelesaikan permasalahan batas antarkedua negara. Dengan Filipina, telah dirundingkan penetapan batas ZEE dan Landas Kontinen di Laut Sulawesi. Terakhir, dengan Singapura, pada tanggal 10 Maret 2009 telah ditandatangani kesepakatan dengan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura. Dengan Palau, proses awal yang telah dilakukan untuk memulai perundingan batas laut telah berhasil disepakati. Dengan Timor Leste, masih dilakukan penyelesaian batas darat yang menjadi landasan untuk dapat melanjutkan pembahasan pada perundingan perbatasan laut, yang batas maritime antarkedua negara baru akan dirundingkan setelah batas darat dituntaskan.

Dari sisi pertahanan dan keamanan, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah melakukan pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar). Namun demikian, dengan jarak antarpos perbatasan yang rata-rata masih berjarak 50 km dan pembangunan pos pulau terdepan (terluar) yang baru difokuskan di 12 pulau, tingkat kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) lainnya masih relatif tinggi. Gangguan keamanan yang masih terjadi di kawasan perbatasan terutama dalam bentuk aktivitas ilegal berupa pencurian sumber daya alam dan perpindahan patok-patok batas. Keterbatasan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) juga seringkali dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengeruk sumber daya alam secara ilegal.

Sementara itu, dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya dalam penyediaan sarana prasarana wilayah, pengembangan perekonomian setempat, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dalam aspek infrastruktur, misalnya telah dilakukan pembangunan jalan di kawasan perbatasan sepanjang 670,2 km, pembangunan jalan di pulau terdepan (terluar) sepanjang 571,8 km, pengoperasian kapal penyeberangan perintis, penyediaan listrik di kecamatan perbatasan, pengembangan bandar udara, pembangunan pemancar TVRI, prasarana perdagangan, dan berbagai jenis infrastruktur lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan. Meskipun demikian, secara umum hingga saat ini kondisi pembangunan di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di kawasan perbatasan masih sangat jauh tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan wilayah lain ataupun dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah negara tetangga yang berbatasan, khususnya di perbatasan Kalimantan. Jika ditinjau status ketertinggalan wilayah, 27 kabupaten di kawasan perbatasan masih dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Kondisi ini merupakan tantangan utama bagi upaya pengembangan kawasan perbatasan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan dimasa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Sebagai wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika sehingga pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Di lain pihak, salah satu negara tetangga yaitu Malaysia, telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya.

Demikian juga Timor Leste, tidak tertutup kemungkinan dimasa mendatang dalam waktu yang relatif singkat, melalui pemanfaatan dukungan internasional, akan menjadi negara yang berkembang pesat, sehingga jika tidak diantisipasi provinsi NTT yang ada di perbatasan dengan negara tersebut akan tetap tertinggal.

Dengan berlakunya perdagangan bebas baik ASEAN maupun internasional serta kesepakatan serta kerjasama ekonomi baik regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut. Kerjasama sub-regional seperti AFTA (Asean Free Trade Area), IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area) dan AIDA (Australia Indonesia Development Area) perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan keuntungan kedua belah pihak secara seimbang. Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional dan sub-regional tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan dan langkah serta program pembangunan yang menyeluruh dan terpadu sehingga Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang menyebabkan sumberdaya alam yang tersedia terutama di wilayah perbatasan akan tersedot keluar tanpa memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan sub-regional perlu disiapkan. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.

2.2.2 Isu Strategis Pembangunan Kawasan Perbatasan

Permasalahan pengembangan kawasan perbatasan yang akan dihadapi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut.

1. Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum

a. Belum disepakatinya beberapa segmen batas negara di darat dan di laut. Di wilayah perbatasan laut, segmen batas negara masih memerlukan kesepakatan di antaranya adalah:

- (i) Zona Ekonomi Eksklusif antara RI-India, RI-Vietnam, RI-Filipina, RI-Thailand, RI-Palau, RI-Timor Leste, RI-Australia;
- (ii) Batas Laut Teritorial antara RI-Malaysia di Laut Sulawesi dan RI-Timor Leste, Three junction point RI-Singapura-Malaysia; serta
- (iii) Batas Landas Kontinen RI-Filipina, RI-Palau, RI-Timor Leste, dan RI-Australia.

Di samping itu, perlu diperhatikan pula pulau-pulau kecil terdepan (terluar) di sekitar perbatasan laut sebagai lokasi penempatan titik dasar/titik referensi sebagai acuan dalam menarik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Sementara itu, di wilayah perbatasan darat, masih terdapat 9 (sembilan) masalah perbatasan darat (*outstanding boundary problems*) pada titik-titik atau segmen tertentu, di antaranya RI-Malaysia, yakni: (a) garis batas negara antara Kalimantan Barat-Serawak (Segmen Gunung Raya, Batu Aum, Sungai Buan, dan Segmen D.400); (b) garis batas negara Kalimantan Timur dan Sabah (Sungai Sinapad, Sungai Semantil, Pulau Sebatik, Segmen daerah prioritas 2700 dan segmen daerah prioritas C.500); dan (c) belum disepakatinya beberapa segmen batas darat RI-Timor Leste. Permasalahan batas negara di wilayah perbatasan darat juga diwarnai oleh kerusakan atau pergeseran sebagian patok atau pilar batas, sehingga demarkasi batas di lapangan menjadi kabur; dan (d) belum terselesaikannya batas negara yang dapat menimbulkan potensi konflik teritorial dengan negara tetangga sehingga mengancam kedaulatan wilayah dan mengakibatkan kerancuan dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

b. Masih sering terjadi praktek pelanggaran hukum di kawasan perbatasan akibat penegakan hukum yang masih lemah. Pelanggaran itu berupa pencurian kayu, penyelundupan barang, pencurian ikan, dan penjualan

manusia (*human trafficking*) yang dihadapkan pada masalah luasnya wilayah perbatasan yang harus diawasi, dimana belum sebanding dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengamanan dan pengawasan yang ada.

2. Perekonomian Wilayah

- a. Belum berkembang kota-kota utama kawasan perbatasan sebagai pusat kegiatan ekonomi kawasan perbatasan. Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 telah menetapkan 26 kota perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Namun, hingga saat ini, sebagian besar PKSN belum berkembang sebagai motor penggerak perekonomian dan pusat pelayanan kegiatan kawasan perbatasan.
- b. Belum optimal pelaksanaan kerjasama ekonomi antarnegara. Forum kerjasama antarnegara yang melibatkan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan. Kondisi geografis yang berdekatan dengan negara tetangga memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya suatu kerjasama yang saling menguntungkan, misalnya melalui pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) seperti Brunei-Indonesia-Malaysia-Phillipines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), dan Australia-Indonesia Development Area (AIDA), serta kerjasama perbatasan seperti Forum Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (SOSEK MALINDO).

3. Kesejahteraan Masyarakat

- a. Tingginya keluarga miskin di kawasan perbatasan, adalah implikasi dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur sosial ekonomi, rendahnya produktivitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam.
- b. Perbedaan tingkat kesejahteraan dengan negara tetangga, khususnya di kawasan yang kondisi kesejahteraan masyarakatnya lebih rendah dibandingkan masyarakat di negara tetangga.

4. Sarana dan Prasarana

- a. Jumlah Pos Lintas Batas (PLB) masih sangat terbatas. Saat ini hanya tersedia 79 PLB tradisional dan internasional sebagai pintu gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan. PLB yang ada saat ini sebagian besar belum dilengkapi oleh fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan. PLB yang telah dilengkapi pada umumnya belum didukung oleh dengan prasarana dan sarana penunjang yang mencukupi, seperti jalan, listrik, air bersih, dan perumahan bagi aparat.
- b. Aksesibilitas perhubungan yang belum memadai, menyebabkan keterisolasian wilayah. Pada sebagian besar kawasan perbatasan masih sulit dijumpai akses transportasi darat ke kota-kota tertentu yang mempunyai fungsi untuk pelayanan pemerintahan dan pelayanan ekonomi. Hal ini menimbulkan kecenderungan masyarakat setempat untuk berorientasi kepada pelayanan sosial ekonomi di wilayah negara tetangga yang lebih mudah diakses.
- c. Sarana komunikasi dan informasi masih terbatas, misalnya pemancar radio dan televisi serta jaringan telepon kabel. Akibatnya, masyarakat di kawasan perbatasan lebih banyak memanfaatkan fasilitas komunikasi dan informasi dari negara tetangga sehingga informasi dan wawasan tentang perkembangan nasional menjadi kurang diketahui oleh masyarakat di perbatasan.
- d. Sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar yang masih sangat terbatas. Kondisi ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah penduduk dan belum meratanya penyebaran penduduk yang tinggal di perbatasan. Akibatnya, tidak sedikit warga perbatasan yang cenderung memanfaatkan kedekatan geografis dan kekerabatan etnis untuk mendapatkan pelayanan dasar sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, dari negara tetangga.

5. Kelembagaan

- a. Belum ada lembaga yang menangani pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Saat ini pengelolaan batas wilayah negara masih ditangani oleh forum-forum yang bersifat ad hoc, sedangkan pengembangan kawasan perbatasan masih cenderung bersifat sektoral, parsial dan tidak terpadu.
- b. Belum terpadu pengembangan kawasan perbatasan dan belum tercipta kolaborasi yang efektif antarsektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antarpemerintah daerah dalam pengembangan kawasan perbatasan sehingga sering menyebabkan terjadinya inefisiensi dan inefektivitas kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan.

6. Pengelolaan Sumberdaya Alam

- a. Pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan tidak terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan, misalnya penebangan kayu ilegal di kawasan hutan lindung secara liar dan besar-besaran di Kalimantan dan Papua. Selain itu, juga masih terjadi penambangan pasir laut di pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- b. Pemanfaatan sumber daya alam tidak berkelanjutan. Semua potensi sumberdaya alam di kawasan perbatasan, baik yang di laut atau di darat, secara umum masih belum dilakukan untuk se kedar memenuhi kebutuhan mendesak saat ini. Apabila dikelola dengan baik dengan prinsip berkelanjutan, pemanfaatan sumberdaya alam seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata dapat berpotensi mendatangkan devisa yang besar.

2.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Rencana Aksi)

Untuk Perbatasan Darat², strategi pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan dengan:

1. Mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana prasarana CIQS (bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan) di Pos Lintas Batas (PLB).
2. Mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan;
3. Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan;
4. Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan darat.

Untuk Perbatasan laut, strategi pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan dengan:

1. Mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana di PLB (exit entry point).
2. Mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut;
3. Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan;
4. Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan di kawasan darat.

2.2.4. Agenda Program Prioritas Pengelolaan kawasan Perbatasan³

Untuk Perbatasan Darat, terdapat 4 agenda program prioritas seperti berikut:

Agenda program priortias aspek hankam dan hukum adalah:

- a. Penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan darat.
- b. Kerjasama antara negara dalam pengamanan kawasan perbatasan

² Sumber: FGD BNPP aceh 20 Mei 2011.

³ Sumber: Engkus Ruswana- Konsultan DSF

- c. Pengembangan dan modernisasi Pos Lintas Batas (PLB)
- d. Pengadaan sarana prasarana pos Pamtas (Pengamanan Perbatasan)

Agenda program prioritas aspek ekonomi kawasan adalah:

- a. Pengembangan kerjasama ekonomi sub-regional
- b. Pengembangan Agropolitan
- c. Pengembangan Kota Terpadu Mandiri
- d. Ekowisata
- e. Pengemabnagan perdagangan lintas batas

Agenda program prioritas aspek social dasar adalah:

- a. Pemberdayaan masyarakat
- b. Peningkatan pelayanan social dasar
- c. Pemberdayaan komunitas adat terpencil
- d. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi kawaan perbatasan

Agenda Program prioritas aspek kelembagaan adalah:

- a. Pembinaan Kesbangpol
- b. Penguatan penyelenggaraan pemilu
- c. Bina pembangunan daerah
- d. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Untuk perbatasan laut & pulau-pulau kecil terluar, terdapat lima agenda program prioritas seperti berikut ini:

Agenda program prioritas aspek batas:

- a. Penetapan batas maritime
- b. Baseline data profil titik dasar kepulauan
- c. Pemeliharaan titik dasar kepulauan
- d. Survei dan pemetaan nasional

Agenda program prioritas aspek hankam dan hukum:

- a. Kedaulatan, hukum dan keamanan laut
- b. Kerjasama antar negara dalam pengamanan perairan perbatasan

- c. Pemberdayaan nelayan perbatasan
- d. Pengembangan dan modernisasi Pos lintas batas laut
- e. Pemantapan eksistensi pulau-pulau kecil terluar

Agenda program prioritas aspek ekonomi kawasan:

- a. Pengembangan kerjasama ekonomi sub-regional
- b. Pengembangan minapolitan

Agenda program prioritas aspek sosial dasar:

- a. Pemberdayaan masyarakat perbatasan
- b. Peningkatan pelayanan social dasar
- c. Pemberdayaan komunitas adat terpencil
- d. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi kawasan perbatasan

Agenda program prioritas aspek kelembagaan:

- a. Pengembangan kapasitas kelembagaan kecamatan perbatasan
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan

2.2.5 Model Pembangunan Kawasan Perbatasan⁴

Terdapat beberapa model pembangaunan yang dapat dilakukan untuk membangun kawasan perbatasa, diantaranya sebagai berikut:

1. Model Pusat Pertumbuhan (PKSN/PKL)

Fokus pengembangan adalah menjadikan pusat pertumbuhan dengan menyediakan pusat permukiman, penyediaan sarana-prasarana dan memfasilitasi kegiatan ekonomi untuk memicu pertumbuhan daerah sekitarnya

2. Model Transito

Fokus pengembangan adalah mengembangkan pusat transit bagi penduduk kedua negara dengan mengembangkan pusat permukiman dan *welcome plaza*, serta dilengkapi dengan sarana dan prasaran keimigrasian

3. Model Stasiun Riset dan Wisata Lingkungan

⁴ Hasil Workshop Pembahasan Ran-bnpp

Fokus pengembangan adalah mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati dan budaya serta kekhasan alam dengan membuat fasilitas riset yang menarik peneliti dan mengembangkan objek wisata alam yang menarik wisatawan.

4. Model Kawasan Agropolitan

Fokus pengembangan adalah ekonomi wilayah berbasis pertanian untuk mencukupi kebutuhan kawasan dan mengisi peluang pasar ekspor ke negara tetangga.

5. Model Kawasan Perbatasan Laut

Fokus pengembangan adalah ekonomi wilayah berbasis sumber daya laut dan pesisir dengan membangun akuakultur, pelabuhan bebas, wisata pantai dan industri kelautan.

2.3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Menurut Perpres No 12 Tahun 2010, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mempunyai tugas: Pertama, menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Adapun penerapan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dalam ruang wilayah dilakukan melalui penetapan lokasi prioritas 2010/2014 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kecamatan di kawasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau terdapat *exit/entry point*.
2. Kecamatan di kawasan laut yang secara tradisional memiliki interaksi intensif dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi dengan penduduk negara tetangga di sebelahnya (ditandai dengan adanya *exit/entry point* yang disepakati dengan negara tetangga).
3. Kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN).
4. Kecamatan yang memiliki pulau-pulau kecil terluar (PPKT)

5. Pertimbangan khusus.

Adapun cakupan wilayah administrasi (CWA), wilayah konsentrasi pengembangan (WKP), dan lokasi prioritas (Lokpri) Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2010-2014 yaitu: 12 provinsi (CWA), 38 kabupaten/kota (WKP), 111 kecamatan (Lokpri).

Tabel 2.3 Jumlah Penanganan Lokpri

Lokasi Prioritas (LOKPRI)	2012	2013	2014
Lokpri darat	28 (TA)	28(TL)	28(TP)
		13(TA)	13(TL)
			27(TA)
Lokpri laut	11(TA)	11(TL)	11(TP)
		18(TA)	18(TL)
			14(TA)
Jumlah per tahapan	39(TA)	39(TL)	39(TP)
		31(TA)	31(TL)
			41(TA)
Jumlah total yang ditangani	39	70	111

Keterangan : TA: Tahap Awal
 TL: Tahap Lanjutan
 TP: Tahap Pemantapan

2.4. Model Teoritis Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan**2.4.1 Mendahulukan Pembangunan Infrastruktur (*Infrastructure led*)**

Kegiatan ini biasanya melibatkan peran pemerintah atau lembaga multilateral dalam perencanaan pengembangan kawasan yang belum atau tidak mempunyai nilai ekonomi secara signifikan. Hal ini dikarenakan kawasan yang akan dikembangkan tersebut secara geografis adalah kawasan terpencil atau karena alasan politik dan keamanan sehingga tidak berkembang. Dua contoh kawasan yang mewakili pendekatan ini adalah *Tumen River Development Zone* dan *Hongkong-Shenzhen Special Economic Zone* (SEZ).

Tumen River Development Zone

Kawasan ini terletak di Timur Laut China. *Tumen River Development Zone* dikembangkan atas prakarsa dan kerjasama antara *United Nations Development Program* (UNDP) dengan Pemerintah China, Korea Utara, Rusia, dan Mongolia,

dengan dukungan Pemerintah Jepang dan Korea Selatan sebagai *partner* (UNDP, 1993).

Kawasan ini terkenal karena sumberdaya alamnya dan memiliki pelabuhan laut dalam. Sejak 1991, UNDP telah mencoba mengembangkan kawasan ini dengan membentuk koalisi bersama beberapa negara yang mempunyai kepentingan terhadap kawasan ini dengan maksud untuk menarik investasi internasional. UNDP telah melakukan investasi cukup besar dalam penelitian dan perencanaan kawasan (Lee, 1998). Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan zona tiga negara (China, Korea Utara dan Rusia) yang akan menjadi simpul transportasi utama. UNDP menganggap kawasan ini sangat strategis sebagai kawasan pengembangan industri dan merupakan sebuah kawasan dinamis dengan 10 juta populasi yang bermukim di kawasan ini. Negara-negara yang berpartisipasi menanggapi dengan cara yang berbeda. Rusia misalnya, yang sedang mengalami proses *double transformation* nampaknya tidak terlalu antusias, dan khawatir kawasan “timur jauh”nya akan semakin berkembang. Sedangkan Pemerintah Korea Utara menunjukkan sinyal bahwa keikutsertaannya tidak diharapkan oleh rejim pemerintahannya. Namun kontras dengan apa yang dilakukan Pemerintah China, khususnya di kawasan Yanbian (bagian dari Provinsi Jilin), yang justru menanggapi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di wilayahnya untuk mengantisipasi *booming* ekonomi yang diprediksi akan terjadi. China juga membangun jalur kereta api dari Yanbian ke salah satu pelabuhan di wilayah Timur Jauh Rusia. Investasi secara terbatas juga dilakukan di Kota Hunchun dalam wilayah Yanbian, tetapi dampaknya juga masih terbatas. Pengembangan *Tumen River Development Zone* menunjukkan salah satu jenis perencanaan *top-down* yang dilakukan oleh lembaga Internasional (Kim dan Wu, 1998). Dari paparan diatas, minimal ada tiga masalah kunci yang muncul, yaitu: kecilnya tingkat koherensi keikutsertaan dan *comon interest* diantara negara-negara yang terlibat; ketidakjelasan dari komplementaritas ekonomi secara langsung; dan ketidakmampuan dalam membantu pencapaian tujuan umum dan mengatasi

kondisi kultural, etnis, dan konflik internal dari negara-negara peserta. Selain itu adanya faktor-faktor perubahan ekonomi dan iklim ekonomi internasional baik dari negara-negara peserta maupun negara-negara *pen-support*, menyebabkan proyek ini mencapai kemajuan yang lamban (Wu, 2001:30).

Hongkong-Shenzhen Special Economic Zone (SEZ)

Kawasan perbatasan Hongkong-Shenzhen telah menarik perhatian dunia dalam beberapa dekade terakhir, dikarenakan kawasan ini berkembang sangat pesat terutama di wilayah Shenzhen sendiri dan seluruh kawasan Delta Zhujiang (Liew, 1998). *Shenzhen Special Economic Zone (SEZ)* dimulai pada tahun 1979. Kawasan ini membutuhkan waktu hampir 10 tahun sebelum berkembang seperti sekarang. Perhatian riset terfokus pada pembangunan ekonomi Shenzhen dikarenakan transformasi ekonomi Hongkong dan munculnya hubungan simbiosis antara sektor manufaktur di Hongkong dengan industri baru di Shenzhen.

Kasus Hongkong-Shenzhen adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan pendekatan ini. Didasarkan pada kondisi yang mendukung, perencanaan *top-down* dapat menghasilkan pembangunan yang signifikan dan berlanjut. Pendekatan komplementaritas ekonomi adalah prasyarat utama. Keberadaan pusat pertumbuhan (Hongkong) yang membutuhkan transformasi ekonomi serta tersedianya kawasan terdekat yang berbatasan langsung dengan tenaga kerja dan nilai lahan yang lebih murah, merupakan kondisi utama. Kesamaan budaya dan bahasa merupakan kondisi yang menguntungkan. Ditambah lagi ekonomi transisi yang dilakukan China mengadopsi sistem ekonomi pasar. Proses ini diawali dengan melibatkan pembangunan properti dan mengintensifkan tenaga kerja bidang manufaktur. Sampai akhirnya mencapai industri berbasis teknologi seperti pada saat ini.

Meskipun hasil yang telah dicapai Shenzhen dalam proses ini sangat signifikan, termasuk permasalahan kebijakan politiknya, namun masih terdapat persoalan lain yaitu lemahnya institusi dalam menangani permasalahan lintas batas. Permasalahan ini diantaranya: regulasi pertanahan, proteksi lingkungan, dan perencanaan infrastruktur (Wu, 2001:30).

2.4.2. Mendahulukan Investasi Sektor Swasta (*Investment led*)

Terdapat beberapa contoh pendekatan ini yang muncul di zona perbatasan. Sering hal ini menjadi permulaan dari rencana pengembangan tetapi pengembangan sektor swasta berskala kecil cenderung mendominasi pada awalnya. Dominasi perdagangan di kawasan perbatasan Polandia dan *eks* Jerman Timur, perbatasan Thai-China-Burma dan Laos (TCBL), dan perbatasan China-Vietnam di Dong xing dan Mong Chai merupakan tiga contoh kasus dalam pendekatan ini.

Polandia-Jerman

Negara-negara di bagian timur tengah Eropa, menunjukkan perubahan politik menuju ke arah proses politik yang demokratis dan bergerak ke arah ekonomi yang berorientasi pasar. Negara-negara ini juga mengalami pengembangan yang cukup pesat di sejumlah kawasan perbatasan mereka. Sebagai contoh perkembangan yang ditunjukkan oleh negara-negara pecahan bekas Uni Soviet, antara Polandia dan *The Commonwealth of Independent State (CIS)* Rusia, serta antara Polandia dan *eks* Jerman Timur. Disparitas ekonomi dan regional disoroti pada upaya penyesuaian ganda yang menghasilkan keuntungan dan kerugian bagi kawasan perbatasan. Kasus ini menyoroti ciri-ciri yang lain dari pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka ekonomi transisi.

Pada sisi barat perbatasannya, Polandia memasok kebutuhan-kebutuhan pada negara berkembang dengan tingkat pendapatan yang rendah, sedangkan pada sisi timur perbatasan, Polandia memasok barang kebutuhan negara-negara baru yang sedang mengalami proses transformasi ganda. Pada kedua sisi perbatasannya, yaitu barat dan timur, peranan sektor informal dalam perdagangan lintas batas tidak dapat disangkal. Beberapa diantaranya cenderung berkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu di perbatasan. Sektor informal berperan besar dalam menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat *eks* Jerman Timur, karena barang-barang yang diproduksi negaranya sendiri cukup mahal dan tidak terjangkau masyarakat. Pada sisi timur

perbatasan, Polandia menjadi pemasok barang kebutuhan yang terjangkau. Kawasan perbatasan Polandia memperoleh manfaat dari pengalaman transisi ekonomi yang dilakukannya serta kedekatannya kepada pasar, sehingga membuat barang yang diproduksi menjadi terjangkau dan kompetitif. Biaya transaksi dalam banyak kasus ditanggung oleh konsumen yang datang dengan sendirinya kepada pemasok (dalam kasus Jerman) dan negosiasi birokrasi yang dilakukan di sisi timur perbatasan. Ini merupakan budaya tersendiri dalam pola konsumsi barang. Pada kasus dimana pengembangan industri terjadi, maka keterkaitan dengan ekonomi domestik juga terjadi dengan sendirinya. Hal ini berkembang dikarenakan investor tidak perlu menggunakan keahlian industri di Polandia atau infrastruktur industri yang ekstensif, tetapi tertarik pada pengalaman dan ketrampilan di bidang manufaktur serta tenaga kerja industri yang murah dan kompetitif. Strykiewicz menyimpulkan bahwa sebuah institusi baru sangat dibutuhkan untuk lebih mendorong pengembangannya.

Thailand-China-Burma-Laos (TCBL)

Meskipun investasi Thailand semakin meningkat terhadap negara tetangganya dan berkeinginan untuk meningkatkan pengembangan kawasan perbatasannya dengan China, Burma dan Laos, namun Thailand belum memiliki program pengembangan kawasan perbatasan yang melibatkan negara tengganya secara komprehensif. Malahan, beberapa lembaga pemerintahan telah mengimplementasikan beberapa skema, termasuk merencanakan pengembangan beberapa kawasan perbatasannya (misalnya di Nogkhai dan Chong Mek di bagian Timur Laut).

Sejumlah inisiatif dan prakarsa telah diambil, seperti: merencanakan *Special Economic Zone (SEZ)*, deregulasi kebijakan dan mendirikan zona perdagangan bebas (*free trade zone*), *master plans* pariwisata, dan rencana fisik bagi kota-kota di perbatasan (Pemerintah Thailand dan ADB, 1998). Tetapi yang kemudian terjadi adalah para investor mem *by-passed* kawasan ini. Sebagai contoh utama adalah sebuah kota dimana terdapat jembatan yang

menghubungkan Nong Khai pada perbatasan Thailand-Laos, yang dibangun atas bantuan Pemerintah Australia dan dibuka secara diam-diam, rupanya tidak cukup menarik bagi investor sehingga jembatan ini diabaikan. Tidak satupun perdagangan *cargo* secara resmi tercatat pada akhir tahun 1998 dan hanya sejumlah kecil perdagangan informal terjadi di Chong Mek, sebuah kota yang sengaja didisain untuk mengantisipasi pengembangan.

Sebaliknya, perkembangan justru terjadi di berbagai tempat di kawasan selatan dan barat perbatasan yang tidak direncanakan sebelumnya. Kota Sodao, yang terletak di sebelah selatan, misalnya, dekat perbatasan Malaysia, mengalami peningkatan volume perdagangan sekitar 50% dari total perdagangan lintas batas Thailand. Begitu juga Kota Mae Sod, di perbatasan sebelah barat telah menghasilkan 49 proyek senilai US\$ 94 juta selama periode 1993-1998 (Pemerintah Thailand dan ADB, 1998). Meskipun beberapa proyek pengembangan telah mendapat sangsi oleh Badan Investasi Thailand, namun pengembangannya tetap berlanjut. Sehingga permasalahan kerusakan lingkungan dan polusi yang terjadi sekarang tidak dapat dihindari.

China dan Vietnam

Pengembangan kawasan perbatasan Provinsi Guangxi (China) dan Provinsi Quang Ninh (Vietnam) sangat menarik, karena kawasan ini merepresentasikan pola pengembangan perbatasan berbasis perdagangan (*trade-based border development*), dengan intensitas pembangunan zona industri yang berhasil menarik investasi asing.

Intensitas yang sama juga terjadi di wilayah di Kota Dongxing-Provinsi Guangxi. Setengah dari total perdagangan lintas batas Provinsi ini melewati zona perbatasan Dongxing (China) dan Mong Cai (Vietnam). *Booming* perdagangan yang terjadi sejak tahun 1990 di Kota Dongxing dan kawasan sekitarnya telah meningkatkan perekonomian mereka dengan pesat, dan telah berhasil menarik minat investor asing. Kota Mong Cai di Vietnam dan Provinsi Quang Ninh juga berhasil mengambil manfaat dari pembaharuan perdagangan dengan China dan

berkeinginan untuk mengembangkan lebih jauh kawasan perbatasannya untuk menarik investor dan turis asing dari China. Kota Mong Cai adalah pusat pasar yang sedang berkembang dimana berbagai jenis komoditi yang berasal dari China diperdagangkan disini. Banyak pengusaha-pengusaha China memasuki Mong Cai setiap harinya untuk berdagang. Investor China melihat hal ini sebagai peluang pariwisata, sehingga mereka membangun sejumlah hotel di Kota Mong Cai. Pemerintah Otoritas Vietnam dan China telah sepakat akan memaksimalkan keuntungan kawasan Dong Xing-Mong Cai secara bersama-sama dan membangun kawasan industri bagi investor asing. Mereka mempunyai konsep yang sama tentang pentingnya sebuah lokasi.

Pada kota-kota di kawasan perbatasan dimana pintu masuknya saling berdampingan, perencanaan zona bisnis internasional dan komersial mendapatkan keuntungan dari *booming* perdagangan di kawasan perbatasan. Pengembangan berbagai kegiatan industri akhirnya membentuk zona industri yang berorientasi ekspor. Seiring dengan itu berbagai fasilitas dan infrastruktur pariwisata juga dibangun. Mong Cai sedang merencanakan membangun *air port* yang berjarak 25 km dari perbatasan. Berbagai fasilitas pelabuhan utama juga direncanakan oleh Vietnam di Cai Lan, yang berlokasi sejauh 124 km di sebelah barat Mong Cai, pelabuhan telah juga telah dibangun di bagian barat Dong xing yaitu di Fangcheng dan Beihai. Jika semua rencana ini terealisasi, pengembangan tersebut akan membentuk sabuk perkotaan (*urban belt*) sepanjang Teluk Tonkin sejauh 40 km melintasi perbatasan China dan Vietnam.

2.4.3. Mendahulukan Kebijakan Pembangunan (*Policy led*)

Uni Eropa (EU) secara kontras merencanakan integrasi dan penggabungan negara-negara Eropa ke dalam kesatuan moneter dan membentuk kawasan seolah-olah tanpa batas (*borderless*). Kedua ciri-ciri tersebut mendorong secara aktif suatu kesepakatan resmi melalui program-program spesifik dan *financial assistance*. Keberadaan zona-zona industri utama seperti *The Upper Rhine*, *Badden Wurttemberg*, dan *Emilia-Romagna* telah

menjalani proses pembelajaran berdasarkan pengalaman yang relevan dari berbagai kawasan di dunia, banyak diantaranya merupakan kawasan perbatasan. Dalam konteks ini, hal tersebut akan melahirkan ekspektasi bagi persaingan antar unit-unit kawasan industri dan kawasan perbatasan dengan jaringan perusahaan yang mereka miliki akan menjadi pusat kunci. Dalam beberapa kasus, pengembangan perbatasan di Uni Eropa akan dihadapkan pada berbagai masalah seperti konflik etnis dan budaya serta *bottlenecks* transportasi. Hal ini menyebabkan ekspektasi di Uni Eropa terhadap pengembangan perbatasan akan menjadi semacam norma.

Tujuan dari pengembangan kawasan perbatasan di Uni Eropa adalah memperkuat keunggulan daya saing serta komplementaritas ekonomi. Program-program bantuan keuangan ditujukan bagi pengembangan institusi yang potensial. Studi tentang interaksi serta perilaku pencari kerja mengidentifikasikan bahwa diantara negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa terdapat kesamaan level kondisi perekonomian secara fisik, kognitif dan budaya.

Bertram (1998) dalam studinya tentang *Eurogion Viadrina*, sebuah kawasan perbatasan antara Jerman dan Polandia menyimpulkan bahwa terjadi ketidak sesuaian perencanaan dalam pengembangan kawasan perbatasan. Bertram juga mengungkapkan tujuan kompetisi dalam sub-unit kawasan cenderung menghalangi pengembangan kawasan perbatasan. Inisiatif lokal dan pemerintah juga dapat menjadi kendala, meningkatkan biaya transaksi yang dapat diukur dari indikasi bertambahnya prosedur-prosedur resmi.

BAB III

KONDISI UMUM WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

Wilayah perbatasan Indonesia terdiri dari perbatasan darat dan laut. Perbatasan darat berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste serta perbatasan laut berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG).

Setiap wilayah perbatasan memiliki ciri khas masing-masing, dengan potensi yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Potensi yang dimiliki oleh wilayah perbatasan yang bernilai ekonomis cukup besar adalah potensi sumberdaya alam (hutan, tambang dan mineral, serta perikanan dan kelautan) yang terbentang di sepanjang dan sekitar wilayah perbatasan. Sebagian besar dari potensi sumberdaya alam tersebut belum dikelola, dan sebagian lagi merupakan kawasan konservasi atau hutan lindung yang memiliki nilai sebagai warisan dunia (*world heritage*) yang perlu dijaga dan dilindungi. Kondisi umum tersebut tentu saja dapat mempengaruhi pengembangan investasi pada masing-masing daerah.

3.1. Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia

Wilayah perbatasan darat Indonesia berada di 3 (tiga) pulau, yaitu Pulau Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor, serta tersebar di 4 (empat) provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT. Setiap wilayah perbatasan memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain. Wilayah perbatasan di Kalimantan berbatasan dengan Negara Malaysia yang masyarakatnya lebih sejahtera. Wilayah perbatasan di Papua masyarakatnya relatif setara dengan masyarakat

PNG, sementara dengan Timor Leste wilayah perbatasan Indonesia masih relatif lebih baik dari segi infrastruktur maupun tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

3.1.1 Wilayah Perbatasan Darat di Kalimantan

Pulau Kalimantan memiliki wilayah perbatasan dengan Malaysia di 8 (delapan) kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak sepanjang 847,3 km yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Kabupaten Bengkayang. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan wilayah Sabah sepanjang 1.035 km yang melintasi 256 desa dalam 9 kecamatan dan 3 kabupaten yaitu di Nunukan, Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau.

Dari kelima kabupaten di Kalimantan Barat dan tiga kabupaten di Kalimantan Timur, hanya terdapat 3 (tiga) pintu perbatasan (*border gate*) resmi, yaitu di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat, serta Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur. Kabupaten Sanggau dan Nunukan memiliki fasilitas *Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS)* dengan kondisi yang relatif baik, sedangkan fasilitas CIQS di tempat lainnya masih sederhana serta belum didukung oleh aksesibilitas yang baik karena kondisi jalan yang buruk.

Wilayah perbatasan daerah lain seperti di Kabupaten Sintang, Sambas, Kapuas Hulu, Malinau dan Kutai Barat masih belum memiliki pintu perbatasan resmi dan masih dalam tahap pembangunan. Sesuai kesepakatan dengan pihak Malaysia dalam forum Sosek Malindo, sebenarnya telah disepakati pembukaan beberapa pintu perbatasan secara bertahap di beberapa wilayah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, Sintang dan Bengkayang.

Namun demikian, masyarakat di sekitar perbatasan sudah menggunakan pintu-pintu perbatasan tidak resmi sejak lama sebagai jalur hubungan tradisional dalam rangka kekeluargaan atau kekerabatan. Pos-pos keamanan dan pertahanan yang tersedia di sepanjang jalur tradisional tersebut masih sangat

terbatas, demikian pula dengan kegiatan patroli keamanan yang masih menghadapi kendala berupa minimnya sarana dan prasarana transportasi.

Potensi sumberdaya alam wilayah perbatasan di Kalimantan cukup besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung, dan danau alam yang dapat dikembangkan menjadi daerah wisata alam (ekowisata) serta sumberdaya laut yang ada di sepanjang perbatasan laut Kalimantan Timur maupun Kalimantan Barat. Beberapa sumberdaya alam tersebut saat ini berstatus taman nasional dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya seperti Cagar Alam Gunung Nyiut, Taman Nasional Bentuang Kerimun, Suaka Margasatwa Danau Sentarum di Kalimantan Barat, serta Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur.

Saat ini beberapa areal hutan tertentu yang telah dikonversi tersebut berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta nasional bekerjasama dengan perkebunan Malaysia. Seiring dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut, maka berbagai kegiatan ilegal telah terjadi seperti pencurian kayu atau penebangan kayu liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh oknum-oknum di negara tetangga bekerjasama dengan masyarakat Indonesia. Kegiatan penebangan kayu secara liar oleh orang-orang Indonesia ini dipicu oleh kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

3.1.2 Wilayah Perbatasan di Papua

Sebelum mengalami pemekaran kabupaten, wilayah perbatasan di Papua terletak di 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke. Setelah adanya pemekaran wilayah kabupaten, maka wilayah perbatasan di Papua terletak di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke, serta 23 (dua puluh tiga) wilayah kecamatan (distrik). Dari kelima kabupaten tersebut,

Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang dan Boven Digoel merupakan kabupaten baru hasil pemekaran.

Garis perbatasan darat antara Indonesia dan PNG di Papua memanjang sekitar 760 km dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan. Garis batas ini ditetapkan melalui perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Inggris pada tanggal 16 Mei 1895.

Jumlah pilar batas di wilayah perbatasan Papua hingga saat ini masih sangat terbatas, yaitu hanya 52 buah. Jumlah pilar batas ini tentu sangat tidak memadai untuk suatu wilayah perbatasan yang sering dijadikan tempat persembunyian dan penyeberangan secara gelap oleh kelompok separatis kedua negara. Kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidaktahuan masyarakat di sekitar perbatasan terhadap garis batas yang memisahkan kedua negara, bahkan diantara penduduk tersebut banyak yang belum memiliki tanda pengenal atau identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya.

Pintu atau pos perbatasan di wilayah perbatasan Papua terdapat di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagaimana pintu perbatasan di Sanggau dan Nunukan, karena fasilitas CIQS-nya belum lengkap tersedia. Pada umumnya aktifitas pelintas batas masih berupa pelintas batas tradisional seperti yang dilakukan oleh kerabat dekat atau saudara dari Papua ke PNG dan sebaliknya, sedangkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan komoditas antara kedua negara melalui pintu batas di Jayapura masih sangat terbatas pada perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari dan alat-alat rumah tangga yang tersedia di Jayapura. Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di Merauke relatif lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi dipintu-pintu masuk tidak resmi yang

menghubungkan masyarakat kedua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi.

Wilayah perbatasan Papua memiliki sumberdaya alam yang sangat besar berupa hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung dan taman nasional yang ada di sepanjang perbatasan. Kondisi hutan yang terbentang di sepanjang perbatasan tersebut hampir seluruhnya masih belum tersentuh atau dieksploitasi kecuali di beberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai hutan konversi. Selain sumberdaya hutan, kawasan ini juga memiliki potensi sumberdaya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi cukup tinggi.

Secara fisik kondisi wilayah perbatasan di Papua bergunung dan berbukit yang sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau kendaraan roda empat. Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk mencapai wilayah perbatasan adalah pesawat terbang perintis dan pesawat helikopter yang sewaktu-waktu digunakan oleh pejabat dan aparat pemerintah pusat dan daerah untuk mengunjungi kawasan tersebut.

Sebagaimana di daerah lainnya kondisi masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan Papua sebagian besar masih miskin, tingkat kesejahteraan rendah, tertinggal serta kurang mendapat perhatian dari aparat pemerintah daerah maupun pusat. Kondisi masyarakat Papua di sepanjang perbatasan yang miskin, tertinggal dan terisolir ini tidak jauh berbeda dan relatif setara dengan masyarakat di PNG. Melalui bantuan sosial yang banyak dilakukan oleh para misionaris yang beroperasi dalam rangka pelayanan kerohanian menggunakan pesawat milik gereja, banyak masyarakat yang tertolong dan dibantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Fasilitas perhubungan milik misionaris ini bahkan dimanfaatkan oleh para pejabat daerah dalam melakukan kunjungan kerjanya di wilayah perbatasan.

3.1.3 Wilayah Perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT)

Wilayah perbatasan antarnegara dengan Timor Leste di NTT merupakan wilayah perbatasan antarnegara yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah salah satu Provinsi di Indonesia. Perbatasan antarnegara di NTT terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Belu, Kupang, dan Timor Leste Utara (TTU). Perbatasan antarnegara di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan bagian pulau Timor, sedangkan Kabupaten Kupang dan TTU berbatasan dengan salah satu wilayah Timor Leste, yaitu Oekusi, yang terpisah dan berada di tengah wilayah Indonesia (*enclave*). Garis batas antarnegara di NTT ini terletak di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Kupang, 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten TTU, dan 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belu.

Pintu perbatasan di NTT terdapat di beberapa kecamatan yang berada di tiga kabupaten tersebut, namun pintu perbatasan yang relatif lengkap dan sering digunakan sebagai akses lintas batas adalah di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Fasilitas perbatasan yang ada seperti CIQS, sudah cukup lengkap walaupun masih darurat, seperti kantor kantor bea cukai yang belum dilengkapi dengan alat detektor/*scan* bagi barang yang masuk dan keluar NTT, kantor imigrasi yang masih sangat sederhana, karantina hewan dan tumbuhan, serta pos keamanan yang juga masih sederhana.

Prasarana pasar di perbatasan yang terletak di dekat pintu perbatasan rusak berat akibat kerusakan oleh sekelompok orang dalam insiden yang terjadi pada tahun 2003, sehingga dipindahkan ke tempat lain dan saat ini masih dalam kondisi darurat, sedangkan sarana dan prasarana lain seperti sekolah dan pusat kesehatan masyarakat telah tersedia walau dalam kondisi yang belum baik. Fasilitas-fasilitas sosial yang telah ada dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kebutuhan para pengungsi.

Sarana dan prasarana perhubungan darat maupun laut ke pintu perbatasan Timor Leste cukup baik, sehingga akses kedua pihak untuk saling

berkunjung relatif mudah dan cepat. Kondisi jalan dari Atambua, ibukota Belu, menuju pintu perbatasan cukup baik kualitasnya, sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam waktu satu setengah jam. Hal ini dapat dimengerti karena kedua daerah NTT dan Timor Leste sebelumnya merupakan dua Provinsi yang bertetangga, sedangkan hubungan udara telah dipenuhi oleh maskapai penerbangan Merpati yang memiliki penerbangan regular dari Bali ke Dili.

Kegiatan perdagangan lintas batas yang terjadi sebagian besar adalah perdagangan kebutuhan alat-alat rumah tangga dan bahan makanan lainnya yang tersedia di kawasan perdagangan atau di Atambua, ibukota kabupaten Belu. Kegiatan lintas batas lainnya adalah kunjungan kekerabatan antar keluarga karena banyaknya masyarakat *eks* pengungsi Timor Leste yang masih tinggal di wilayah Atambua, sedangkan warga Indonesia lainnya yang berkunjung ke Timor Leste adalah dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan bahan makanan dan komoditi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste.

Kegiatan lintas batas yang sering terjadi adalah lintas batas tradisional melalui jalan masuk yang dahulu pernah digunakan sebagai jalan biasa sewaktu Timor Leste masih menjadi salah satu Provinsi Indonesia, seperti yang ada di perbatasan antara Kabupaten TTU (Provinsi NTT) dan Oekusi (Timor Leste). Untuk memfasilitasi warganya di Oekusi mengunjungi wilayah Timor Leste lainnya, Pemerintah Timor Leste mengusulkan adanya ijin bagi warga Oekusi untuk menggunakan prasarana jalan dari Oekusi ke wilayah utama Timor Leste. Namun usulan ini masih belum ditanggapi oleh pihak Republik Indonesia

Potensi sumberdaya alam yang tersedia di wilayah perbatasan NTT pada umumnya tidak terlalu besar, mengingat kondisi lahan di sepanjang perbatasan tergolong kurang baik bagi pengembangan pertanian, sedangkan hutan di sepanjang perbatasan bukan merupakan hutan produksi atau konversi serta hutan lindung atau taman nasional yang perlu dilindungi.

Kondisi masyarakat di sepanjang perbatasan umumnya miskin dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan tinggal di wilayah terisolir. Sumber mata

pencapaian utama masyarakat di wilayah perbatasan adalah kegiatan pertanian lahan kering yang sangat tergantung pada hujan. Kondisi masyarakat di wilayah Indonesia ini saat ini pada umumnya bahkan masih relatif lebih baik dari masyarakat Timor Leste yang tinggal di sekitar perbatasan. Dengan demikian, wilayah perbatasan di NTT khususnya di lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun daerah NTT secara keseluruhan perlu diperhatikan secara khusus karena dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara masyarakat NTT di perbatasan dengan masyarakat Timor Leste, khususnya penduduk Belu yang sebagian besar masih miskin.

Potensi Pengembangan Investasi di NTT

Kawasan perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di Kabupaten Kupang, Alor, Belu dan Timor Tengah Utara dengan Negara Timor Leste serta Rote Ndao yang berbatasan dengan Negara Australia serta terdapat 5 kabupaten prioritas di kawasan perbatasan, 5 pulau terluar dimana 2 diantaranya rawan dari sisi HANKAM (Pulau Batek dan Pulau Dana).

Potensi sumber daya alam yang tersedia dikawasan perbatasan NTT pada umumnya tidak terlalu besar, mengingat kondisi lahan di sepanjang perbatasan tergolong kurang baik bagi pengembangan pertanian. Sedangkan hutan di sepanjang perbatasan bukan merupakan hutan produksi atau konversi serta hutan lindung atau taman nasional yang perlu dilindungi.

Potensi unggulan sektoral di NTT yang berpeluang untuk dikembangkan dan mendapatkan investasi lebih difokuskan dan diarahkan pada sector:

1. Sektor pertanian tanaman pangan dengan konsentrasi untuk tanaman jagung untuk bahan baku tanaman ternak.
2. Sector kelautan dengan konsentersasi pada cabang usaha budidaya rumput laut.
3. Sector peternakan dengan konsentrasi pada cabang usaha
 - Pembesaran ternak ruminansia besar dan sedang seperti sapi, kerbau dan kuda

- Pemuliaan ternak seperti sapi unggulan lokal dan impor
- 4. Sektor industri dengan konsentrasi pada cabang usaha industri pembuatan pakan ternak.

3.2. Wilayah Perbatasan Laut Republik Indonesia

Wilayah perbatasan laut Indonesia meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas Landas Kontinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT), dan Batas Zona Perikanan Khusus (*Special Fisheries Zone/SFZ*). Ketiga garis batas laut pertama ditentukan lebarnya oleh keberadaan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan yang diperlukan untuk penentuan titik dasar/garis pangkal kepulauan. Oleh karena itu, keberadaan pulau-pulau terluar, yang jumlahnya paling sedikit 92 pulau yang tersebar di 17 Provinsi mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Papua, sangat strategis.

Pulau-pulau kecil terluar tersebut berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu dengan India (3 pulau), Malaysia (22 pulau), Singapura (5 pulau), Malaysia dan Vietnam (1 pulau), India dan Thailand (1 pulau), Filipina (11 pulau), Vietnam (2 pulau), Australia (24 pulau), Palau (8 pulau), dan Timor Leste (6 pulau), sementara 9 pulau lainnya berbatasan langsung dengan laut lepas.

Potensi pulau-pulau terluar di perbatasan laut cukup besar dan bernilai ekonomi dan lingkungan yang tinggi. Beberapa pulau di Kepulauan Riau misalnya, dapat dikembangkan sebagai kawasan konservasi penyu dan kawasan wisata bahari karena kondisi alamnya yang indah. Selain itu, cukup banyak pulau-pulau yang memiliki potensi perikanan sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun demikian, tidak seluruh pulau dapat dikembangkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan. Dari keseluruhan pulau-pulau terluar yang ada, hanya 33 pulau yang dihuni oleh manusia. Pulau-pulau yang tidak dapat dihuni pada umumnya berupa pulau berbatu atau pulau karang dengan luasan yang kecil sehingga sulit untuk didarati oleh kapal.

Secara umum, pulau-pulau kecil terluar menghadapi permasalahan yang hampir serupa satu sama lain. Sebagian besar pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau terpencil dengan aksesibilitas yang rendah serta tidak memiliki infrastruktur yang memadai.

Karena jauhnya keterjangkauan dari pulau utama, pulau-pulau kecil terluar ini berpotensi bagi sarang perompak dan berbagai kegiatan ilegal. Disamping itu, sebagai wilayah perbatasan, sebagian besar pulau kecil terluar belum memiliki garis batas laut yang jelas dengan negara lain serta rawan terhadap ancaman sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Diindikasikan pula, terjadi penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya alam akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali seperti penambangan pasir maupun degradasi lingkungan secara alamiah (abrasi) serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada.

Hal-hal tersebut dapat menyebabkan terancamnya keberadaan dan fungsi pulau-pulau kecil terluar. Tidak berkembangnya pulau-pulau terluar di perbatasan Indonesia, dapat menyebabkan lunturnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat setempat, terancamnya kedaulatan negara karena hilangnya garis batas negara akibat abrasi atau pengerukan pasir laut, terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal, pencurian ikan oleh nelayan asing, adanya imigran gelap dan pelarian dari negara tetangga, hingga ancaman okupasi oleh negara asing.

Dari keseluruhan pulau-pulau kecil terluar yang ada, terdapat 13 pulau terluar yang diprioritaskan penanganannya oleh pemerintah, karena memiliki arti strategis bagi pembangunan baik di bidang ekonomi, konservasi maupun pertahanan dan keamanan. Pulau-pulau tersebut tersebar di delapan provinsi, yaitu NAD, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Papua, NTT, dan Maluku Tenggara. Daftar pulau-pulau terluar yang diprioritaskan pengembangannya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pulau-Pulau Terluar Prioritas

No.	Nama Pulau	Kabupaten/Kota	Provinsi	Negara yang berbatasan
1	P. Rondo	Sabang	NAD	India
2	P. Berhala	Deli Serdang	Sumatera Utara	Malaysia
3	P. Nipah	Batam	Riau	Singapura
4	P. Sekatung	Natuna	Riau	Vietnam
5	Kepulauan Anambas	Natuna	Riau	Malaysia
6	P. Sebatik	Nunukan	Kalimantan Timur	Malaysia
7	P. Marore	Sangihe	Sulawesi Utara	Philipina
8	P. Miangas	Talaud	Sulawesi Utara	Philipina
9	P. Fani	Sorong	Papua	Palau
10	P. Fanildo	Biak	Papua	Palau
11	P. Asubutun	MTB	Maluku Tenggara	Australia
12	P. Batek	Kupang	NTT	Timor-Timur
13	P. Wetar	MTB	Maluku Tenggara	Timor-Timur

Sumber: Dephankam, 2003

Secara spesifik, setiap pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki permasalahan yang khas, bergantung kepada kondisi geografis dan keterkaitan dengan pulau utamanya, serta pengaruh dari negara tetangga yang berbatasan langsung dengannya. Pulau-pulau yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Filipina kondisi sosial ekonominya lebih baik karena pengaruh dari negara tetangga. Selain itu, terdapat pula pulau-pulau di wilayah perbatasan yang rendah ancaman ipolekesosbudnya, seperti pulau-pulau di perbatasan India, Vietnam, dan Palau. Namun demikian pengembangan pulau-pulau yang rendah potensi sengketa tersebut tetap signifikan untuk mengurangi berbagai kegiatan ilegal dan untuk mempertegas titik-titik yang menjadi acuan bagi penetapan batas-batas wilayah negara.

Dari 92 pulau-pulau terluar yang berada di wilayah perbatasan laut, hanya beberapa pulau saja yang memiliki fasilitas perbatasan CIQS. Beberapa pulau tersebut antara lain Pulau Miangas di Kabupaten Talaud dan Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berdekatan dengan wilayah Filipina Selatan.

Pos penjagaan perbatasan yang ada di pulau ini hanya berupa pos lintas batas beserta kantor imigrasi, sedangkan kantor bea dan cukai serta karantina belum dibangun. Kegiatan lintas batas yang dilakukan adalah kegiatan perdagangan antara masyarakat Filipina Selatan dan masyarakat kepulauan Sangihe Talaud dan kegiatan kunjungan kekeluargaan serta persinggahan nelayan-nelayan kedua negara. Barang-barang perdagangan yang masuk di Sangihe Talaud dan Manado dan sebaliknya yang menuju Filipina Selatan biasanya melewati kedua pulau ini yang dibawa dengan kapal laut. Penjagaan kedua pulau ini dilakukan oleh aparat kepolisian yang mengadakan patroli bersama-sama dengan TNI AL.

Kondisi masyarakat yang umumnya nelayan dan pedagang relatif miskin dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Kebutuhan pangan dan sandang kedua kepulauan ini banyak disediakan dari Manado dengan biaya transport yang tinggi. Uang yang beredar di pasaran setempat adalah campuran antara mata uang Filipina (peso) dan Indonesia (rupiah). Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kedua pulau ini cukup berbeda dengan kondisi masyarakat Filipina Selatan yang sedikit lebih baik dari pada penduduk kedua pulau ini. Ancaman yang dihadapi oleh kedua pulau perbatasan terpencil ini adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat akibat minimnya infrastruktur sosial ekonomi serta menurunnya rasa cinta tanah air dan bela negara karena kurangnya informasi dan komunikasi.

Sebagaimana halnya dengan Sulawesi Utara, wilayah perbatasan laut di Riau merupakan pulau-pulau kecil. Pintu masuk lintas batas antara Indonesia – Singapura dan Indonesia – Malaysia hanyalah di Pulau Batam, sedangkan pulau lainnya hanya memiliki patok batas antarnegara yang dijadikan sebagai titik

koordinat perbatasan. Ancaman yang dihadapi saat ini adalah keberadaan pulau-pulau tersebut berpotensi hilang karena penambangan pasir yang hampir menenggelamkan pulau-pulau tersebut. Apabila pulau-pulau kecil ini hilang maka permasalahan yang lebih besar akan muncul adalah terancamnya garis batas dan kaburnya titik koordinat ketiga negara (Indonesia, Singapura dan Malaysia). Permasalahan lain adalah dijadikannya pulau-pulau ini sebagai sarang perompak kapal, basis penyelundupan barang perdagangan ilegal, penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal di Malaysia dan Singapura.

3.3 Wilayah Perbatasan yang Terkait Dengan Lokus Koridor Ekonomi Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

3.3.1. Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Wilayah perbatasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki karakter yang relatif hampir sama dengan kawasan-kawasan perbatasan laut lainnya di Indonesia. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki satu pulau kecil terluar yang berbatasan dengan Negara Bagian Penang dan Johor di Malaysia. Wilayah perbatasan laut dengan Negara Malaysia secara geografis sangat penting dan strategis karena berada di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan dunia di sebelah utara (Asia & Eropa) dengan benua Australia di sebelah selatan, serta menjadi alur perniagaan internasional yang paling sibuk di kawasan Asia Tenggara.

3.3.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terletak dibagian ujung Utara Pulau Sumatera pada posisi 2 derajat - 6 derajat Lintang Utara dan 95 derajat – 98 derajat Bujur Timur. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki luas wilayah daratan 57.366 km² dan wilayah laut yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 534.520 km². Secara geografis Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki batasbatas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki letak yang sangat strategis baik dari sudut ekonomi, politik, maupun geografis. Posisi geografis wilayah yang terletak diantara Selat Malaka dan Samudera Hindia memiliki nilai yang sangat strategis dari sudut geografis, politik/pertahanan, dan ekonomis. Pembagian daerah administrasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah banyak mengalami perubahan terutama dalam dua tahun terakhir yang ditandai oleh munculnya kabupaten-kabupaten baru. Saat ini Provinsi NAD terdiri atas 20 Kabupaten/Kota, 142 Kecamatan, 58 Mukim dan 5.526 Gampong / Meunasah.

Topografi Wilayah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah dengan topografi berbukit dan bergunung. Daerah dengan topografi berbukit dan bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas wilayah. Sedangkan daerah datar dan landai hanya sekitar 32 persen dari luas wilayah. Daerah dengan topografi bergunung terdapat di bagian tengah Aceh yang merupakan gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai terdapat di bagian utara dan timur Aceh. Perincian kemiringan wilayah di Propinsi Daerah Istimewa adalah sebagai berikut :

- a. Daerah dengan lereng 0-2 persen merupakan 24,83 persen luas wilayah atau seluas 1.424.111 hektar.
- b. Daerah dengan lereng 2-15 persen merupakan 11,29 persen luas wilayah atau seluas 747.822 hektar.
- c. Daerah dengan lereng 15-40 persen merupakan 25,82 persen luas wilayah atau seluas 1.481.007 hektar.
- d. Daerah dengan lereng diatas 40 persen merupakan 38,06 persen luas wilayah atau seluas 2.183.617 hektar.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Persentase wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan ketinggiannya di atas permukaan laut adalah sebagai berikut:

- a. Daerah dengan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut merupakan 22,62 persen luas wilayah atau seluas 1.297.895 hektar.
- b. Daerah dengan ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut merupakan 54,22 persen luas wilayah atau seluas 3.110.498 hektar.
- c. Daerah dengan ketinggian diatas 1.000 meter di atas permukaan laut merupakan 23,16 persen luas wilayah atau seluas 1.297.895 hektar.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah beriklim Tropis. Hal ini berhubungan dengan posisinya yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Curah hujan di pesisir timur dan utara berkisar antara 1.000 mm-2.000 mm per tahun, sedangkan di bagian tengah, pesisir barat dan selatan curah hujannya lebih tinggi antara 2.000 mm - 3.000 mm per tahun. Suhu maksimum rata-rata antara 23 derajat – 35 derajat Celcius dengan kelembaban nisbi udara antara 65-75 persen.

Penggunaan Lahan

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki 119 pulau, 35 gunung dan 73 sungai penting dan daerahnya sebagian besar merupakan kawasan hutan. Luas areal hutan mencapai 4.477,9 km² atau sebesar 78,06 persen luas wilayah, tanah pertanian seluas 683,6 km² atau 11,92 persen luas wilayah dan perkebunan besar seluas 197,6 km² atau 3,44 persen luas wilayah.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang berbatasan dengan negara India. Beberapa pulau kecil yang terdapat di wilayah Provinsi NAD, Pulau Rondo adalah salah satu pulau yang prioritas untuk ditangani. Pulau Rondo terletak di ujung utara Sumatera dan masuk kedalam wilayah Kota Sabang dengan luas lebih kurang 0,4 mil persegi. Kondisi Pulau Rondo termasuk pulau kecil yang tidak berpenduduk dan terisolir.

Dilihat dari potensinya Pulau Rondo hanya sebuah pulau kecil dan tidak memiliki potensi sumberdaya alam yang baik, tetapi memiliki nilai strategis dilihat dari aspek geopolitik dan pertahanan keamanan. Pulau Rondo termasuk pulau-pulau terpencil dan jaraknya jauh dari pusat-pusat pertumbuhan baik di dalam maupun ke negara tetangga. Pulau ini memiliki banyak kendala untuk dikembangkan secara ekonomis (penghuninya sangat terbatas, bahkan relatif dapat dikatakan pulau kosong/tidak berpenghuni). Jika dilihat dari fungsi kawasan, Pulau Rondo dapat dikembangkan hanya untuk aspek lingkungan, pengawasan/patroli perbatasan atau riset kelautan dan wisata bahari.

3.3.1.2. Kondisi Perekonomian

Struktur perekonomian Aceh berdasarkan PDRB periode tahun 2006-2009 masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi berkisar antara 24-27 persen dengan kecenderungan terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi antara 11-14 persen dengan kecenderungan yang juga meningkat setiap tahunnya. Sementara itu sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar 11,59 persen. Sektor industri pengolahan yang terdiri dari sub sektor industri pengolahan minyak dan gas serta industri pengolahan bukan minyak dan gas memberikan kontribusi yang relatif stabil setiap tahunnya pada periode 2006-2009 yaitu berkisar antara 11-12 persen. Kontribusi ini lebih banyak diberikan oleh sub sektor industri pengolahan minyak dan gas, sedangkan kontribusi yang diberikan industri pengolahan bukan minyak dan gas hanya berkisar dua sampai tiga persen saja.

Sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Aceh. Pada tahun 2009 sektor konstruksi memberikan andil sebesar 9,67 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan andil 10,67 persen, serta sektor jasa-jasa memberikan andil 11,80 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh tahun 2009 yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar

3,92 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2008 yang tumbuh sebesar 1,88 persen. Pertumbuhan PDRB tersebut tanpa memasukkan unsur minyak dan gas. Sedangkan dengan perhitungan minyak dan gas pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh masih minus yaitu minus 5,58 persen.

Tanpa penghitungan dengan minyak dan gas, secara sektoral di tahun 2009 seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif dan pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh sektor listrik dan gas sebesar 27,07 persen; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 9,61 persen; industri pengolahan tanpa migas 5,03 persen; pengangkutan dan komunikasi 4,86 persen; jasa-jasa 4,68 persen; perdagangan, hotel, dan restoran 3,28 persen; konstruksi 3,16 persen; pertanian 3,09 persen; serta sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas 1,38 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan dengan memperhitungkan minyak dan gas pada tahun 2009 masing-masing masih mengalami kontraksi yaitu masing-masing minus 49,24 persen dan minus 6,06 persen.

Gambar 3.1 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam



Sumber: Profil dan Data Per Wilayah Kawasan Perbatasan Republik Indonesia

3.3.1.3. Kondisi Kependudukan, Sosial dan Budaya

Jumlah penduduk di Provinsi Aceh berdasarkan hasil proyeksi tahun 2009 sebanyak 4.363.477 jiwa, terdiri atas 2.171.388 jiwa laki-laki dan 2.192.089 jiwa perempuan. Distribusi penduduk di masing-masing kabupaten/kota tidak terlihat perubahan signifikan. 12,20 persen penduduk Provinsi Aceh berdomisili di Aceh Utara yaitu 532.537 jiwa, lalu 8,85 persen di Kabupaten Pidie atau 386.053 jiwa. Sedangkan kabupaten yang paling sedikit penduduknya terdapat di Kota Sabang yang merupakan daerah pulau, yaitu hanya dihuni oleh 0,67 persen dari total penduduk Provinsi Aceh atau sebanyak 29.184. Kota Sabang yang dahulu terkenal dengan pelabuhan bebasnya (tahun 1980-an), masih mempunyai penduduk paling sedikit dibandingkan dengan daerah lainnya. Status Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dengan pelabuhan bebasnya, ternyata belum mampu menarik penduduk pindah ke daerah kepulauan itu.

Kepadatan penduduk di Provinsi Aceh tahun 2009 mencapai 75 orang/km². Namun, penduduk yang menyebar di dua puluh tiga kabupaten/kota berbeda kepadatannya antar daerah. Daerah terpadat adalah Kota Banda Aceh yang rata-rata per kilometer wilayahnya dihuni oleh sekitar 3.459 jiwa. Lalu Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa masing-masing 879 jiwa/km² dan 535 jiwa/km². Sebaliknya, daerah yang paling jarang penduduknya yaitu hanya 13 jiwa/km² adalah Kabupaten Gayo Lues. Masalah kependudukan merupakan suatu masalah yang kompleks, karena akan berimbas pada masalah lainnya seperti sosial dan ekonomi. Untuk itu persebaran penduduk yang tidak merata hendaknya dipecahkan secara berhati-hati. Sebab bukannya tidak mungkin program pemerataan penduduk yang sedianya ditujukan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, menjadi berbalik menyengsarakan rakyat dan menimbulkan kerawanan sosial.

Dalam hal ketenagakerjaan, terdapat tiga masalah yang menjadi perhatian pemerintah adalah perluasan lapangan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja. Kondisi keamanan dan kenyamanan berusaha serta kemampuan daya beli

masyarakat yang tinggi akan memperluas usaha dan dengan sendirinya memperluas lapangan kerja sehingga pengangguran berkurang. Penduduk yang berpendidikan dan terampil akan meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta hubungan yang baik antara pengusaha dan tenaga kerja akan melindungi hak-hak tenaga kerja. Kondisi keamanan yang semakin baik di Provinsi Aceh, akan membantu meningkatkan pertumbuhan perluasan lapangan usaha. Sehingga dengan demikian pengusaha merasa aman untuk menanamkan modalnya. Hal ini mengakibatkan akan bertambahnya lapangan pekerjaan dan jenis lapangan pekerjaan yang bervariasi.

Penduduk tidak hanya terus menggantungkan nasibnya bekerja di sektor formal, tapi juga bisa memperoleh pekerjaan di sektor lainnya. Hendaknya pihak-pihak terkait dan yang peduli pada masalah ketenagakerjaan melakukan sosialisasi pada penduduk terutama yang akan masuk usia kerja tentang ketenagakerjaan. Tampaknya perlu sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat bahwa bekerja bukan hanya mencari pekerjaan dan menjadi karyawan atau buruh pada orang lain atau lembaga, tetapi juga berusaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

3.3.2. Propinsi Sulawesi Utara

Wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara memiliki karakter yang relatif hampir sama dengan kawasan-kawasan perbatasan laut lainnya di Indonesia. Provinsi Sulawesi Utara memiliki satu pulau kecil terluar yang berbatasan dengan Negara Filipina. Wilayah perbatasan laut dengan Negara Filipina secara geografis sangat penting dan strategis karena berada di Samudera Pasifik yang merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan Filipina dan Indonesia, serta juga menjadi salah satu alur perniagaan internasional di kawasan Asia Tenggara.

3.3.2.1. Kondisi Geografis dan Administratif

Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian ujung utara dari semenanjung Pulau Sulawesi yang terletak di antara 0°30'1"-5°35'1" Lintang Utara dan 123°70'1"-

127°00' Bujur Timur. Luas Wilayah Sulawesi Utara adalah: 15.241.46 km², yang terbagi ke dalam 9 daerah Kabupaten/Kota definitif. Kabupaten Bolang Mongondow dengan luas 8.358,04 km² merupakan kabupaten terluas di Provinsi ini, kemudian di ikuti berturut-turut oleh Kabupaten Minahasa Selatan seluas 2.079,10 km², Kabupaten Talaud 1.250,92 km², Kabupaten Sangihe 1.013,03 km², Kabupaten Minahasa 973,81 km², Kabupaten Minahasa Utara 957,65 km², Kota Bitung 304,40 km², Kota Manado 157,91 km², dan Kota Tomohon 146,60 km² yang merupakan daerah terkecil luasnya di Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari beberapa pulau, diantaranya Pulau Manado Tua, Pulau Bunaken, Pulau Mantehage, Pulau Siladen, Pulau Talise, Pulau Bangka, Pulau Karakelang, Pulau Ruang, Pulau Lembeh, Pulau Siau, Pulau Tagulandang, Pulau Karakelang, Pulau Kabaruang, Pulau Biaro, Pulau Sangihe, dan Pulau Salibabu.

Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 0°15'-5°34' lintang utara dan antara 123°07'-127°10' Bujur Timur, yang berbatasan dengan laut Sulawesi, Republik Philipina dan laut Pasifik sebelah utara serta laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Gorontalo.

Topografi Wilayah

Provinsi Sulawesi Utara terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 - 1995 m. Kondisi geologi sebagian besar adalah wilayah vulkanik mudah, sejumlah besar erupsi serta bentuk kerucut gunung merapi aktif yang padam menghiasi Minahasa bagian tengah, daerah Bolaang Mongondow dan kepulauan Sangihe. Material-material yang dihasil letusannya berbentuk padat serta lain-lain bahan vulkanik lepas. Semua vulkanik ini berbentuk pegunungan (otogenisa) menghasilkan morfologi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan perbedaan relief topografik yang cukup besar. Provinsi Sulawesi Utara ada 5 wilayah yang di kelilingi oleh gunung api aktif yakni Kabupaten Bolang Mongondow yakni gunung Ambang dengan ketinggian 1.689 m, Kabupaten Minahasa Selatan dengan gunung Soputan dengan ketinggian

1.783 m, Kota Tomohon dengan gunung Lokon dengan ketinggian 1.579,6 m dan gunung Mahawu dengan ketinggian 1.331,0 m yang merupakan hulu dari 12 sungai besar dengan 7 danau. Kepulauan Sangihe yakni Karangetan dengan ketinggian 1.320,0 m, Ruang dengan ketinggian 714,0 m, Banuawuhu 0,0 m, Submarin 0,0 m, dan gunung Awu dengan ketinggian 1.78,0 m. Serta Kota Bitung dengan gunung Tangkoko dengan ketinggian 1.149 m.

Penggunaan Lahan

Luas daratan Provinsi Sulawesi Utara menurut penggunaannya adalah 1.526.641 ha yang terdiri atas lahan irigasi teknis 19.017 ha, setengah teknis 16.074 ha, irigasi sederhana 5.970 ha, irigasi desa 8.622 ha, tadah hujan 13.374 ha, pasang surut 180 ha, lebak/polder 591 ha, pekarangan 42.510 ha, tegal/kebun 250.625 ha, ladang/huma 98.150 ha, pengembalaan/padang rumput 33.655 ha, rawa-rawa 5.032 ha, tambak 5.767 ha, kolam/empang 3.473 ha, lahan sementara tidak diusahakan 42.661 ha, hutan rakyat 127.757 ha, hutan negara 322.313 ha, perkebunan 256.308 ha dan lainnya 275.099 ha.

3.3.2.2. Kondisi Perekonomian

Struktur ekonomi provinsi Sulawesi Utara didominasi oleh sektor pertanian. Perdagangan, hotel dan restoran serta jasa. Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2010 tumbuh 7,12 persen, melambat dibandingkan tahun 2009 yang tumbuh sebesar 7,85 persen. Di tahun 2010, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pertanian yang mencapai 11,60 persen, sementara pertumbuhan terendah terjadi di sektor bangunan yang hanya tumbuh sebesar 2,11 persen. Tiga sektor ekonomi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2010 adalah sektor pertanian dengan sumbangan sebesar 2,24 persen, sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 1,41 persen, dan sektor pengangkutan & komunikasi sebesar 1,04 persen. Nilai PDRB Sulut tahun 2010 atas dasar harga berlaku tercatat senilai Rp 36,83 triliun dan secara riil (atas harga konstan 2000) senilai Rp 18,37 triliun. Tiga kontributor utama dalam

pembentukan PDRB tahun 2010 adalah sektor pertanian 19,50 persen, sektor perdagangan, hotel, & restoran 16,96 persen, dan sektor jasa-jasa 15,55 persen.

Ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2010 tumbuh 7,12 persen, melambat dibandingkan tahun 2009 yang tumbuh sebesar 7,85 persen. Nilai PDRB Sulut tahun 2010 secara riil (atas dasar harga konstan 2000) tercatat senilai Rp 18,37 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai Rp 17,15 triliun. Atas dasar harga berlaku, nilai PDRB tahun 2010 tercatat senilai Rp 36,83 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2009 yang senilai Rp 33,03 triliun. Selama tahun 2010, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pertanian yaitu sebesar 11,60 persen yang sangat ditunjang oleh pertumbuhan sub sektor perkebunan terutama komoditi cengkeh yang mengalami panen raya pada tahun ini. Selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan, hotel & restoran yang tumbuh sebesar 8,77 persen, sektor pengangkutan & komunikasi 8,03 persen, sektor keuangan persewaan & jasa perusahaan 6,85 persen, sektor industri pengolahan 6,48 persen, sektor jasa-jasa 6,17 persen, sektor listrik, gas & air bersih 5,02 persen, sektor pertambangan & penggalian 3,15 persen, serta sektor bangunan yang hanya tumbuh 2,11persen.

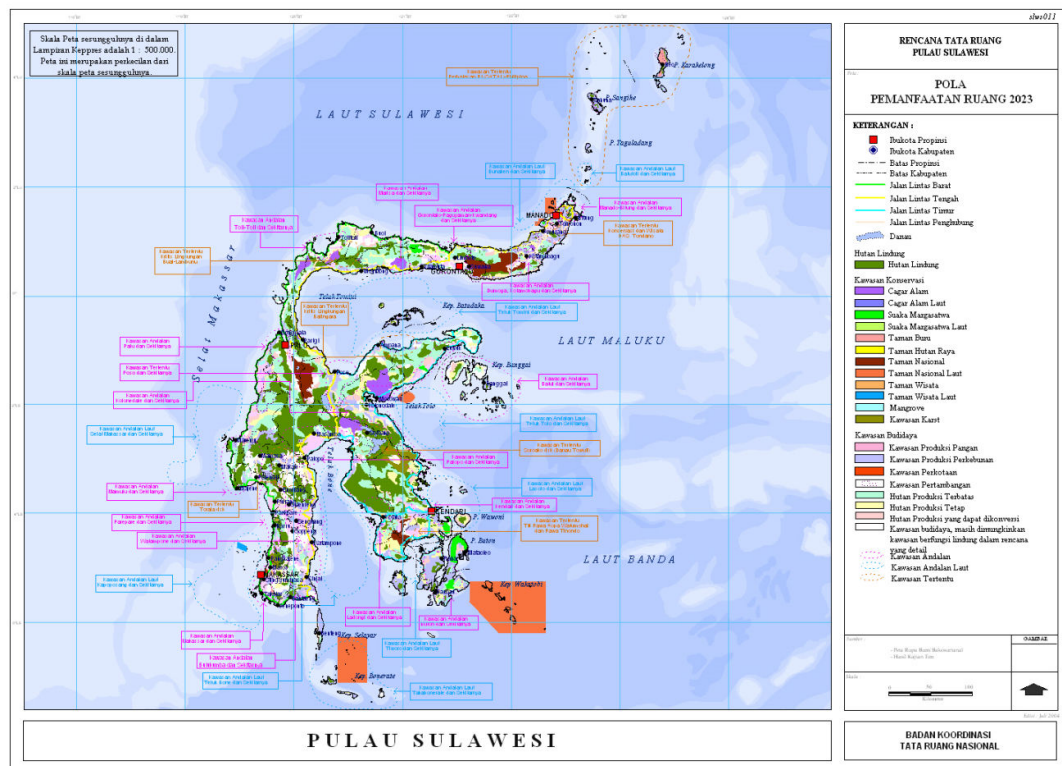
Sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2010 merupakan sumber pertumbuhan terbesar pula terhadap total pertumbuhan PDRB Sulawesi Utara dengan share sebesar 2,34 persen. Selanjutnya sumber pertumbuhan yang cukup besar juga berasal dari sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor pengangkutan & komunikasi yang masing-masing memberikan peranan sebesar 1,41 persen dan 1,04 persen .

Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2010), Pulau Sulawesi memiliki peran strategis dalam perekonomian. Peran strategis Pulau Sulawesi yang pertama adalah sebagai pintu gerbang keluar dan masuk Indonesia melalui Asia Timur dan Pasifik.Selain itu, Pulau Sulawesi juga menjadi *prime mover* untuk percepatan pengembangan Kawasan Timur Indonesia – mengatasi kesenjangan

antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia – serta perekat perekonomian nasional.

Untuk Wilayah Sulawesi Utara, Malangane dan Tahuna adalah kota pusat kegiatan strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan laut antara RI dengan Filipina diharapkan dapat berperan sebagai outlet aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya termasuk pulau kecil terluar, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya maritime dalam rangka mendukung koridor ekonomi. Dari Tabel 3.1, terlihat bahwa PDRB provinis sulut pada tahun 2009, paling banyak disumbangkan oleh Kotamadya Bitung dan Manado yang mencapai 334.08 miliar dan 246 miliar rupiah.

Gambar 3.2. Pola Pemanfaatan Ruang Pulau Sulawesi



Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

<http://www.penataanruang.net/rtrpulau.asp>

Tabel 3.2. Proyeksi Pertumbuhan PDRB Industri Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara 2009-2020

No	Kabupaten	2009		2014		2020		2014	2020	Kompetensi Inti Industri
		Nilai (Miliar)	Porsi*	Nilai (Miliar)	Porsi*	Nilai (Miliar)	Porsi*	Pertumbuhan		
1	Bolaang	58.56	0.0047%	176.22	0.01%	606.86	0.02%	22.15%	21.21%	
2	Mongondow	114.37	0.0091%	344.14	0.02%	1185.11	0.03%			
3	Sangihe Talaud	35.32	0.0028%	106.29	0.01%	366.04	0.01%			
4	Kep. Talaud	5.03	0.0004%	15.14	0.00%	52.14	0.00%			Industri Pengolahan Ikan
5	Minahasa Selatan	134.28	0.0107%	404.04	0.02%	1391.38	0.04%			
6	Minahasa Utara	60.84	0.0048%	183.07	0.01%	630.44	0.02%			VCO
7	Manado	246.06	0.0196%	740.37	0.04%	2549.59	0.07%			
8	Bitung	334.08	0.0266%	1005.2	0.05%	3461.56	0.10%			Kelapa
9	Tomohon	36.31	0.0029%	109.25	0.01%	376.23	0.01%			Industri Buah, Sayur dan Bunga

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2011

Catatan: * merupakan porsi terhadap PDB nasional

Tabel 3.3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Sulawesi Utara

Daerah Pusat Kegiatan	Tahap	Tahun	Kriteria Pengembangan	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
Malanguane	1	2008-2009, 2010-2014	Pengembangan baru kota-kota utama kawasan Perbatasan.	Administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transshipment point.	Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai tujuan pemasaran untuk wilayah Pulau Karakelong Meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi di Kepulauan Sangihe-Talaud Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, air limbah dan drainase)\ Meningkatkan ketersediaan fasilitas jasa, perdagangan, serta fasilitas pendukung sebagai pendukung gerbang lintas negara. Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga, khususnya pada bidang kelautan dan pertahanan keamanan.

Kajian Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan

Tahuna	1	2008-2009,2010-2014	Pengembangan baru kota-kota utama kawasan Perbatasan	Administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transshipment point.	Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai tujuan pemasaran untuk wilayah Kepulauan Sangihe-Talaud. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, air limbah, dan drainase), fasilitas perdagangan, serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas Negara Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga, khususnya pada bidang kelautan dan pertahanan keamanan Meningkatkan ketersediaan fasilitas jasa, perdagangan, serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota Tahuna
--------	---	---------------------	--	---	--

Sumber: Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi. Desember 2005. Departemen Pekerjaan Umum

3.3.2.3. Kondisi Kependudukan, Sosial dan Budaya

Jumlah penduduk di Pulau Sulawesi terus meningkat dari waktu ke waktu. Populasi penduduk di Pulau Sulawesi meningkat dari sekitar 8.5 juta (tahun 1971) menjadi sekitar 16 juta jiwa (tahun 2006). Pada tahun 2006, persentase jumlah penduduk di Pulau Sulawesi sekitar 7% dari total penduduk nasional. Ditinjau dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Pulau Sulawesi masih tergolong rendah. Pada tahun 2007, tercatat kepadatan penduduk di Pulau Sulawesi hanya mencapai 87 jiwa/km², dimana Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk terbesar (masing-masing 163 dan 159 jiwa/km²). Jika ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk Sulawesi dalam tiga periode secara umum berfluktuasi. Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, mengalami laju pertumbuhan yang meningkat pada periode 2000-2005 lalu menurun pada periode 2006-2007.

Tingkat kemiskinan di wilayah Sulawesi masih relatif tinggi. Penduduk miskin di Sulawesi terkonsentrasi di wilayah-wilayah pedesaan (sekitar 70%) dan sisanya di wilayah perkotaan. Gambaran kemiskinan antar Provinsi di Sulawesi tahun 2008 menunjukkan persentase penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Gorontalo, yaitu sebesar 41.59%, diikuti Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 34.69%. Persentase jumlah penduduk miskin terkecil berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 22.84%. Persentase jumlah penduduk miskin terbesar di daerah perkotaan di Sulawesi tahun 2008 terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 14.14% dan untuk daerah pedesaan terbesar terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 31.72%. Sementara itu, untuk persentase jumlah penduduk miskin terkecil di daerah perkotaan terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 5.29% dan untuk pedesaan terdapat di Provinsi Sulawesi Utara.

Penduduk Sulawesi Utara terdiri atas tiga kelompok etnis utama, masing-masing Suku Minahasa (33,2%), Suku Sangihe dan Talaud (19,8%), dan Suku Bolaang Mongondow (11,3%), Suku Gorontalo (7,4%) lalu Suku Totemboan

(6,8%). Masing-masing kelompok etnis terbagi pula subetnis yang memiliki bahasa, tradisi dan norma-norma kemasyarakatan yang khas. Inilah yang membuat bahasa di provinsi itu terbagi dalam Bahasa Minahasa (Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Ponosakan dan Batik); Bahasa Sangihe Talaud (Sangie Besar, Siau, Talaud); dan Bahasa Bolaang Mongondow (Mongondow, Bolaang, Bintauna, Kaidipang). Namun demikian, Bahasa Indonesia digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk di sana.

BAB IV

POTENSI PENGEMBANGAN INVESTASI WILAYAH PERBATASAN

(Studi Kasus: Kota Sabang dan Kabupaten Kep. Talaud)

4.1. Potensi Pengembangan Investasi di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Kasus: Kota Sabang)

Kawasan Sabang meliputi wilayah Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam), terdiri dari wilayah Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), serta sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil di sekitarnya) dengan luas wilayah $\pm 394 \text{ km}^2$.

Kawasan Sabang dibatasi dengan titik-titik koordinat $05^{\circ}46'28''$ - $05^{\circ}54'28''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}13'02''$, $95^{\circ}22'36''$ Bujur Timur. Letak ini memberikan keuntungan geografis karena terletak pada persimpangan perdagangan dunia. Letak ini sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas pelayaran (International Shipping Line) dan penerbangan internasional menjadikan posisinya begitu sentral sebagai pintu gerbang arus masuk investasi, barang dan jasa dari dalam dan luar negeri. Didukung juga dengan adanya Terusan Kra (Canal Kra) di Thailand yang sedang diupayakan pembangunannya, dapat memposisikan Sabang sebagai *Buffer Zone* bagi kapal-kapal container atau kapal-kapal kargo lainnya yang melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia.

Sabang juga merupakan jalur lalu lintas yang menghubungkan perdagangan antara timur dan barat. Selain itu jalur lalu lintas perdagangan tersebut dapat menghemat biaya sebesar 20 persen bila dialihkan melewati Sabang. Di masa datang, Kawasan Sabang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan kepelabuhanan internasional (*international hub-port*) di Samudera Hindia. Sabang memiliki potensi dan peluang sebagai alternatif dari

rute perjalanan utama dunia bagi kapal yang menghubungkan antara belahan dunia barat dan belahan dunia timur. Dengan adanya jalur lalu lintas tersebut dapat menghemat biaya, juga dapat menghemat waktu

Berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan kawasan pelabuhan bebas. Kawasan ini juga terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2/2000 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 37/2000 untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun.

Penetapan Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan Provinsi NAD sehingga mampu menjadi pendorong dan model bagi pembangunan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Khusus bagi Kawasan Sabang, hal tersebut dalam rangka lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kawasan ini berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: (1) kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu, (2) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara,

bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.

Selanjutnya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XXII Bagian Ketujuh yang terdiri atas 4 pasal, telah mengukuhkan kapasitas Sabang sebagai suatu kawasan yang bebas dari tata niaga, pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Penetapan ini juga memberikan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan serta kewenangan lain yang diperlukan kepada DKS (Dewan Kawasan Sabang). Sebagai konsekuensinya, maka Pemerintah bersama Pemerintah Aceh telah mengamanatkan agar Kawasan Sabang dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan penekanan bagi pembangunan pelabuhan utama (hub-port) yang fungsinya sebagai pelabuhan impor ekspor (internasional) dan juga sebagai pelabuhan alih kapal (*transshipment*) nasional.

Bisnis Plan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang I - 2 Dengan adanya kedua UU yang telah mengamanatkan untuk pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang kepada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) melalui DKS; maka BPKS, sebagai sebuah “organisasi usaha” perlu menjalankan prinsip prinsip good corporate governance, serta harus mempunyai sebuah bisnis plan yang memuat visi, misi, strategi, sektor prioritas dan unggulan serta analisis kelayakan investasi dan penerimaan bagi BPKS, yang mampu menjadi “indikator kinerja” bagi seluruh pimpinan dan lapisan karyawan, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 37/2000 dan No. 11/2006 tersebut di atas. Sehubungan dengan adanya fungsi-fungsi pengembangan ini mensyaratkan Kawasan Sabang untuk dikembangkan secara terencana, terukur, dan komersil agar dapat menarik investor. Persyaratan pengembangan ini telah diantisipasi dengan upaya penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2007 – 2021. Berdasarkan Master Plan ini akan dijabarkan dalam bentuk rencana-rencana pengembangan kawasan, sektoral dan kelembagaan. Salah

satu penjabaran utama dari Master Plan ini adalah Bisnis Plan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Sabang Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sejak Tahun 1963, Sabang telah ditetapkan sebagai pelabuhan bebas dengan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963. Kemudian Pada Tahun 1970, Diterbitkan Undang-undang no. 3 tahun 1970 tentang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta UU no. 4 tahun 1970 tentang penetapan Sabang sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Status Sabang sebagai daerah sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ditutup oleh pemerintah RI melalui UU. No. 10 tahun 1985.

Posisi Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mulai diperhitungkan kembali tahun 1993, ditandai dengan dibentuknya Kerjasama Ekonomi Regional Growth Triangle Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT), dilanjutkan dengan kegiatan Jambore Iptek BPPT tahun 1997, dan pada tahun 1998 kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diresmikan oleh Presiden BJ. Habibie bersama KAPET lainnya dengan Keppres No. 171 tanggal 26 September 1998.

Status Sabang kembali ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di masa pemerintahan presiden K.H. Abdurrahman Wahid melalui mandat hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2000. Kemudian dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 20 Nopember 2000 penetapan statusnya secara hukum diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Keputusan ini dilakukan pemerintah pusat agar Kawasan Sabang di ujung barat dapat dijadikan sebagai Pusat Pertumbuhan Baru (New Growth Centre).

Pada Tahun 2006, Diterbitkan SK Gubernur Provinsi NAD yang membentuk Tim Advisor dan Tim Advokasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Pada tahun ini pula, naskah

akademis Master Plan dan Bisnis Plan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang telah selesai disusun. Selain itu, Diterbitkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tanggal 11 Juli 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan kepada BPKS melalui DKS untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Hub di Sabang.

Secara keseluruhan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dijamin dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4054);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang No.193/034 Januari 2001 tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
4. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang No.193/326/04 Tanggal 8 Juli 2004 Tentang Pengangkatan Sekretaris, Deputi BPKS;
5. Keputusan Presiden No. 191/M Tahun 2005 Tanggal 22 Desember 2005 Tentang Pengangkatan Dr.Ir. Mustafa Abubakar, M.Si, sebagai pejabat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ex Officio menjadi Ketua Dewan Kawasan Sabang.
6. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang No:193/338 A/05 Tanggal 24 Oktober 2005 Tentang Pengangkatan Kepala BPKS;

7. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang No:193/119/2006 Tanggal 7 Pebruari 2006 Tentang Pengangkatan Wakil Kepala dan Deputi BPKS;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang No:193/057/2006 Tanggal 19 April 2006 Tentang Pengangkatan Deputi Hubungan Antar Lembaga Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
9. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, No. 25 Tahun 2006 Tanggal 20 Juni 2006 Tentang Struktur Organisasi dan Job Discription BPKS.

Penetapan Sabang sebagai daerah bebas perdagangan dan pelabuhan bebas tak berjalan seperti yang diharapkan. Penyebabnya adalah karena kebijakan itu kurang didukung persiapan dan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain pelabuhan, jaringan jalan, listrik, air, dan fasilitas pendukung lain.

Fasilitas dan Kemudahan Investasi Kawasan Sabang

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 pasal 8 menjelaskan: Untuk memperlancar kegiatan Kawasan Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang diberi wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi paar pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas dan Kemudahan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 :

1. Kawasan Sabang sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang ekonomi seperti sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya.
2. Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditetapkan untuk jangka waktu 70 Tahun.

3. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang diberi wewenang untuk mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usahanya di Kawasan Sabang.
4. Kawasan Sabang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai
5. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dapat mengatur tata tertib pelayaran, penerbangan, lalu lintas barang, fasilitas pelabuhan serta penetapan tarif untuk segala macam jasa.
6. Kawasan Sabang dapat menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Kawasan Sabang juga menyediakan kemudahan lainnya bagi investor dengan memberikan kewenangan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dalam mekanisme perizinan Satu Atap berdasarkan UU 37/2000, secara umum :

1. Memberikan izin usaha industri dan izin usaha lainnya bagi pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya di Kawasan Sabang setelah adanya pelimpahan wewenang.
2. Memberikan penilaian permohonan investasi dalam rangka PMA / PMDN.
3. Menolak / memberikan persetujuan investasi dalam rangka PMA / PMDN.
4. Menyampaikan permohonan dan persyaratan kepada instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan.
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal / upaya mencari informasi mengenai status perizinan yang sedang diproses oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin.

Melalui **PP Nomor 83 Tahun 2010**, berbagai perizinan untuk melakukan investasi dan bisnis di Kawasan Sabang telah dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Dewan Kawasan Sabang.

4.1.1. Sektor Unggulan Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Kasus: Kota Sabang)

Berdasarkan data Produk Domestik Bruto Kota Sabang tahun 2008 dan 2009 (Tabel 4.1), sektor yang dijadikan sebagai lokomotif perekonomian bagi Kota Sabang adalah sektor jasa, perdagangan dan konstruksi bangunan. Sektor jasa memberikan sumbangan paling besar yakni sebesar 40.87 persen dari total PDRB Sabang, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restaurant sebesar 16.75 persen dan sector konstruksi sebesar 16.44 persen pada tahun 2009. Selain itu sektor pertanian juga memberikan kontribusi cukup besar bagi Sabang dengan porsinya sebesar 12.68 persen tahun 2009. Di lain hal, sektor listrik dan air bersih serta sector keuangan kurang berkembang di kawasan ini. Terlihat dari sumbangannya yang relatif kecil terhadap PDRB Kota Sabang.

Peranan sektor jasa dan perdagangan yang besar ini dikarenakan Sabang memiliki keunggulan dalam hal letak geografis. Sabang merupakan pintu bagi keluar masuknya kegiatan perdagangan kawasan ASEAN. Letak ini sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas pelayaran (*International Shipping Line*) dan penerbangan internasional menjadikan posisinya begitu sentral sebagai pintu gerbang arus masuk investasi, barang dan jasa dari dalam dan luar negeri.

Kawasan Sabang juga memiliki keunggulan karena mempunyai pelabuhan bebas walaupun dalam pelaksanaannya adanya pelabuhan tersebut kurang efektif. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan kawasan pelabuhan bebas. Kawasan ini juga terpisah dari daerah pabeian sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Indahnya panorama alam di Sabang juga menjadi keunggulan tersendiri untuk menjadikan Sabang sebagai salah satu pusat wisata di Kawasan Barat Indonesia.

Tabel 4.1. Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap Produk Domestik Bruto Kota Sabang

No	Lapangan Usaha	Nilai		Kontribusi (%)	
		2008	2009	2008	2009
I	PERTANIAN	28,692.39	29,212.86	13.06	12.68
	a. Tabama	7,556.48	7,655.35	3.44	3.32
	b. Perkebunan	4,597.71	4,621.93	2.09	2.01
	c. Peternakan	10,235.93	10,470.25	4.66	4.54
	d. Kehutanan	400.93	408.23	0.18	0.18
	e. Perikanan	5,901.33	408.23	2.69	0.18
II	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	2,246.07	2,345.54	1.02	1.02
	Penggalian	2,246.07	2,345.54	1.02	1.02
III	INDUSTRI PENGOLAHAN	11,074.39	11,306.43	5.04	4.91
IV	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	1,421.98	1,495.22	0.65	0.65
	a. Listrik	941.41	997.96	0.43	0.43
	c. Air Bersih	480.57	497.26	0.22	0.22
V	BANGUNAN	34,103.26	37,876.14	15.52	16.44
VI	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	36,489.03	38,595.63	16.60	16.75
	a. Perdagangan besar dan eceran	31,535.31	33,370.56	14.35	14.48
	b. Hotel	833.34	874.08	0.38	0.38
	c. restoran	4,120.39	4,350.99	1.87	1.89
VII	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	9,734.19	10,101.51	4.43	4.38
	a. Pengangkutan	6,076.24	6,296.73	2.76	2.73
	b. Komunikasi	3,657.96	3,804.78	1.66	1.65
VIII	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA	5,091.93	5,304.58	2.32	2.30
	a. Bank	681.74	740.31	0.31	0.32
	b. Lembaga Keuangan	491.29	515.85	0.22	0.22
	c. Sewa Bangunan	3,567.65	3,684.68	1.62	1.60
	e. Jasa Perusahaan	351.25	363.74	0.16	0.16
IX	JASA-JASA	90,923.48	94,178.64	41.37	40.87
	a. Pemerintahan Umum	86,699.46	89,699.46	39.45	38.93
	b. Swasta	4,224.02	4,479.18	1.92	1.94
	TOTAL PDB	219,776.73	230,416.55	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2011

4.1.2. Komoditas Unggulan Nanggro Aceh Darussalam (Studi Kasus: Kota Sabang)

Kota Sabang lebih banyak memanfaatkan produk jasa daripada barang (komoditas) sebagai penopang ekonominya. Namun demikian, bukan berarti Sabang tidak memiliki potensi dan keunggulan dalam menghasilkan komoditas. Jenis barang atau komoditas yang banyak dihasilkan di Sabang salah satunya merupakan komoditas pertanian khususnya seperti yang ditampilkan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Komoditas Pertanian yang dihasilkan di Sabang

Perkebunan	
1. Cengkeh	- Tahun 2006 : 16 Ton
	- Tahun 2007 : -
	- Tahun 2008 : 16 Ton
	- Tahun 2009 : 16 Ton
2. Kakao	- Tahun 2006 : 181 Ton
	- Tahun 2007 : -
	- Tahun 2008 : 172 Ton
	- Tahun 2009 : 182 Ton
3. Kelapa	- Tahun 2006 : -
	- Tahun 2007 : -
	- Tahun 2008 : 561 Ton
	- Tahun 2009 : -
4. Nilam	- Tahun 2005 : 8 Ton
	- Tahun 2006 : -
	- Tahun 2007 : -
	- Tahun 2008 : -
	- Tahun 2009 : -
Pertanian	
5. Jagung	- Tahun 2006 : -
	- Tahun 2007 : 20 Ton
	- Tahun 2008 : -
	- Tahun 2009 : -
6. Ubi Kayu	- Tahun 2006 : -
	- Tahun 2007 : 223 Ton
	- Tahun 2008 : -
	- Tahun 2009 : -

Sumber: kementerian Pertanian, 2011

Selain itu, sektor pariwisata di Sabang juga sangat menarik sehingga pariwisata menjadi salah satu keunggulan di Sabang. Salah satu andalan wisata daerah ini adalah Pantai Paradiso, dengan pasir pantainya yang putih serta suasananya yang teduh karena banyak tumbuh pohon kelapa yang menaungi pantai dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

4.1.3. Peluang Pengembangan Investasi di Kota Sabang

Potensi Sektor Perikanan

Walaupun saat ini subsektor perikanan penggunaannya belum optimal bagi perekonomian Sabang, namun subsektor ini berpeluang untuk dikembangkan karena sebenarnya Sabang memiliki potensi yang didukung sumber daya alam. Disamping potensi perairan teritorial (4-12 mil), Kawasan Sabang juga memiliki perairan ZEE 200 mil dan laut lepas (>ZEE 200 mil) yang produktif, mengandung potensi ikan pelagis dan demersal. Hal yang sangat menunjang adalah adanya lokasi up welling. Front massa air terjadi akibat pertemuan 3 arus yang berasal dari perairan Samudera Indonesia, Selat Malaka dan Teluk Benggala. Oleh sebab itu Kawasan Sabang memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai home base untuk kegiatan penangkapan ikan di ZEE dan laut lepas.

Apabila Sabang dijadikan sebagai *home base* dalam upaya memanfaatkan perairan ZEE 200 mil dan internasional di Samudera Indonesia maka kapal-kapal ikan asing seperti dari Phuket dan Penang, akan mengalami penghematan terhadap waktu dan biaya.

Peluang Investasi Sektor Perikanan :

1. Pusat bisnis pembuatan/perbaikan kapal dan penangkapan ikan
2. Pusat bisnis penangkapan ikan
3. Export processing zone (EPZ)
4. Export ikan (cargo laut dan udara)
5. Budidaya perikanan laut
6. Pusat Perikanan Internasional

7. Pembangunan tempat pelelangan ikan
8. Pembangunan pelabuhan perikanan
9. Pembangunan industri pengawetan ikan
10. Pengolahan tepung ikan
11. Pembangunan ruang pendingin (*cold storage*)

Potensi Sektor Perdagangan dan Industri

Sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas investasi dalam sektor perdagangan dan industri sangat potensial dilakukan di Kawasan Sabang. Dengan kemudahan bebas bea masuk dan tata niaga, serta bebas PPn dan Pajak Barang Mewah maka mesin dan bahan baku dapat dimasukan ke Kawasan Sabang dengan harga lebih murah dibandingkan kawasan lainnya di Indonesia. Keunggulan ini akan meningkatkan daya saing dari produk yang diproduksi di Kawasan Sabang.

Selain itu bahan-bahan material dari kawasan daratan yang selama ini diproses di luar Aceh atau luar negeri akan lebih kompetitif jika diproses atau di ekspor di atau melalui Kawasan Sabang. Hasil alam dari kawasan darat Aceh seperti nilam, pinang, karet, sawit, kopra, coklat, kopi juga hasil-hasil pertambangan dan hutan lainnya

Peluang Investasi Sektor Perdagangan dan Industri :

1. Pengembangan kawasan perdagangan menjadi kegiatan bisnis
2. Pengembangan prasarana dan sarana perdagangan
3. Pengembangan kawasan industri Balohan
4. Pengembangan industri pengolahan hasil hutan
5. Pengembangan industri perkapalan/galangan
6. Industri rekondisi otomotif
7. Bunker CPO
8. Refinery
9. Pengembangan industri kerajinan rakyat
10. Intalasi listrik dan air

Sabang Sebagai Daerah Potensial Pengembangan Pariwisata

Sabang memiliki banyak daerah tujuan wisata terutama wisata alam. Dalam Master Plan Kawasan Sabang 2007 – 2021 telah ditetapkan daerah wisata yang akan dijadikan prioritas dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Sabang dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang adalah daerah wisata bahari di Iboih dan Gapang. Selanjutnya dikembangkan Kawasan Internasional Resort di Gua Sarang Kampung Paya, Revitalisasi Kota Lama Sabang dan pembangunan wisata bahari di Pantai Nipah (P. Nasi). Kawasan wisata Iboih dan Gapang merupakan daerah tujuan wisata bahari yang menyajikan pemandangan alam bawah laut yang sangat indah. Pemandangan ini dapat dinikmati dengan menyelam ataupun dengan menaiki perahu dengan dasar kaca yang telah tersedia disana. Eksplorasi keindahan alam bawah laut di Iboih dan Gapang dapat dilanjutkan hingga ke P. Rubiah. Selain pemandangan alam bawah laut, potensi wisata yang dapat dikelola dari Iboih dan Gapang adalah wisata memancing (game fishing). Potensi pariwisata ini merupakan peluang untuk menarik kunjungan wisatawan dunia dengan semua fasilitas berskala internasional.

Berikut ini potensi obyek wisata alam (*nature tourist attraction*) di Kawasan Sabang:

1. Taman Laut Pulau Rubiah
2. Pantai Iboih
3. Pantai Gapang
4. Pantai Paradiso
5. Pantai Tapak Gajah
6. Pantai Nipah, Pulo Aceh
7. Atraksi Alam Lumba-lumba
8. Atraksi Alam Ikan Pari
9. Pantai Pasir Putih Lhung Angen
10. Danau Aneuk Laot
11. Air Terjun Pria Laot

12. Air Panas Gunung Merapi Jaboi

13. Air Panas Keuneukai

14. Tugu KM “0”

Kawasan Sabang juga terletak relatif dekat dengan pusat wisata Asia, yakni Phuket, Thailand dan Pulau Langkawi Malaysia.

Dalam hampir dua dekade terakhir ini, pariwisata oleh para ahli ekonomi diklasifikasikan Sebagai suatu industri yang tidak mengeluarkan asap (*the smokeless industri*), yang dapat menciptakan kemakmuran melalui pengembangan komunikasi, transportasi, dan akomodasi serta menyediakan kesempatan kerja relatif besar. Selain itu dikatakan pula bahwa pariwisata sebagai suatu lapangan usaha tidak hanya berperan sebagai sumber penghasilan devisa bagi negara, tetapi juga sebagai faktor yang menentukan lokasi industri dan sangat membantu perkembangan daerah-daerah yang miskin dalam sumber- sumber alam.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan laut yang cukup besar dengan garis pantai yang panjang. Salah satu potensi sumber daya pantai dan kelautan yang paling menjanjikan, yang dapat dimanfaatkan untuk kelanjutan pembangunan ekonomi Indonesia adalah pemanfaatannya dalam usaha pariwisata. Indonesia kaya akan keindahan karang, keindahan pantai, keindahan vegetasi, taman laut, dan budaya keramah-tamahannya. Indonesia ideal bagi setiap aktivitas pantai dan kelautan seperti berjemur di pantai sambil menikmati matahari, *snorkeling* dan menyelam, serta menjelajahi perkampungan nelayan.

Untuk menindaklanjuti potensi tersebut, fokus pembangunan ekonomi Indonesia saat ini telah beralih ke sumber daya pantai dan kelautan. Hal ini ditandai dengan kebijakan pemerintah yang senantiasa mempertimbangkan pantai dan kelautan yang berhubungan dengan aspek pembangunan sebagai suatu sektor sendiri. Pergeseran fokus pembangunan dari aktivitas berdasarkan sumber daya daratan ke aktivitas berbasis sumber daya kelautan dikarenakan dua alasan utama: pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di

dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau, 81.000 km garis pantai dan 63% (3,1 juta km persegi) wilayah teritorialnya merupakan laut yang dikarunai beragam sumber daya alam.

Begitu juga halnya fakta yang wujud di Aceh, menunjukkan bahwa taman laut pulau rubiah merupakan taman laut terindah di Indonesia setelah taman laut Bunaken di Sulawesi Utara. Dan kedua, wajah pembangunan Indonesia sebahagian besar masih sangat bergantung pada sumber daya alamnya. Wisata bahari merupakan sub sektor yang menjanjikan dan berpeluang menjadi sumber pendapatan utama dalam sektor pariwisata. Penciptaan kondisi bagi pengembangan wisata bahari tentunya harus mempertimbangkan faktor-faktor kelestarian lingkungan demi kelestarian wisata bahari itu sendiri dan kelestarian pembangunan nasional dalam skala yang lebih luas (konsep pembangunan berkelanjutan).

Pada tataran nasional, pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen untuk melaksanakan konsep pembangunan secara berkelanjutan, sebagaimana dinyatakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kunjungan wisatawan ke Propinsi Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya, meskipun tidak sebanding dengan daerah-daerah yang sudah maju pariwisatanya di seluruh Nusantara Indonesia. Peningkatan selama kurun waktu 10 tahun sampai dengan tahun 1998 memberikan suatu gambaran yang baik bagi perkembangan pariwisata Aceh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan kunjungan wisatawan adalah sistem pengumpulan data yang dilakukan, trend kunjungan wisatawan, dan proyeksi kunjungan dimasa yang akan datang. Pariwisata mulai tumbuh dan berkembang di Propinsi Aceh pada tahun 1980-an. Kunjungan demi kunjungan dengan berbagai alasan perjalanan mulai banyak dilakukan oleh wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Pulau Weh mempunyai keunikan dan keindahan akan kecantikan alami dan tempat-tempat sejarah. Selain daripada meriam-meriam dan benteng-benteng kuno, masih banyak lagi obyek masa lalu yang menarik. Beberapa tempat menarik adalah sebagai berikut.

Taman Laut Rubiah terletak sekitar 23,5 km sebelah barat kota Sabang, dapat dicapai melalui darat, atau sekitar 7 km dengan menggunakan perahu boat, dan terletak bersebelahan dengan desa Iboih. Pemerintah Indonesia telah menentukan daerah perairan ini, sekitar 2600 hektar sekitar pulau Rubiah sebagai daerah special nature reserve. Terletak di teluk Sabang, dimana air disini relatif tenang dan sangat jernih (25 m visibility) laut disini diisi oleh bermacam trumbu karang dan ikan bermacam warna. Dapat ditemukan gigantic clams, angel fish, school of parrot fish, lion fish, sea fans, dan banyak lagi.

Bagi penggemar snorkel berpengalaman, Octopus dan Stingrays dapat dilihat disini. Berjemur sinar matahari di pantai dengan pasir yang halus dan putih dapat dilakukan pada pantai yang berseberangan. Tempat ini merupakan surganya turis penggemar snorkel dan selam. Terumbu karang hanya berjarak sekitar 5 meter dari tepi pantai berpasir. Akomodasi berupa makanan dan penginapan tersedia di desa Iboih. Iboih adalah desa kecil dimana kondisi dan layanan penduduk sangat menunjang kenyamanan dalam menikmati atraksi alam sekitar.

Hutan Wisata Iboih terletak bersebelahan dengan Taman Laut Rubiah, dengan luas sekitar 1300 hektar dan juga merupakan daerah terlindung. Hutan ini merupakan hutan hujan tropis yang masih tinggi kerapatannya tetapi selalu mengundang pengunjung untuk menikmati keindahan keasliannya. Hutan ini tempat bagi beragam binatang, banyak terdapat monyet, reptil kecil dan besar, dan burung beraneka warna termasuk burung dara Nicobar yang tidak terdapat di bagian lain Indonesia.

Pantai di pulau Weh sangat beragam dan sangat menarik untuk dikunjungi. Pantai Kasih adalah pantai yang paling dekat dengan kota Sabang. Sekitar dua km ke arah Barat Daya terdapat pantai berbatu dengan banyak pepohonan kelapa sepanjang semenanjung. Di sepanjang semenanjung ini juga dapat ditemui beberapa peninggalan Perang Dunia II berupa benteng-benteng tempat senjata berat seperti meriam.

Mengikuti sepanjang pantai sekitar dua kilometer kita akan sampai di Pantai Tapak Gajah. Jika kita teruskan maka akan sampai di Pantai Sumur Tiga. Pasir putih yang halus dan air yang jernih sangat ideal untuk berenang dan snorkel. Sekitar dua kilometer dari Pantai Sumur Tiga terdapat Pantai Ujung Kareung. Disini banyak terdapat terumbu karang, ikan-ikan karang, dan juga bintang laut di dekat pantai. Pantai yang indah lainnya dapat ditemui di Gapang, yaitu pantai berpasir putih yang luas dan indah di dekat desa Iboih, arah Barat kota Sabang.

Terdapat beberapa gua alami di pantai barat Pulau Weh yang terletak berseberangan dengan Hutan Wisata Iboih. Gua-gua ini menghadap ke samudra dan dihuni bermacam burung, kelelawar, dan ular. Menjelajahi tempat ini dengan menggunakan perahu harus didampingi oleh penduduk lokal karena lokasi yang cukup sulit dijangkau, dan berbahaya, terutama antara bulan Mei dan September saat musim angin Barat. Kondisi ini sangat menantang bagi pencinta gua.

Peluang Investasi Sektor Pariwisata :

1. Jasa akomodasi, transportasi dan paket rekreasi
2. Pengembangan jasa dan fasilitas wisata bahari dan olah raga pantai seperti sky air, selancar angin dan lainnya
3. Pengembangan investasi atraksi wisata bahari baik di kota Sabang maupun di Pulo Aceh seperti tracking, snorkeling, diving, hiking dan lainnya
4. Pengembangan penginapan tradisional, bungalow, cottage dan kondisi lahan yang tersedia
5. Pembangunan dan pengembangan restoran, rumah makan, cafee dan lain sebagainya.

Pengembangan Kawasan Perbatasan di Pulau Rondo

Menurut tinjauan Bappenas (2011), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki letak yang sangat strategis baik dari sudut ekonomi, politik, maupun geografis. Posisi geografis wilayah yang terletak diantara Selat Malaka dan

Samudera Hindia memiliki nilai yang sangat strategis dari sudut geografis, politik/pertahanan, dan ekonomi. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang berbatasan dengan negara India dan memiliki beberapa pulau kecil terluar antara lain Pulau Simeulucut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Benggala, dan Pulau Rondo.

Diantara beberapa pulau kecil yang terdapat di wilayah Provinsi NAD, Pulau Rondo adalah salah satu pulau yang prioritas untuk ditangani. Pulau Rondo terletak di ujung utara Sumatera dan masuk kedalam wilayah Kota Sabang dengan luas lebih kurang 0,4 mil persegi. Kondisi Pulau Rondo termasuk pulau kecil yang tidak berpenduduk dan terisolir. Dilihat dari potensinya Pulau Rondo memiliki nilai strategis dilihat dari aspek geopolitik dan pertahanan keamanan. Pulau Rondo termasuk pulau-pulau terpencil dan jaraknya jauh dari pusat-pusat pertumbuhan baik di dalam maupun ke negara tetangga. Pulau ini memiliki banyak kendala untuk dikembangkan secara ekonomis (penghuninya sangat terbatas, bahkan relatif dapat dikatakan pulau kosong/tidak berpenghuni). Kalau dilihat dari fungsi kawasan, Pulau Rondo dapat dikembangkan hanya untuk aspek lingkungan, pengawasan/patroli perbatasan atau riset kelautan dan wisata bahari.

Di Pulau Rondo dan pulau-pulau disekitarnya tidak terdapat penduduk yang tinggal menetap, melainkan merupakan penduduk musiman yang keberadaannya tergantung pada aktivitas pendatang. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan kondisi pulau yang berfungsi sebagai pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Negara India di Kepulauan Nicobar dan sebagai titik dasar (bases point) dalam penentuan garis ZEE dan batas laut teritorial RI – India. Sarana dan prasarana di Pulau Rondo tidak tersedia seiring dengan tidak adanya penduduk yang menetap di pulau tersebut, hanya beberapa aparat TNI AL sebagai penjaga pulau dan petugas mercu suar.

Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah perbatasan Nanggroe Aceh Darussalam, sangat dirasakan untuk wilayah pulau-pulau terluar. Minimnya

akses darat dan udara dari dan ke wilayah perbatasan, minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi, dan sebagainya menyebabkan mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangi wilayah perbatasan. Hal ini merupakan penyebab ketertinggalan, dan keterisolasian Pulau Rondo sebagai wilayah perbatasan negara.

Satu-satunya sarana transportasi yang dapat mencapai wilayah Pulau Rondo adalah sarana transportasi laut milik TNI Angkatan Laut, dan sarana transportasi milik nelayan. Kalau dihitung jarak dan lama perjalanan laut dari wilayah daratan Pulau Weh sekitar dapat dicapai dalam waktu 4 jam dengan kecepatan 10 knot.

4.1.4. Hambatan Pengembangan Investasi di Kota Sabang

Identifikasi Permasalahan Sektor Prioritas dan Sektor Andalan dalam Kawasan Sabang

Dalam perkembangannya, kegiatan investasi di Kota Sabang terhambat pada suatu kendala. Beberapa kendala atau permasalahan tersebut khususnya berkaitan dengan pengembangan Sektor Prioritas dan Sektor Andalan dalam Kawasan Sabang, antara lain:

1. Sektor Prioritas pertama: Kepelabuhanan

Jika dilihat dari prasarana dan sarana infrastruktur pelabuhan yang ada pada saat ini memang belum memadai untuk dikembangkan sebagai Pelabuhan Internasional Hub, dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan internasional lainnya.

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala, yaitu:

- ✓ Belum adanya komitmen pemerintah dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif
- ✓ Belum adanya kerjasama sinergi antar berbagai sektor sehingga skenario perusahaan pelabuhan bebas dapat terwujud
- ✓ Belum terbentuknya badan usaha yang mengurus masalah pelabuhan bebas Sabang secara professional

- ✓ Belum terwujudnya standar pelayanan prima, juga belum dimilikinya Hak Pengelolaan Kepelabuhanan

2. Sektor Prioritas kedua: Perdagangan dan Industri

- ✓ Minimnya pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas perdagangan dan industri
- ✓ Pelaku bisnis masih berskala kecil yang melakukan transaksi dagang pada produk yang bersifat homogen
- ✓ hampir tidak ada aktivitas industri berskala besar, kecuali beberapa home industri
- ✓ kurangnya minat investor untuk berinvestasi di sektor perdagangan dan industri
- ✓ kerjasama yang belum optimal dengan pihak pengusaha/investor lokal dan asing

3. Sektor Prioritas ketiga: Pariwisata

- ✓ Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata
- ✓ Fasilitas pariwisata yang masih terbatas
- ✓ belum optimalnya promosi potensi pariwisata Kawasan Sabang ke dunia luar
- ✓ Perlunya membangun infrastruktur yang berpola Triple T Revolution (Tourism, Telecommunication and Transportation)
- ✓ Kurangnya pengembangan dan pemberdayaan wisata bahari atau wisata pantai (krn Sabang dikelilingi laut atau pantai)
- ✓ Perlunya peningkatan SDM yang bergerak di sektor pariwisata

4. Sektor Prioritas keempat: Perikanan

- ✓ keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan
- ✓ Rendahnya kemampuan nelayan untuk menangkap ikan di zona penangkapan
- ✓ Pengaruh musim pada mobilitas ikan tangkapan sehingga ada musim-musim yang produksi tangkapan tinggi dan rendah

5. Sektor Andalan pertama: Kelembagaan

- ✓ Pengelolaan Kawasan Sabang belum dilakukan secara optimal, terpadu antar pelaku (lintas sektor pusat dan daerah, lintas usaha dan lintas daerah) dan berkelanjutan
- ✓ Peran BPKS dalam Kawasan Sabang belum optimal dalam membangun jaringan kerjasama pemerintah-swasta
- ✓ Organisasi BPKS saat ini belum mencapai bentuk optimal sebagai organisasi bisnis
- ✓ Belum adanya aspek kompetensi kelembagaan yang dituntut berkembang dalam waktu yang sangat singkat
- ✓ Belum adanya ukuran kinerja yang baik, terutama tuntutan sebagai suatu badan usaha yang akan dikelola secara profesional dan mengikuti peraturan good corporate governance
- ✓ Masih perlu dilakukan terus perbaikan dalam hal bentuk pelayanan pemerintah kepada public
- ✓ Masih terbatasnya kemampuan profesionalisme dan komitmen para karyawan bagi terwujudnya reinventing government melalui pengembangan kapabilitas kelembagaan pengelola Kawasan Sabang
- ✓ Belum adanya sistem informasi yang canggih dan terpadu untuk mendukung pelayanan lembaga pengelolaan Kawasan Sabang

6. Sektor Andalan kedua : Infrastruktur

- ✓ Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada (belum bertaraf internasional)
- ✓ Kurang lancarnya arus lalu lintas orang, barang dan jasa
- ✓ Penyebaran fasos/fasum yang tidak merata
- ✓ Kurangnya perhatian terhadap masalah sumber daya alam terutama yang terkait dengan konservasi hutan lindung dan pemanfaatan sumber air tanah baku

4.1.5. Analisis SWOT Terkait Pengembangan Investasi di Kota Sabang

Aspek Strategis Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

Untuk lebih memfokuskan strategis Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi, situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dapat menggunakan metode atau teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

1. Kekuatan (*Strengths*)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam mencapai visi dan misi, adalah :

- i. Memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000, Undang-undang nomor 11 tentang pemerintah Aceh dan Peraturan

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang.

- ii. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normative dan taat aturan
- iii. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparatur untuk melaksanakan tugas dan poksi masingmasing.
- d. Dukungan perangkat organisasi yang solid

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan analisis adalah :

- i. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim.
- ii. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
- iii. Penempatan karyawan terhadap bidang kerja belum memperhatikan pengalaman dan latar belakang pendidikan.
- iv. Belum memiliki pola kerja yang baku (SOP).
- v. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal ideal.
- vi. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal.
- vii. Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam mencapai visi dan misinya, antara lain :

- i. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, telah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk membuat aturan-aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditambah lagi dengan telah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang.

- ii. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan, pengembangan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas Sumber daya manusianya guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
- iii. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam pengembangan Kawasan Sabang merupakan hal yang sangat positif dan dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

4. Ancaman (*Threats*)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari luar organisasi/ eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam pencapaian tingkat keberhasilan, diantaranya kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

Strategi Pengembangan Kawasan Pergangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Rencana strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya demi

tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan adanya rencana strategis, maka BPKS telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan stakeholder.

Strategi pengembangan Kawasan Pergangangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dapat terdiri dari 4 (empat) tahapan pengembangan, antara lain :

1. Tahapan Konsolidasi (tahun 2001 sampai dengan 2003)

Pada tahap konsolidasi diupayakan pengembangan ekonomi rakyat yang masih bersifat tradisional kearah yang lebih modern untuk mengantisipasi pengembangan dalam skala besar. Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Kawasan Sabang, maka pengembangan sektor–sektor unggulan dapat dimulai dengan melakukan promosi yang efektif untuk mengundang investor, baik lokal maupun luar negeri.

2. Tahapan Percepatan / Acceleration (tahun 2004 sampai dengan 2006)

Pada strategi percepatan diarahkan untuk pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang ada dan peningkatan produksi pada sektor primer seperti perikanan laut, perkebunan dan kehutanan) dan pengembangan pelabuhan untuk menunjang aktifitas ekspor dan impor. Kemudian pengembangan dan peningkatan sistem jaringan jalan regional, Bandara Maimun Saleh dan Pelabuhan untuk mempermudah aksesibilitas dari sentra-sentra produksi.

3. Tahapan Transformasi / Transformation (tahun 2007 sampai dengan 2010)

Pada tahap ini diarahkan untuk menarik investasi guna pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan perkebunan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi sektor/ komoditas unggulan serta meningkatkan nilai ekspor komoditi setengah jadi sehingga dibutuhkan pengembangan industri pengolahan dan industri hilir.

4. Tahapan Penguatan / Stretching (2011 sampai dengan 2018)

Pada tahap penguatan diarahkan untuk mengembangkan industri manufaktur (elektronik, perakitan dan kimia), perdagangan, pariwisata, transportasi dan kepelabuhanan.

Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) merupakan Badan Pelaksana atas kebijakan dari Dewan Kawasan Sabang dalam rangka mengelola dan mengembangkan Kawasan Sabang untuk meningkatkan perekonomian provinsi Aceh pada umumnya dan Kawasan Sabang pada khususnya. Dalam menjalankan kegiatannya, agar berdaya guna, efisien dan efektif perlu mempunyai suatu visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional.

Visi BPKS merupakan bagian integral dari Visi Kawasan Sabang 2025 yang dirumuskan dalam Master Plan Kawasan Sabang 2007 – 2021. Berdasarkan hal tersebut, BPKS menetapkan Visi sebagai berikut: “Mengembangkan Kawasan Sabang sebagai Pusat Utama Pelayanan Perdagangan Dunia”. Visi BPKS ini diselaraskan dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 169 ayat (1) beserta penjelasannya, yakni: Yang dimaksud dengan frasa “transportasi dan maritim” dimaksudkan juga untuk menjadi Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pelabuhan impor-ekspor (internasional) dan juga sebagai pelabuhan alih kapal (transshipment) nasional.

Misi merupakan komitmen yang sinergi dengan Visi. Misi BPKS untuk mewujudkan Visi BPKS dengan basis potensi yang ada, maka ditetapkan Misi Pengembangan BPKS sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pelayanan pelabuhan untuk kapal-kapal generasi yang akan datang.

- b. Mengembangkan pelayanan untuk perdagangan dunia melalui Kawasan Perdagangan Bebas.
- c. Mengembangkan pelayanan bagi basis operasi kapal cruise untuk wisata Nusantara dan ASEAN.
- d. Mengembangkan Industri Perikanan Modern yang bersinergi dengan pengembangan sumberdaya perikanan nasional.
- e. Mengembangkan kelembagaan pengusaha dan infrastruktur kawasan yang bertaraf internasional.

4.2. Potensi Pengembangan Investasi di Sulawesi Utara (Studi Kasus: Kabupaten Kepulauan Talaud)

Sebelum membahas lebih dalam mengenai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Filipina (Kabupaten Kepulauan Talaud), pembahasan akan diawali dengan melihat kondisi potensial dari Propinsi Sulawesi Utara. Menurut Rencana Strategis Pengembangan Industri Nasional 2010-2014 oleh Agus Tjahjana (2010), Sulawesi Utara memiliki beberapa produk unggulan sebagai berikut:

Industri Pengolahan Hasil Laut

Hasil Laut merupakan produk unggulan Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Industri Penunjang untuk industri pengolahan hasil laut adalah industri mesin/peralatan, industri kimia, jasa transportasi, sedangkan industri terkait dengan industri pengolahan hasil laut adalah industri alat perlengkapan ikan, industri alat angkut, dan pariwisata.

Sasaran ekonomi Sulawesi Utara dalam industri pengolahan hasil laut dapat dibagi menjadi sasaran jangka menengah (2008 – 2012) dan sasaran jangka panjang (2013-2018). Sasaran jangka menengah terdiri dari tersedianya sarana penampungan dan pengolahan hasil laut, peningkatan mutu produk hasil olahan, dan peningkatan nilai tambah diversifikasi termasuk limbah. Adapun sasaran jangka panjang (2013-2018) adalah menerapkan tata niaga ekspor tuna,

meningkatkan mutu tuna, mengembangkan pilot project pengolahan tuna, mengembangkan industri bioteknologi kelautan.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah strategi aglomerasi, sinkronisasi, koordinasi, bantuan ahli, litbang pendidikan serta promosi (dengan pendekatan klaster hasil laut). Strategi ini diterapkan melalui pokok-pokok rencana tindak jangka menengah (2008-2012) dan pokok-pokok rencana tindak jangka panjang (2013-2018), yaitu penambahan alat penangkapan ikan, meningkatkan kinerja kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan, fasilitasi perluasan pemasaran perikanan, diversifikasi komoditas dan produk turunannya, serta membangun infrastruktur perikanan dan pelabuhan perikanan.

Adapun pokok-pokok rencana tindak jangka panjang (2013-2018) terdiri dari pengembangan infrastruktur perikanan dan pelabuhan perikanan, pengembangan diversifikasi komoditas dan produk turunannya, serta pengembangan industri pengolahan tuna dan bioteknologi kelautan.

Unsur Penunjang dari penciptaan produk unggulan pengolahan hasil laut terdiri dari beberapa unsur. Unsur pertama adalah unsur penunjang pasar berupa pengembangan promosi, peningkatan jaringan pemasaran ekspor kelembagaan, dan fasilitas pengembangan kawasan industri. Selain itu unsur penunjang berikutnya adalah unsur penunjang sumber daya manusia (SDM) yaitu meningkatkan kemampuan SDM di bidang pengolahan dan pemasaran (bekerja sama dengan Filipina). Sedangkan unsur ketiga adalah unsur infrastruktur, yaitu membangun balai besar industri pengolahan kelapa hilir.

Industri Pengolahan Kelapa

Industri Pengolahan Kelapa merupakan industri unggulan di Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Industri Pengolahan kelapa memerlukan industri penunjang berupa industri kelapa, mesin dan peralatan bahan penolong. Sedangkan industri yang terkait adalah industri makanan dan minuman.

Untuk industri ini, sasaran jangka menengah (2008-2012) adalah pertama, menghasilkan bahan baku kopra putih untuk minyak makan (cooking oil), gliserin dlm kemasan dan gula kelapa, kedua, berdirinyacenter of coconut excellence. Ketiga, meningkatkan utilitas industri pengolah kelapa terutama minyak kelapa.

Adapun sasaran jangka panjang (2013-2018) adalah pertama membangun *global supply chainspecialities product*, kedua terbentuknya *regional coconut cluster* (ASEAN Asia Pacific) dan Ketiga penguatan *Regional Coconut Cluster*. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut dibutuhkan strategi antara lain peningkatan kualitas bahan baku, diversifikasi produk berbahan baku kelapa, peningkatan riset olahan kelapa, pengembangan teknologi proses dan pengembangan klaster kelapa.

Pokok-pokok rencana tindak jangka menengah (2008-2012) adalah *pilot project* pengembangan industri kelapa, pengembangan industri *coco chemicals*, dan pengembangan SDM. Selain itu pokok-pokok rencana tindak jangka panjang (2013-2018) adalah menghadirkan investor industri *coco chemicals*, membangun *global supply chain specialties produt*, mengembangkan industri *coco chemicals*.

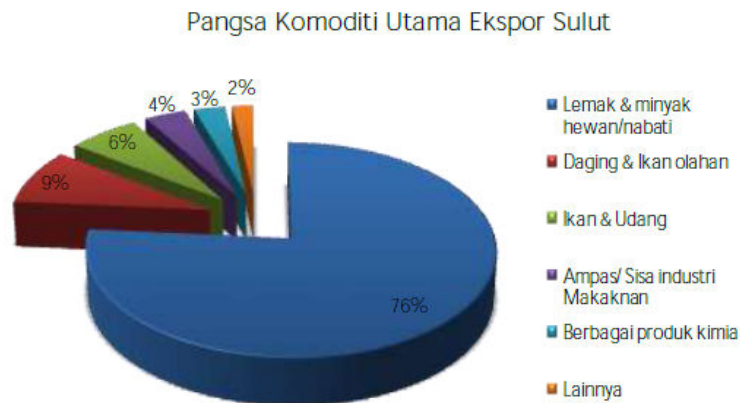
Unsur penunjang untuk mencapai sasaran di atas ada beberapa, yang pertama: unsur pasar, yaitu pengembangan promosi, peningkatan jaringan pemasaran ekspor kelembagaan, dan fasilitas pengembangan kawasan industri. Kedua, unsur SDM yaitu meningkatkan kemampuan SDM di bidang pengolahan dan pemasaran (bekerja sama dengan Filipina). Terakhir, unsur penunjang infrastruktur berupa pembangunan balai besar industri pengolahan kelapa hilir.

Komoditi Utama Sulawesi Utara untuk Ekspor dan Impor

Berdasarkan jenisnya, komoditi utama ekspor luar negeri pada triwulan III-2011 di Sulawesi Utara terutama didominasi dalam bentuk Lemak dan Minyak Hewani dengan pangsa mencapai 76% kemudian daging olahan dan ikan olahan dengan pangsa mencapai 9 persen, sisanya dalam bentuk ikan & udang (6

persen). Ampas atau sisa industri (4 persen), berbagai produk kimia (3 persen) dan produk lainnya (2 persen).

Grafik 4.1 Pangsa Komoditi Utama Ekspor Sulut

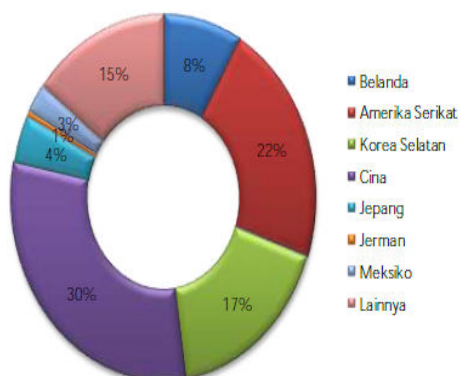


Sumber: BPS Provinsi Sulut, diolah

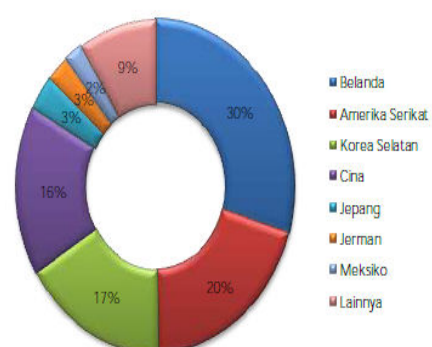
Komposisi negara tujuan ekspor Sulawesi Utara (Sulut) sampai dengan triwulan III-2011 mengalami pergeseran bila dibandingkan pada tahun 2010. Negara tujuan utama ekspor Sulut sampai dengan triwulan laporan adalah Belanda (29.53%), Amerika Serikat (20.19%), Korea Selatan (16.66%), Cina (15.41%) sedangkan pada tahun 2010 negara tujuan ekspor utama Sulut adalah Cina (30.42%), Amerika Serikat (21.89%), Korea Selatan (17.89%), Belanda (8.41%).

Grafik 4.2. Negara Tujuan Ekspor 2010 dan 2011 dari Sulawesi Utara

Negara Tujuan Ekspor Tahun s.d September 2010



Negara Tujuan Ekspor s.d. Sept 2011



Sumber: BPS Provinsi Sulut, diolah

4.2.1. Sektor Unggulan Di Sulawesi Utara (Studi Kasus: Kabupaten Kep. Talaud)

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan ibu kota Melonguane. Memiliki luas 1.251,02 km² dan terbagi menjadi 8 kecamatan. Wilayahnya berbatasan dengan Negara Filipina di sebelah utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud di sebelah selatan, Laut Sulawesi di sebelah barat dan Samudera Pasifik di sebelah timur. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2000. Jumlah Penduduk: 91.067 Jiwa.

Sektor Perkebunan masih tetap menjadi sentra kegiatan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud. Pala, kopi, kakao, vanili, lada dan cengkeh masih bisa diandalkan. Namun dari keenam komoditas tersebut, pala yang diunggulkan. Tanaman yang sering dijadikan manisan initersebar merata di seluruh wilayah kecamatan. Sejak jaman penjajahan Belanda, pala sudah menjadi komoditas perdagangan penting. Proses pemeliharaannya yang mudah dan harga jualnya yang cukup tinggi merupakan faktor pendorong lain masyarakat Talaud menanam pala. Tidak hanya biji pala yang diperjualbelikan. Bunga pala yang disebut fuli juga bernilai ekonomis tinggi. Fuli biasanya digunakan untuk bumbu masak dan minyak gosok. Perkebunan memang mendominasi kegiatan ekonomi pertanian Kepulauan Talaud. Namun, dibalik itu, kegiatan pertanian tanaman pangan masih menyimpan potensi. Hanya saja, semua potensi tersebut belum tergarap maksimal.

Dukungan sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi masih belum dikelola dengan baik. Padahal, jika potensi tanaman pangan digarap dengan maksimal, kebutuhan pangan di Talaud bisa langsung terpenuhi. Kelapa merupakan komoditas tanaman terbesar yang dihasilkan, akan tetapi daerah ini masih mengimpor minyak goreng dari Manado dan Bitung, hal ini dikarenakan industri pengolahan kelapa menjadi minyak goreng belum dikembangkan, begitu juga untuk industri pengolahan cengkeh dan pala juga belum tersedia. Selain memiliki komoditas unggulan dari perkebunan, wilayah maritim ini memiliki potensi perikanan laut dengan komoditinya berupa ikan

tuna, kerapu, layang, cakalang, dan hasil budi daya laut seperti rumput laut, teripang, dan kerang mutiara. Di kawasan kepulauan ini hanya ada satu dermaga peangkapan ikan yakni di Pantai Dagho, Kecamatan Tamako, Pulau sangir Besar.

Dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan ini berdampak besar juga terhadap perdagangan. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa, daerah ini juga telah terdapat Bandara Melongauane yang terletak di Kepulauan Talaud, tiga buah Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Lirung, Pelabuhan Karatung, dan Pelabuhan Miangas, serta terdapat berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.

Kabupaten Kepulauan Talaud tergolong daerah terbelakang yang membutuhkan investasi proyek pembangunan. Proyek jalan nasional di Talaud rencananya akan dibangun sepanjang 91 km dengan anggaran Rp 14 miliar. Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki luas 1.251,02 km² dan terbagi menjadi 8 kecamatan. Wilayahnya berbatasan dengan negara Filipina di sebelah utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud di sebelah selatan, Laut Sulawesi di sebelah barat dan Samudera Pasifik di sebelah timur. Untuk dapat melihat Kabupaten Kepulauan Talaud dari dekat dapat mengunjungi situs www.talaudkab.go.id.

Kondisi Makro Wilayah

Pada Triwulan III-2011, sektor bangunan dan jasa-jasa tumbuh paling tinggi sebesar 15.76% dan 12.97% (yoy) dengan sumbangan sebesar 2.26 % dan 2% terhadap total pertumbuhan. Sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan yang normal yaitu sebesar 2.42% (yoy) meskipun sedikit melambat dari triwulan I dan triwulan II 2011. Hal ini menurut BI (2011) disebabkan adanya bencana banjir dan longsor yang terjadi di Bolaan Mongondow. Selain itu, serangan hama tungro di beberapa kawasan sentra pertanian di Sulut (Minahasa Tenggara dan Bolaan Mongondow) turut andil dalam perlambatan kinerja sektor pertanian.

Tabel 4.4. Laju Pertumbuhan Sulawesi Utara Menurut Sektor Ekonomi (%)

Lapangan Usaha	2011					
	Q1	Kontribusi (%)	Q2	Kontribusi (%)	Q3	Kontribusi (%)
Pertanian	6.58	1.29	6.65	1.42	2.42	0.52
Pertambangan & Penggalian	5.89	0.31	5.88	0.3	7.9	0.39
Industri Pengolahan	6.03	0.47	6.93	0.52	6.33	0.49
Listrik, Gas & Air Bersih	4.81	0.04	5.33	0.04	7.22	0.06
Bangunan	8.31	1.39	13.59	1.97	15.76	2.26
PHR	8.79	1.31	6.36	1	12.97	2
Pengangkutan & Komunikasi	7.24	0.89	3.27	0.43	2.55	0.35
Keu. Sewa & Jasa Perusahaan	5.31	0.36	7.13	0.47	6.51	0.43
Jasa-Jasa	5.89	0.93	6.46	0.98	8.2	1.23
PDRB	6.99	6.99	7.14	7.14	7.73	7.73

Sumber: BPS Sulut, Diolah, BI (2011)

Tabel 4.5. menunjukkan perkembangan produksi, produktivitas dan luas lahan panen padi dan palawija di propinsi Sulawesi Utara. Terlihat bahwa di Sulawesi Utara secara umum komoditi padi yang mencakup padi sawah dan lading memberikan kontribusi terbesar dalam sector pertanian.

Tabel 4.5. Perkembangan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi dan Palawija Prov. Sulut

Jenis Tanaman	2008	2009	ASEM 2010	ARAM I 2011	Perubahan 2010 - 2011 (%)	Perubahan 2009 - 2010 (%)
Produksi (Ton)						
Padi (Sawah+Ladang)	520,193	549,087	583,458	592,527	1.55	6.26
Jagung	466,061	450,989	492,614	512,799	4.10	9.23
Kedelai	7,217	7,667	9,062	9,312	2.76	18.19
Kacang Tanah	8,640	8,493	9,360	10,075	7.64	10.21
Produktivitas (Ku/Ha)						
Padi (Sawah+Ladang)	47.31	47.85	48.77	49	0.10	1.92
Jagung	35.36	35.69	36.59	37	0.08	2.52
Kedelai	13.81	13.57	31.26	13	-57.52	130.36
Kacang Tanah	13.14	13.17	13.12	13	0.23	-0.38
Luas Panen (Ha)						
Padi (Sawah+Ladang)	109,951	114,745	119,626	121,382	1.47	4.25
Jagung	131,791	126,349	134,630	140,014	4.00	6.55
Kedelai	5,227	5,652	6,834	7,011	2.59	20.91
Kacang Tanah	6,573	6,450	7,151	7,662	7.15	10.87

Sumber: BPS Sulut, Diolah, BI (2011)

Secara khusus sektor pertanian di Sulut mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2010. Hal ini ditunjukkan dari penurunan laju produksi padi beras, jagung, kedelai dan kacang tanah yang hanya mencapai 1.55%, 4.1%, 2.76%, dan 7.64% (yoy) pada tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka subsektor perkebunan masih tetap menjadi sentra kegiatan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud. Pala, kopi, kakao, vanili, lada dan cengkeh masih bisa diandalkan. Namun dari keenam komoditas tersebut, pala yang diunggulkan. Tanaman yang sering dijadikan manisan ini tersebar merata di seluruh wilayah kecamatan. Sejak jaman penjajahan Belanda, pala sudah menjadi komoditas perdagangan penting.

Proses pemeliharaannya yang mudah dan harga jualnya yang cukup tinggi merupakan faktor pendorong lain masyarakat Talaud menanam pala. Tidak hanya biji pala yang diperjualbelikan. Bunga pala yang disebut fuli juga bernilai ekonomis tinggi. Fuli biasanya digunakan untuk bumbu masak dan minyak gosok. Perkebunan memang mendominasi kegiatan ekonomi pertanian Kepulauan Talaud.

Namun, dibalik itu, kegiatan pertanian tanaman pangan masih menyimpan potensi. Hanya saja, semua potensi tersebut belum tergarap maksimal. Dukungan sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi masih belum dikelola dengan baik.

Padahal, jika potensi tanaman pangan digarap dengan maksimal, kebutuhan pangan di Talaud bisa langsung terpenuhi. Kelapa merupakan komoditas tanaman terbesar yang dihasilkan, akan tetapi daerah ini masih mengimpor minyak goreng dari Manado dan Bitung, hal ini dikarenakan industri pengolahan kelapa menjadi minyak goreng belum dikembangkan, begitu juga untuk industri pengolahan cengkeh dan pala juga belum tersedia. Selain memiliki komoditas unggulan dari perkebunan, wilayah maritim ini memiliki potensi perikanan laut dengan komoditinya berupa ikan tuna, kerapu, layang, cakalang, dan hasil budi daya laut seperti rumput laut, teripang, dan kerang mutiara.

Di kawasan kepulauan ini hanya ada satu dermaga peangkapan ikan yakni di Pantai Dagho, Kecamatan Tamako, Pulau sangir Besar. Dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan ini berdampak besar juga terhadap perdagangan. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa, daerah ini juga telah terdapat Bandara Melongauane yang terletak di Kepulauan Talaud, tiga buah Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Lirung, Pelabuhan Karatung, dan Pelabuhan Miangas, serta terdapat berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.

4.2.2. Sektor dan Komoditas Unggulan Kabupaten Kepulauan Talaud

Sektor Unggulan

Berdasarkan data kontribusi setiap sektor terhadap PDRB tahun 2009 pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud masih didominasi oleh sektor pertanian dalam pelaksanaan pembangunan perekonomiannya. Hal ini terlihat masih sekitar 46.49 persen PDRB di Kabupaten Talaud disumbang oleh sektor pertanian, dengan rincian sekitar 5.98 persen disumbang oleh sub sektor tanaman pangan, 34.7 persen sub sektor perkebunan, 1.39 persen sub sektor peternakan, 0.26 persen oleh sub sektor kehutanan dan sisanya 4.17 persen oleh sub sektor perikanan. Dari kondisi yang dijelaskan di atas maka dapat dilihat bahwa sektor unggulan di Kabupaten Padang Lawas masihlah pada sektor pertanian. Subsektor perkebunan merupakan sector yang paling memberikan kontribusi di sektor pertanian tersebut.

**Tabel 4.3. Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap Produk Domestik Bruto
di Kabupaten Kepulauan Talaud**

No	Lapangan Usaha	Nilai		Kontribusi (%)	
		2008	2009	2008	2009
I	PERTANIAN	185,812.90	185,759.84	48.90	46.49
	a. Tabama	24,059.90	23,890.72	6.33	5.98
	b. Perkebunan	138,947.00	138,623.70	36.57	34.70
	c. Peternakan	5,501.80	5,559.46	1.45	1.39
	d. Kehutanan	793.00	1,028.10	0.21	0.26
	e. Perikanan	16,511.30	16,657.86	4.35	4.17
II	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	9,194.00	10,944.25	2.42	2.74
	Penggalian	9,194.00	10,944.25	2.42	2.74
III	INDUSTRI PENGOLAHAN	7,032.50	8,013.20	1.85	2.01
IV	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	679.60	690.19	0.18	0.17
	a. Listrik	629.80	637.17	0.17	0.16
	c. Air Bersih	49.70	53.02	0.01	0.01
V	BANGUNAN	34,421.60	39,945.44	9.06	10.00
VI	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	37,274.50	40,490.94	9.81	10.13
	a. Perdagangan besar dan eceran	32,639.50	35,998.61	8.59	9.01
	b. Hotel	695.80	725.04	0.18	0.18
	c. restoran	3,939.20	4,217.29	1.04	1.06
VII	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	29,067.30	31,158.64	7.65	7.80
	a. Pengangkutan	27,854.50	29,857.43	7.33	7.47
	b. Komunikasi	1,212.80	1,301.21	0.32	0.33
VIII	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA	22,685.10	24,340.28	5.97	6.09
	a. Bank	14,782.60	15,900.59	3.89	3.98
	b. Lembaga Keuangan	165.20	174.73	0.04	0.04
	c. Sewa Bangunan	7,341.20	7,843.50	1.93	1.96
	e. Jasa Perusahaan	396.10	421.45	0.10	0.11
IX	JASA-JASA	53,809.60	57,737.56	14.16	14.45
	a. Pemerintahan Umum	41,899.20	45,256.31	11.03	11.33
	b. Swasta	11,910.40	12,481.26	3.13	3.12
	TOTAL PDB	379,977.10	399,530.37	100.00	100.00

Sumber: Kabupaten Talaud dalam Angka, 2010

Komoditas Unggulan

Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki potensi sumberdaya pertanian yang sangat besar. Tidak kurang beberapa jenis komoditas pertanian merupakan andalan wilayah ini, seperti kelapa, Pala dan Kopi. Bahkan komoditas Kelapa merupakan penghasil utama wilayah ini.

Berdasarkan Tabel 4.4. bahwa nilai LQ yang lebih besar dari 1 ($LQ > 1$) terdapat pada tanaman kelapa dalam. Terdapat 13 kecamatan yang memiliki nilai LQ lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis ekonomi wilayah. Alat ukur yang umum digunakan dalam menghitung LQ adalah volume produksi. Investasi di bidang perkebunan kelapa sangat disarankan di daerah ini, karena mengingat daerah ini memiliki keunggulan sumber daya alam perkebunan kelapa.

Tabel 4.4. Nilai Indeks LQ Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2009

No	Kecamatan	Kelapa	Pala	Kopi Robusta	Panili	Lada
1	Kabaruan	0.9429	0.1964	0.0003	0.0000	0.0001
2	Damau	0.8418	0.2974	0.0003	0.0000	0.0002
3	Lirung	0.9531	0.1858	0.0000	0.0001	0.0006
4	Salibabu	0.8656	0.2735	0.0000	0.0002	0.0003
5	Kalongan	0.9680	0.1711	0.0000	0.0000	0.0004
6	Moronge	0.7809	0.3581	0.0000	0.0003	0.0004
7	Melonguane	1.0428	0.0954	0.0003	0.0001	0.0009
8	Melonguane Timur	0.9830	0.1552	0.0004	0.0001	0.0009
9	Beo	1.0391	0.0984	0.0001	0.0004	0.0016
10	Beo Utara	1.0602	0.0783	0.0000	0.0002	0.0009
11	Beo Selatan	1.0516	0.0866	0.0000	0.0003	0.0011
12	Rainis	1.1189	0.0195	0.0000	0.0007	0.0005
13	Tamppannama	1.1110	0.0268	0.0000	0.0010	0.0008
14	Pulutan	1.0599	0.0775	0.0000	0.0009	0.0013
15	Essang	1.0409	0.0984	0.0000	0.0003	0.0000
16	Essang Selatan	1.0284	0.1107	0.0000	0.0005	0.0000
17	Gemeh	1.0769	0.0625	0.0000	0.0002	0.0000
18	Nanusa	1.1288	0.0104	0.0000	0.0001	0.0003
19	Miangas	1.1388	0.0003	0.0000	0.0001	0.0005

4.2.3. Sektor Usaha Unggulan Kota Bitung

Berdasarkan data PDRB yang ditunjukkan dalam Tabel 4.6, terlihat bahwa sektor usaha yang menjadi leading sector di Kota Bitung adalah sektor

industri manufaktur. Tahun 2008, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 21.57 persen dari total PDRB Kota Bitung.

Banyaknya kegiatan industri di Kota Bitung, menjadikan Kota ini sebagai pusat atau sentra kegiatan industri di Propinsi Sulawesi Utara. Nilai investasi sektor industri di Kota Bitung terus meningkat seiring dengan bertambah banyaknya kegiatan industri. Nilai investasi meningkat dari 795.8 milyar rupiah pada tahun 2008 menjadi 800.1 milyar rupiah pada tahun 2009 atau meningkat 0.005 persen. Meningkatnya nilai investasi tentu saja akan mempengaruhi tingkat produksi sektor industri Kota Bitung. Nilai produksi tahun 2009 adalah 1.201.36 milyar rupiah atau meningkat 0.002 persen dari tahun 2008. Sedangkan jika dilihat lebih lanjut pada Nilai investasi untuk industri kecil dan menengah (141,005 milyar rupiah) dan investasi pada sector industri berat meliputi agro, logam dan Kimia (659.1 milyar rupiah).

Industri kecil dan menengah pada dasarnya merupakan sektor yang sangat potensial, namun sejauh ini para investor belum berani menginvestasikan modal mereka untuk sektor ini di Kota Bitung. Sedangkan untuk investasi pada sektor industri besar pada tahun 2009 cenderung tetap jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi nilai produksi sektor industri Kota Bitung pada tahun 2009 yang memperlihatkan Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah dari 144.01 milyar rupiah menjadi 146.26 milyar rupiah pada 2009 ternyata tidak diikuti oleh nilai produksi industri besar yang cenderung stagnan pada nilai 1055.1 milyar rupiah pada dua tahun terakhir.

Tabel 4.6. Kontribusi Sektor terhadap Produk Domestik Bruto di Kota Bitung

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian	23.8	24.03	21.69	19.01	19.9
	a Tanaman bahan makanan	0.91	0.87	0.95	1.31	1.15
	b Perkebunan rakyat	0.95	0.95	0.91	1.06	1.00
	c Peternakan dan hasil-hasilnya	0.57	0.55	0.49	0.58	0.54
	d Kehutanan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	e Perikanan	21.34	21.64	19.32	16.04	17.19
2	Pertambangan dan Penggalan	0.52	0.52	0.49	0.54	0.57
	a Minyak dan Gas	0	0	0	0	0
	b Pertambangan Tanpa Migas	0	0	0	0	0
	c Penggalan	0.52	0.52	0.49	0.54	0.57
3	Industri pengolahan	22.99	22.01	22.48	21.09	21.57
	a. Industri Migas	0	0	0	0	0
	b Industri Non Migas	22.99	22.01	22.48	21.99	21.57
4	Listrik, Gas dan Air Minum	2.63	2.55	2.3	2.32	1.9
	a Listrik	2.02	1.97	1.79	1.83	1.46
	b Gas	0	0	0	0	0
	c Air Minum	0.6	0.57	0.51	0.49	0.44
5	Bangunan	14.18	13.19	12.3	15.1	13.72
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.42	6.88	6.67	7.28	7.01
	a Perdagangan	4.97	5.22	5	5.53	5.45
	b Hotel	0.5	0.53	0.5	0.54	0.45
	c Rerstoran	0.96	1.13	1.17	1.21	1.11
7	Angkutan dan Komunikasi	19.96	21.06	24.18	22.89	25.17
	a Pengangkutan	19.38	20.44	23.57	22.17	24.5
	b Komunikasi	0.58	0.61	0.61	0.72	0.67
8	Bank, Lembaga Keuangan dan Jasa Perusahaan	3.58	2.83	3.9	4.36	3.99
9	Jasa-jasa	5.82	5.94	5.98	6.52	6.18

Sumber: Bitung dalam Angka

4.2.4. Peluang Pengembangan Investasi di Kabupaten Kepulauan Talaud

Kabupaten kepulauan Talaud memiliki banyak potensi yang baik untuk dikembangkan dan memiliki daya tarik investasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Kab. Kep. Talaud memiliki keunggulan dalam jumlah produksi kelapa. Maka peluang investasi yang memiliki prospek menguntungkan adalah di subsektor industri pengolahan kelapa. Kab. Kep. Talaud sangat memerlukan industri-industri yang dapat menampung dan

mengolah hasil-hasil sumber daya alam yang dihasilkan di daerah ini, seperti komoditas kelapa. Maka diperlukan industri pengolahan kelapa beserta industri terkait dan pendukungnya agar tercipta suatu *cluster* industri yang berdaya saing. Dengan penguatan cluster-cluster industry, maka suatu daerah akan semakin memiliki peluang untuk mengembangkan potensi terbaiknya dan bersaing di arena global.

Selain peluang investasi pada industri pengolahan kelapa, Kab. Kep Talaud juga memiliki peluang pengembangan investasi di bidang perkebunan lainnya khususnya pada komoditas cengkeh, pala, kopi dan vanili. Sedangkan di sector pertaniannya Kab. Kep Talaud memiliki peluang pengembangan investasi pada komoditas kacang tanah, kacang hijau, jagung, padi lading, umbi-umbian, palawija dan buah-buahan tropical.

Posisi kabupaten kepulauan Talaud yang dikelilingi lautan, membuat daerah ini juga memiliki peluang investasi dibidang perikanan dan olahannya. Potensi kabupaten Kep. Talaud di subsektor perikanan tangkap antara lain ikan tuna, cakalang, tongkol, ikan karang, cucut dan layang. Sedangkan di subsektor perikanan budidaya, jenis komoditasnya relatif terbatas seperti bandeng, kepiting bakau, kuwe dan kerapu.

Banyaknya jumlah pantai pada kabupaten ini membuat Talaud juga memiliki potensi pariwisata. Beberapa daerah potensial wisata yang dapat dikembangkan di daerah ini antara lain:

1. Wisata pantai di Sara Besar, Sara Kecil, Nusa Dolom, Nusa Topor, Mangaran, Pute dan Karatung
2. Wisata budaya di Manee, Goa Arangkaa, Goa Totombatu
3. Wisata Baharidi Pulau Garat, Sara Besar, Sara Kecil, P. Maro/Malo dan Mangupung, Nusa Dolom dan Nusa Topor.

Skala prioritas dari potensi sektor/komoditas unggulan yang perlu dikembangkan di kawasan perbatasan Kab. Kep. Talaud terutama adalah sektor perkebunan khususnya kelapa dan pariwisata.

4.2.5 Hambatan Pengembangan Investasi di Kabupaten Kepulauan Talaud

Menurut BI (2011) salah satu permasalahan wilayah perbatasan di Sulawesi Utara dapat dilihat dari masalah yang dialami oleh Kabupaten Kep. Talaud. Jumlah penduduk Kab. Kep. Talaud pada tahun 2006 sebanyak 83.758 jiwa dimana 48,73% diantaranya merupakan penduduk miskin akibat daya beli masyarakat yang terus menurun akibat inflasi yang sangat tinggi. Tingginya inflasi tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan sejak pasca kemerdekaan yang terakumulasi hingga sampai saat ini. Permasalahan tersebut tentunya tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah Talaud, tetapi juga harus didukung oleh pemerintah pusat. Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan karena apabila kesejahteraan rakyat di daerah ini tidak lebih baik dibandingkan dengan rakyat di negara tetangga (Filipina) maka masyarakat dengan mudah akan mengangkat *issue* keinginan bergabung dengan Filipina sehingga mengancam keutuhan NKRI (seperti kejadian pengibaran bendera Filipina di Pulau Miangas beberapa tahun yang lalu).

Sumber-sumber permasalahan tersebut antara lain:

1. Kebijakan pembangunan pasca kemerdekaan belum memperhatikan daerah perbatasan
2. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional belum optimal menjawab kebutuhan daerah perbatasan.
3. Terkait dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan social, kawasan perbatasan adalah kawasan belakang wilayah RI sehingga kurang mendapat perhatian.
4. Garis-garis batas dengan negara tetangga belum disepakati sehingga sering terjadi kegiatan-kegiatan yang illegal, seperti: *illegal fishing*, *illegal trade*, pelanggaran lintas batas dan criminal lainnya seperti pemutusan jangkar rumpon nelayan setempat.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan

6. Tingginya harga BBM, barang-barang kebutuhan sehari-hari, bahan bangunan karena masih minimnya sarana transportasi.

Terlepas dari berbagai permasalahan tersebut, daerah ini kaya akan sumber daya alam pertanian seperti Kelapa, Pala dan cengkeh. Apalagi karena sebagian besar luas wilayahnya merupakan perairan yang dilalui oleh arus “*Kuroshio*” (arus panas) yang membawa berbagai jenis ikan Pelagis dan Demersal maka daerah ini juga sangat kaya akan hasil perikanan laut. Makanya tidak heran bila di daerah ini terdapat tradisi tertentu yang dikemas sebagai obyek wisata “*Mane’e*” yaitu berupa penangkapan ikan secara tradisional atau penangkapan ikan dengan tangan kosong. Namun potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena maraknya illegal fishing yang menguntungkan negara tetangga kita.

4.2.6. Analisis SWOT Terkait Pengembangan Investasi di Kab. Kep. Talaud

1. Kekuatan (*Strength*)

- i. Potensi berbagai sumber daya sangat potensial, seperti sumber daya laut, pantai, bahari dan lahan pertanian.
- ii. Memiliki keunggulan dalam memproduksi kelapa karena luasnya perkebunan kelapa tersebut.
- iii. Posisi Talaud yang cukup strategis sebagai pintu masuk perdagangan di kawasan Asia Tenggara
- iv. Perkembangan ekonomi Negara tetangga (Filipina) yang semakin meningkat, dapat dijadikan peluang sebagai pasar yang potensial, khususnya komoditi perkebunan kelapa, pala, kopi dan vanili berikut produk olahannya.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- i. Infrastruktur di kawasan ini yang sangat terbatas, terutama sarana transportasi dan jaringan jalan untuk aksesibilitas antar wilayah.
- ii. Aksesibilitas ke Ibukota Propinsi di Kota Manado pada umumnya ditempuh dengan perjalanan laut dengan trip pelayaran yang sangat terbatas.

- iii. Memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan, rawan gelombang tinggi, daerah tertinggal. Hal ini terkadang menyulitkan upaya pengembangan kawasan tersebut.
- iv. Pemilikan modal bagi para pelaku usaha di daerah tersebut masih cukup terbatas, sehingga diperlukan penguatan modal usaha untuk investasi yang cukup besar.
- v. Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut relatif masih rendah dengan persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang kurang merata.

3. Peluang (*Opportunities*)

- i. Pasar untuk industri pengolahan kelapa ke dalam maupun luar negeri sangat luas dan sangat terbuka. Namun jika komoditi kelapa tersebut dapat dioptimalkan penggunaannya sebagai produk turunan
- ii. Masih banyak lahan dan daerah wisata yang potensial namun belum dikembangkan.
- iii. Perdagangan lintas batas dan berlakunya *free trade zone*.
- iv. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan tersebut.

4. Ancaman (*Threat*)

- i. Belum memiliki landasan yuridis yang dfinal khususnya penetapan landasan kontinen sebagai dasar penetapan batas wilayah laut Indonesia – Filipina.
- ii. Rusaknya habitat laut akibat dari eksplorasi yang merusak lingkungan, sehingga hal ini sangat merugikan bagi daerah yang sedang mempromosikan tempatnya sebagai tujuan investasi

4.3. Model Teoritis Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan

Kondisi wilayah perbatasan di Indonesia seperti Kota Sabang, Kab. Kep. Talaud dan daerah lainnya seperti Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur yang masih sangat memiliki keterbatasan infrastruktur, maka kebijakan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan harus mendahulukan

pembangunan infrastruktur (*Infrastructure led*). Kebijakan mendahulukan pembangunan infrastruktur bisa melibatkan peran pemerintah atau lembaga multilateral dalam perencanaan pengembangan kawasan yang belum atau tidak mempunyai nilai ekonomi secara signifikan. Hal ini dikarenakan kawasan yang akan dikembangkan tersebut secara geografis adalah kawasan terpencil atau karena alasan politik dan keamanan sehingga tidak berkembang. Dua contoh kawasan yang mewakili pendekatan ini adalah *Tumen River Development Zone* dan Hongkong-Shenzhen *Special Economic Zone* (SEZ).

Relevansi di Indonesia

Pada dasarnya semua wilayah perbatasan di Indonesia merupakan daerah yang minim infrastruktur. Wilayah perbatasan pada umumnya merupakan daerah yang masih mengandalkan sektor pertanian (tradisional) dalam menopang perekonomian daerahnya.

Kebijakan *infrastruktur led* merupakan kebijakan yang sangat diperlukan bagi daerah-daerah perbatasan yang terpencil seperti Kab Talaud dan Kota Sabang, mengingat selama ini daerah tersebut belum atau tidak mempunyai nilai ekonomi secara signifikan. Selain itu kawasan perbatasan ini secara geografis adalah kawasan terpencil atau karena alasan politik dan keamanan sehingga tidak berkembang.

Implementasi Kebijakan ini bisa melibatkan peran pemerintah atau lembaga multilateral dalam perencanaan pengembangan kawasan. Kabupaten Rondo dan Talaud akan diproyeksikan menjadi pintu gerbang masuk ke Indonesia dalam program ASEAN Connectivity. Ini merupakan peluang sekaligus bagi Indonesia khususnya daerah tersebut untuk dapat mengembangkan daerahnya.

4.4. Kerjasama Internasional yang Dapat Mendukung Kawasan Perbatasan Sulawesi Utara

4.4.1. BIMP- EAGA dan ASEAN Connectivity

BIMP-EAGA merupakan kerjasama subregional antara daerah pertumbuhan ASEAN timur yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,

Filipina untuk meningkatkan perdagangan, investasi, pariwisata dalam sub kawasan dengan memfasilitasi (i) pergerakan manusia, barang, dan jasa yang lebih biasa. (ii) perkembangan infrastruktur penting dalam subregion, (iii) koordinasi manajemen ekosistem dan sumber daya bersama untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan. Tujuan jangka pendek hingga menengah adalah memastikan EAGA (East ASEAN Growth AREA) menjadi lokasi utama untuk industri pertanian yang bernilai tambah tinggi dan produksi berbasis sumber daya alam dan pariwisata yang berkualitas sehingga dalam jangka panjang memastikan produksi tanpa sumber daya tercipta dalam sub region tersebut.

Dalam kerjasama ini, provinsi Sulawesi utara berada pada letak yang strategis di lingkaran Pasifik yang menghadap negara-negara Asia Timur dan Pasifik. Posisi ini memberi keuntungan untuk Sulawesi Utara karena Sulawesi Utara potensial untuk menjadi gerbang perdagangan antara kawasan timur Indonesia dan kawasan Asia Pasifik. Sebagai gerbang utama, Sulawesi Utara didukung oleh pelabuhan laut Bitung yang mampu menangani kapal-kapal besar, dan bandara internasional Sam Ratulangi. Pelabuhan Bitung telah berkeksansi untuk memiliki fasilitas penampungan untuk aktivitas bongkar pasang komoditas ekspor–impor atau barang-barang. Dalam perencanaan nasional, Sulawesi Utara (Bitung atau Amurang) akan dikembangkan menjadi daerah untuk pintu gerbang international.

Dalam era globalisasi, semua pihak harus mengantisipasi perkembangan dan keuntungan dari wilayah seperti Asian Free Trade Area (AFTA), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), North America Free Trade Area (NAFTA), dan pertumbuhan ekonomi global memiliki potensi untuk menggunakan fasilitas perdagangan Sulawesi Utara.

Keuntungan komparatif yang dimiliki Sulawesi Utara dan dukungan dari berbagai fasilitas perlu dikelola secara optimal untuk mengakselerasi perkembangan Sulawesi Utara. Sebagai akibatnya, kegunaan dan alokasi dari keuntungan yang disebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi yang didorong oleh perdagangan, pariwisata, industri produksi, dan sektor lain di Sulawesi Utara secara spesifik dan Indonesia secara umum.

Menurut Master Plan (2010) BIMP–EAGA telah melakukan beberapa inisiatif kebijakan yang penting. Pada tahun 2007, para pemimpin EAGA telah mencanangkan BIMP-EAGA sebagai tempat uji coba (*test bed*) untuk implementasi persetujuan ASEAN terutama yang berhubungan dengan transportasi dan fasilitasi perdagangan. Menteri transportasi BIMP-EAGA menandatangani 4 persetujuan penting mengenai transportasi udara, tanah dan laut sejak 2007 untuk mengembangkan konektivitas di dalam sub-kawasan. Persetujuan udara secara khusus ditandai sebagai persetujuan penting untuk menciptakan Bandar udara internasional sekunder. Namun demikian kondisi pasar saat ini untuk penumpang dan arus kargo tidak mendukung perkembangan yang cepat dari konektivitas udara intra EAGA. Arus udara dalam kawasan BIMP-EAGA tetap ringan. Transportasi maritime Intra-EAGA juga tidak meningkat secara substansial. Banyak rute yang ditujukan untuk transportasi darat, udara, dan laut telah dieksplorasi dan dicoba dengan operator komersial dan beberapa di antaranya dihentikan karena faktor pengangkutan yang rendah.

Dalam fasilitasi perdagangan, BIMP – EAGA telah memprakarsai implementasi program-program ASEAN seperti ASEAN single window (ASW). Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Sekuritas BIMP-EAGA (CIQS) telah didirikan pada tahun 2006 dan telah memetakan kekurangan dan reformasi yang diperlukan dalam peraturan CIQS, regulasi dan prosedur terhadap standar internasional dan telah berhasil menciptakan *Memorandum of Understanding* dalam Harmonisasi CIQS untuk membantu mencapai proses CIQS yang sederhana dan lancar. Meskipun demikian implementasi CIQS masih mengalami tantangan akibat banyaknya peraturan konvensi internasional yang harus dipenuhi dan *best practices* yang dilakukan umumnya dibangun berdasarkan program dan prioritas nasional.

Pada tahun 2009, pemimpin BIMP – EAGA mendorong gerakan utama menuju “*projectisation*” sebagai contoh mempercepat implementasi proyek prioritas untuk mencapai visi dan tujuan strategis. Agar proyek BIMP –EAGA

dapat diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur nasional, BIMP-EAGA mendorong diskusi pada tahun 2009 untuk menciptakan mekanisme merasionalisasi identifikasi, pemrioritasan proyek infrastruktur dalam jangka pendek dan memonitor implementasi mereka dalam jangka panjang.

BIMP –EAGA masih menghadapi beberapa tantangan sejak berdirinya tahun 1994. Beberapa diantaranya : (i) ketergantungan yang terus menerus dalam aktivitas ekonomi berbasis sumber daya dan investasi sub-kawasan yang sedikit dalam industri pertanian yang merupakan fokus dari BIMP-EAGA, (ii) sektor swasta yang lemah dengan kapasitas yang lemah untuk mencapai kesempatan-kesempatan, (iii) besarnya kemiskinan dalam sub-kawasan dan (iv) kurangnya infrastruktur vital terutama di Indonesia dan Filipina yang merupakan masalah utama dalam investasi sektor swasta

4.4.2. Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)

Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion merupakan konservasi kawasan untuk laut sulu dan sulawesi yang dilakukan oleh tiga negara ASEAN – Indonesia, Malaysia dan Filipina. Kondisi laut tersebut ditandai iklim tropis, air yang hangat dan karakteristik biologi dan kelautan yang berkontribusi terhadap keanekaragaman laut. Inisiatif konservasi di ecoregion ini dilakukan oleh WWF pada tahun 1999 dan Conservation International. Kedua Lembaga non pemerintah ini memobilisasi pendirian daerah laut yang dilindungi dengan dibantu oleh dukungan penegak hukum di daerah-daerah konservasi prioritas, yang dikenal sebagai marine biodiversity conservation corridors (MBCC).

Visi dari SSME adalah menciptakan *ecoregion* yang unik dan menjadi sumber keanekaragaman dengan integritas lingkungan yang baik, dan memungkinkan terciptanya habitat yang baik bagi spesies yang dilindungi. Dalam mencapai visi di atas, masalah yang kerap dialami SSME saat ini terancam illegal fishing (penggunaan racun dan bahan peledak) yang menyebabkan degradasi lingkungan.

4.4.3. Infrastruktur yang mendukung perekonomian Kerjasama di Kawasan Perbatasan

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado - Bitung

KAPET Manado – Bitung didirikan berdasarkan keputusan presiden no 14 tahun 1998. Lokasi dari KAPET tersebut memiliki potensi untuk perkembangan yang cepat, memiliki sektor utama untuk mengakselerasi gerakan perkembangan ekonomi di daerah sekitar, membutuhkan investasi dalam jumlah yang besar untuk meningkatkan perkembangan kawasan dan daerah utama, perkembangan mereka menjadi prioritas untuk mendorong perekonomian regional (lokal, regional dan nasional).

KAPET Manado – Bitung meliputi seluruh wilayah Kotamadya Bitung, seluruh wilayah kotamadya Manado, dan sebagian wilayah Kabupaten Minahasa yang meliputi kecamatan-kecamatan Likupang, Dimembe, Airmadidi, Kauditan, Wori, Pineleng, Tombariri, Kawangkoan, Tompaso dan Langowan.

Bandar udara Sam Ratulangi internasional, yang berlokasi 17 km dari Manado, merupakan salah satu Bandar udara paling sibuk di timur Indonesia. Bandar udara ini ditujukan untuk menjadi salah satu dari 11 titik masuk ke Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Budaya serta menjadi pintu gerbang utama ke Bunaken. Hampir semua tujuan di Indonesia dapat dicapai dengan mudah dari Bandar udara internasional ini. Bandar Udara Sam Ratulangi memiliki jasa penerbangan yang internasional yang teratur menuju dan dari Singapura (Silk Air) 4 hari dalam seminggu dan Davao, Filipina (Lion/Wings air) sekali seminggu. Penerbangan internasional ke dan dari Jepang, Cina dan Taiwan dibuka untuk jangka waktu mendatang.

Pelabuhan Bitung merupakan salah satu dermaga di Indonesia yang saat ini menangani jalur pelayaran dan kargo internasional. Dermaga ini sangat strategis, karena selat Malaka berada pada pusat kepulauan Indonesia, menghubungkan kawasan timur dan barat Indonesia. Mempertimbangkan posisi strategisnya, dermaga Bitung direncanakan menjadi dermaga internasional di Timur Indonesia, yang menangani transportasi kargo local, nasional, dan internasional sebagai pusat konsolidasi kargo di timur Indonesia, yang didukung pula oleh kawasan sekitarnya. Dermaga ini dipersiapkan menjadi kawasan dengan standar dan kualifikasi internasional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pengembangan investasi wilayah perbatasan Indonesia maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Berdasarkan tujuan penelitian yang pertama, bahwa secara umum kondisi perbatasan Indonesia yang meliputi perbatasan darat dan laut masih memiliki keterbatasan dalam berbagai hal yang menyebabkan minimnya pengembangan investasi di setiap daerah perbatasan ini.
2. a. Karakteristik umum kawasan perbatasan, diantaranya:
 - Sebagian besar memiliki kondisi sosial-ekonomi serta infrastruktur yang terbatas.
 - Beberapa bertipe logi kepulauan atau pulau-pulau kecil dan tersebar yang secara geografis sering berjarak lebih dekat dengan kegiatan ekonomi negara tetangga daripada pusat pemerintahan dari provinsi yang melingkupinya.
 - Kegiatan sosial dan ekonominya cenderung dipengaruhi oleh atau bergantung kepada wilayah negara tetangga (khususnya perbatasan dengan Malaysia dan Filipina), misalnya wawasan kebangsaan lebih mengenal tokoh negara tetangga.
- b. Permasalahan yang berdimensi lokal dan domestik, yaitu gambaran kemiskinan sebagai akibat dari tidak fokusnya intervensi kebijakan dimasa lalu sehingga terabaikannya pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, diikuti dengan penanganan wilayah perbatasan yang masih kental dengan nuansa sentralistik.
- c. Permasalahan yang berdimensi regional antar negara, lebarnya kesenjangan ekonomi antar penduduk sendiri dengan negeri tetangga, pergeseran atau hilangnya patok (tapal) batas sehingga menimbulkan konflik mengenai

garis batas dan kasus lainnya.

Kondisi permasalahan tersebut di atas mempengaruhi pembangunan ekonomi khususnya melalui pengembangan investasi. Dengan buruknya atau terbelakangnya keadaan daerah kawasan perbatasan, membuat investor belum berfikir untuk melakukan investasi di daerah tersebut.

3. Berdasarkan tujuan penelitian yang kedua bahwa pada daerah perbatasan laut di Kota Sabang dan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki peluang pengembangan investasi dengan keunggulan masing-masing.
 - a. Kabupaten Kep. Talaud memiliki potensi di sektor perkebunan kelapa. Maka investasi di wilayah ini diprioritaskan di sektor perkebunan kelapa hingga industri pengolahannya (Hulu hingga ke hilir), serta industri terkait dan pendukungnya, agar tercipta suatu kluster industri yang berdaya saing
 - b. Talaud juga memiliki potensi pariwisata alam yang indah. Maka investasi di bidang pariwisata juga cocok dilakukan disini.
 - c. Kota Sabang memiliki potensi di sektor jasa pariwisata. Maka investasi di wilayah ini hendaknya diprioritaskan untuk penguatan industri pariwisata, salah satunya dengan cara membangun industri terkait dan pendukungnya
 - d. Sektor perdagangan sangat potensial di kawasan Sabang, mengingat letaknya yang strategis. Maka infrastruktur harus dibangun untuk mendukung kegiatan perdagangan internasional tersebut.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil kajian pengembangan investasi wilayah perbatasan maka dapat diajukan beberapa rekomendasi kebijakan. Diperlukan suatu strategi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah dengan cara mengembangkan investasi di daerah antara lain dengan cara:

1. Pembentukan tim percepatan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan (Kep. Talaud dan Sabang).
2. Menggali Potensi dan Peluang Investasi di Wilayah perbatasan

Studi-

studi secara mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk menggalipotensi dan mencari peluang investasi di setiap wilayah perbatasan.

3. Membangun infrastruktur seperti sarana transportasi, mengingat kedua daerah ini cukup terisolir (P. Rondo dan Kep Talaud).
4. Penetapan dan Distribusi zona potensi investasi.
5. Penetapan daya tarik dan insentif investasi.

- Tax holiday, misalnya selama 10 tahun.
- Subsidi bahan bakar.
- Prioritas penyelesaian dan bebas biaya pungutan.
- Bebas biaya impor mesin dan alat berat peralatan usaha, namun diawali dengan dukungan infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai.

Seperti contoh nyakaus pelabuhan bebas di Sabang. Meskipun di Sabang sudah memberikan insentif berupa pembebasan biaya-biaya impor dan lain-lain pada pelabuhan bebas Sabang namun pelabuhan bebas ini tetap tidak berkembang.

Hal ini dikarenakan pelabuhan ini belum berstandar internasional, infrastruktur lainnya belum mendukung serta tidak ada. Belum terbentuknya badan usaha yang mengurus masalah pelabuhan bebas Sabang secara profesional.

6. Dukungan regulasi dan pemantapan regulasi.
7. Promosi dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri.
8. Pengelolaan dan pengamanan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2011. Sulawesi Utara Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2011. Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Buhiharso, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Creamer, Caroline, Neale Blair, Brendan O'Keeffe, Chris Van Egeraat, John Driscoll, 2008, *Fostering Mutual Benefits in Cross-Border Areas: The Challenges and Opportunities in Connecting Irish Border Towns and Villages*, International Centre for Local and Regional Development
- Effendy *et al.* 2009. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Barat). Laporan Penelitian. Universitas Tanjung Pura.
- Friedman, John & Weaver, Clyde. 1979. *Territory & Function - The Evolution of Regional Planning*. London: Edward Arnold.
- Husnaldi, 2006, Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Daratan Antar Negara (Studi Kasus: Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat) [Thesis] Program PPS. Universitas Diponegoro.
<http://www.antarasulut.com/berita/12797/profil-kabupaten-kepulauan-talaud>. diakses pada 26 Januari 2010
- Ikhwanuddin, 2007, Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan kawasan Perbatasan Nasional, Bappenas
- Mankiw, G. 2000. *Macroeconomics*. Fourth Edition. Worth Publishers, Harvard University, New York.
- Mawardi, I. 2010. Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan Darat Sebagai Pintu Gerbang Aktivitas Ekonomi dan Perdagangan dengan Negara Tetangga. http://www.sc-drr.org/Paper_Ikhwanuddin.pdf
- Porter, M. E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*, MacMillan Press: New York.
- Tarmansyah. 2003. Potensi dan Nilai Strategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalahan dan Solusinya. Puslitbang Indhan Balitbang Dephan.
- Tarmansyah. 2004. Manajemen Wilayah Perbatasan Negara, Pusat Kajian Administrasi Internasional Lembaga Administrasi Negara. Laporan Akhir Kajian.

- Master Plan on ASEAN Connectivity. 2010. Association of Southeast Asian Nations. Kajian Staf. Pengembangan Jaringan Kereta Api di Pulau Sulawesi. Unpublished paper. Direktorat Jenderal Penataan Ruang. North Sulawesi Province General Overview. http://bimpeaganorthsulawesi.org/sulut_home.html
- Miller. M..M, J.L. Gibson, & G.N Wright. 1991. Location Quotient Basic Tool for Economic Development Analysis. *Economic Development review*, 9 (2); 65
- Rusastra, I.W., Pantjar Simatupang dan Benny ranchman. 2000. Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berlandaskan Agribisnis. Monograph Series No. 23. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Wu, Chung- Tong. 2001. Cross-Border Development in a Changing World : Redefining Regional Development Policies. In Edgington, David W. et.al.(eds). *New Regional Development Paradigms*, Vol. 2, p.21-36. London : Greenwood press.